

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2025-2029



**Disusun oleh :
Pemerintah Kabupaten Tapin
Provinsi Kalimantan Selatan**

KATA PENGANTAR



Buku Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintahan Kabupaten Tapin menjalankan amanah UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang didalamnya memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Penanggulangan Bencana dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU. No. 24 tersebut juga ditegaskan bahwa penanggulangan bencana yang berpotensi terjadi, tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata tetapi juga menjadi tanggungjawab semua pihak yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan bencana seperti akademisi, Lembaga kemasyarakatan, media massa, institusi swasta, dan juga masyarakat umum.

Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan langkah-langkah yang sesuai diantaranya dengan penyusunan RPB Kabupaten Tapin dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Tapin. Penyusunan RPB ini sudah dimulai sejak September sampai dengan Desember Tahun 2024. Dalam RPB Tahun 2025-2029 ini dapat dilihat program dan kegiatan dalam lima tahun ke depan yang menjadi prioritas Kabupaten Tapin dalam penanggulangan bencana.

Akhirnya Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pemangku kepentingan yang telah mendukung tersusunnya Buku Rencana Penanggulangan Bencana ini, dengan harapan buku ini dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tapin yang kita cintai ini.

Semoga upaya kita dalam menyelamatkan manusia dari ancaman bencana memberikan hasil yang optimal dan diridhoi oleh Allah SWT.

Rantau, Desember 2024

Kepala BPBD Kabupaten Tapin

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	VII
DAFTAR LAMPIRAN	IX
RINGKASAN EKSEKUTIF	X
DAFTAR ISTILAH.....	XI
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN.....	2
1.3 KERANGKA PIKIR.....	3
1.4 KEDUDUKAN DOKUMEN.....	4
1.5 LANDASAN HUKUM.....	6
1.6 RUANG LINGKUP	7
BAB 2 KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH	11
2.1 KARAKTERISTIK KEBENCANAAN DAERAH	11
2.1.1. Administrasi Kabupaten Tapin	11
2.1.2. Kondisi Demografis.....	14
2.1.3. Kondisi Geografis.....	17
2.1.4. Kondisi Ekosistem dan Topografis.....	18
2.1.5. Kondisi Hidrologis	25
2.1.6. Kondisi Iklim.....	27
2.1.7. Kondisi Geologis	30
2.1.8. Kondisi Ekonomi dan Kemiskinan.....	35
2.1.9. Penggunaan Lahan.....	39
2.1.10 Kondisi Keterjadian Bencana	41
2.2 RISIKO BENCANA DAERAH	43
2.2.1 Bencana Banjir.....	45

2.2.2	Bencana Banjir Bandang	52
2.2.3	Bencana Cuaca Ekstrem.....	60
2.2.4	Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	68
2.2.5	Bencana Kekeringan	75
2.2.6	Bencana Tanah Longsor.....	83
2.2.7	Deskripsi Peta Risiko Kabupaten.....	89
2.3	PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI	98
2.4	MASALAH POKOK (ANALISIS AKAR MASALAH).....	100
2.5	RUMUSAN ISU STRATEGIS	103
BAB 3	PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	105
3.1	KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA	105
3.1.1	KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL	105
3.1.2	KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	118
3.1.3	KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TAPIN	120
3.2	KERANGKA KERJA PENANGGULANGAN BENCANA	122
3.2.1	PRA BENCANA	122
3.2.2	SAAT BENCANA	123
3.2.3	PASCA BENCANA	123
3.3	PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	142
BAB 4	TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM	150
4.1.	TUJUAN DAN SASARAN	150
4.2.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	152
4.3.	PROGRAM PENANGGULNGAN BENCANA	157
BAB 5	RUMUSAN RENCANA AKSI	160
5.1	RUMUSAN RENCANA AKSI	160
BAB 6	PEMADUAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI	214
6.1	PEMADUAN PARA PIHAK NON PEMERINTAH	214
6.2	PEMADUAN KE PERENCANAAN LAINNYA	215
6.3	PENGENDALIAN DAN EVALUASI	217
BAB 7	PENUTUP	226
7.1	PENUTUP	226
LAMPIRAN		227

DAFTAR TABEL



Tabel 1. 1	Lingkup Pelaksana Rencana Aksi	9
Tabel 2. 1	Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapin.....	12
Tabel 2. 2	Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023	14
Tabel 2. 3	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tapin Tahun 2023	15
Tabel 2. 4	Proyeksi Penduduk Kabupaten Tapin 5 (lima) tahun ke depan.....	16
Tabel 2. 5	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan jenis Kelamin di Kabupaten Tapin, 2022.....	16
Tabel 2. 6	Ketinggian Kabupaten Tapin	21
Tabel 2. 7	Kelerengan Kabupaten Tapin.....	22
Tabel 2. 8	Luasan Jenis Tanah Kabupaten Tapin.....	30
Tabel 2. 9	Tipe Batuan Kabupaten Tapin.....	33
Tabel 2. 10	PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022.....	36
Tabel 2. 11	Laju Pertumbuhan Kabupaten Tapin	37
Tabel 2. 12	Nilai Variabel Kemiskinan di Kabupaten Tapin	39
Tabel 2. 13	Luas Tutupan Lahan Kabupaten Tapin	40
Tabel 2. 14	Kejadian Bencana di Kabupaten Tapin Periode Tahun 2014 – 2023 (10 tahun terakhir)	41
Tabel 2. 15	Potensi Bahaya Banjir di Kabupaten Tapin.....	46
Tabel 2. 16	Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir di Kabupaten Tapin.....	47
Tabel 2. 17	Potensi Kerugian Bencana Banjir di Kabupaten Tapin	48
Tabel 2. 18	Kelas Kerentanan Bencana Banjir di Kabupaten Tapin	50
Tabel 2. 19	Kapasitas Per Kecamatan Bencana Banjir di Kabupaten Tapin.....	50

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Tabel 2. 20	Potensi Risiko Banjir di Kabupaten Tapin	51
Tabel 2. 21	Potensi Risiko Banjir Bandang di Kabupaten Tapin	53
Tabel 2.22	Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tapin	55
Tabel 2.23	Potensi Kerugian Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tapin	56
Tabel 2.24	Kelas Kerentanan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tapin	57
Tabel 2.25.	Kapasitas Per Kecamatan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tapin	58
Tabel 2.26	Potensi Risiko Banjir Bandang di Kabupaten Tapin	59
Tabel 2.27	Potensi Bahaya Banjir di Kabupaten Tapin	60
Tabel 2.28	Potensi Penduduk Terpapar Cuaca Ekstrim di Kabupaten Tapin	63
Tabel 2.29	Potensi Kerugian Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Tapin	64
Tabel 2.30	Kelas Kerentanan Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Tapin	65
Tabel 2.32	Potensi Risiko Cuaca Ekstrim di Kabupaten Tapin	67
Tabel 2.33	Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tapin	69
Tabel 2.34	Potensi Kerugian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tapin	71
Tabel 2.35	Kelas Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tapin	72
Tabel 2.37	Potensi Risiko Kebakaran dan Hutan di Kabupaten Tapin	74
Tabel 2.38	Potensi Bahaya Kekeringan di Kabupaten Tapin	76
Tabel 2.39	Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kekeringan di Kabupaten Tapin	78
Tabel 2.40	Potensi Kerugian Bencana Banjir di Kabupaten Tapin	79
Tabel 2.41	Kelas Kerentanan Bencana Kekeringan di Kabupaten Tapin	80
Tabel 2.42	Kapasitas Per Kecamatan Bencana Kekeringan di Kabupaten Tapin	80
Tabel 2.43	Potensi Risiko Kekeringan di Kabupaten Tapin	81
Tabel 2.44	Potensi Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Tapin	83
Tabel 2.45	Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tapin	84
Tabel 2.46	Potensi Kerugian Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tapin	85
Tabel 2.47	Kelas Kerentanan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tapin	86
Tabel 2.48	Kapasitas Per Kecamatan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tapin	87
Tabel 2.49	Potensi Risiko Tanah Longsor di Kabupaten Tapin	88
Tabel 2.50	Rekapitulasi Tingkat Risiko Bencana Prioritas di Kabupaten Tapin	98

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Tabel 2.51	Rumusan Masalah dan Akar Masalah Kebencanaan di Kabupaten Tapin.....	100
Tabel 3. 1	Fokus Capaian RIPB Tahun 2020-2044	107
Tabel 3. 2	Focus Prioritas Renas PB.....	115
Tabel 3. 3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan	118
Tabel 3. 4	Mandat BPBD Kabupaten Tapin saat Pra Bencana.....	125
Tabel 3. 5	Peran dan Mandat Urusan Penanggulangan Bencana fase Saat bencana /Tanggap darurat	126
Tabel 3. 6	Peran dan Mandat Urusan Penanggulangan Fase pasca Bencana	127
Tabel 3. 7	Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana Kabupaten Tapin	128
Tabel 4. 1	Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tapin.....	151
Tabel 4. 2	Proyeksi Capaian IKD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029	152
Tabel 4. 3	Strategi arah kebijakan.....	154
Tabel 5.1.	Rencana Aksi PB Kabupaten Tapin 2025-2029	161
Tabel 6.1	Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	215
Tabel 6. 2	Pemaduan Program dan Sasaran RPB	216
Tabel 6. 3	Format Rencana Pemantauan Per-Semester pelaksanaan dari PRB.....	218
Tabel 6. 4	Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan	219
Tabel 6. 5	Format Kerangka Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana.....	221
Tabel 6. 6	Format Penyajian Hasil Evaluasi tahunan	222
Tabel 6. 7	Format Penyajian Hasil Evaluasi Tengah Periode.....	223
Tabel 6. 8	Format Penyajian Hasil Evaluasi Tahunan.....	223
Tabel 6. 9	Kerangka Pengendalian dan Evaluasi.....	224

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. 1	Kerangka Penyusunan RPB Kabupaten Tapin	3
Gambar 1. 2	Alur Kegiatan Penyusunan RPB Kabupaten Tapin	4
Gambar 1. 3	Kedudukan RPB dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah	5
Gambar 1. 4	Kedudukan RPB Dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana Indonesia	6
Gambar 1. 5	Kedudukan Kabupaten Tapin di Provinsi Kalimantan Selatan	8
Gambar 2. 1	Peta Administrasi Kabupaten Tapin	13
Gambar 2. 2	Peta Topografi Kabupaten Tapin.....	23
Gambar 2. 3	Peta Kelerengan Kabupaten Tapin	24
Gambar 2. 4	Peta Curah Hujan Kabupaten Tapin.....	29
Gambar 2. 5	Jenis Tanah Kabupaten Tapin	31
Gambar 2. 6	Peta Geologi Kabupaten Tapin.....	34
Gambar 2. 7	Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Tapin.....	39
Gambar 2. 8	Trend Kejadian Bencana Kabupaten Tapin Tahun 2015-2023	42
Gambar 2. 9	Diagram Potensi Luas Risiko Banjir Pada Tiap Kecamatan.....	52
Gambar 2. 10	Diagram Potensi Luas Risiko Banjir Pada Tiap Kecamatan.....	54
Gambar 2.11.	Diagram Potensi Luas Risiko Banjir Bandang Pada Tiap Kecamatan	60
Gambar 2.12.	Diagram Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrem Bandang Pada Tiap Kecamatan	62
Gambar 2.13.	Diagram Potensi Luas Risiko Cuaca Ekstrem Bandang Pada Tiap Kecamatan.....	68
Gambar 2.14.	Diagram Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Tiap Kecamatan.....	70
Gambar 2.15.	Diagram Potensi Luas Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Tiap Kecamatan.....	75

Gambar 2.16.	Diagram Potensi Luas Bahaya Kekeringan Pada Tiap Kecamatan.....	77
Gambar 2.17.	Diagram Potensi Luas Risiko Kekeringan Pada Tiap Kecamatan	82
Gambar 2.18.	Diagram Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor Pada Tiap Kecamatan	84
Gambar 2.19.	Diagram Potensi Luas Risiko Tanah Longsor Pada Tiap Kecamatan.....	88
Gambar 2.20	Peta Risiko Bencana Banjir	91
Gambar 2.21	Peta Risiko Bencana Banjir Bandang	92
Gambar 2.22	Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim.....	93
Gambar 2.23	Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.....	94
Gambar 2.24	Peta Risiko Bencana Kekeringan	95
Gambar 2.25	Peta Risiko Bencana Tanah Longsor	96
Gambar 2.26	Peta Risiko Multi Bencana (Multi Hazard).....	97
Gambar 2.27.	Grafik penentuan prioritas penanganan risiko bencana di Kabupaten Tapin.	99
Gambar 3. 1	Bagan Alir APBD Kebencanaan.....	143
Gambar 3. 2	Skema Pooling Fund Bencana	146
Gambar 6. 1	Proses Pemaduan RPB Sebelum/Sedang Penyusunan RPJMD	214

DAFTAR LAMPIRAN



Lampiran 1. Peta Lokasi Aksi PB.....	228
Lampiran 2. Matrik Program Dan Rencana Aksi	234
Lampiran 3. Matriks Program dan Rencana Aksi per OPD.....	285

RINGKASAN EKSEKUTIF



Sejarah dan Potensi Bencana Kabupaten Tapin Dalam 5 tahun terakhir, Kabupaten Tapin mengalami beberapa jenis bencana, termasuk Banjir, Banjir Bandang, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrem. Berdasarkan *Kajian Risiko Bencana* yang disusun pada tahun 2023, Kabupaten Tapin memiliki potensi bencana meliputi Banjir, Banjir Bandang, Kekeringan, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrem, dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Potensi bencana gempa bumi juga mulai terjadi di tahun 2024 dan perlu kajian lebih lanjut.

Terdapat 5 (lima) isu strategis dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tapin. Kelima isu strategis tersebut adalah (1) Pengelolaan Tata Guna Lahan untuk Mengurangi Risiko Banjir dan Kekeringan; (2) Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana; (3) Peningkatan Infrastruktur Drainase dan Irigasi untuk Menghadapi Curah Hujan Ekstrem; (4) Pengembangan Infrastruktur Mitigasi Bencana dan Fasilitas Penampungan Air; dan (5) Penguatan Regulasi dan Koordinasi Lintas Sektor untuk Penanggulangan Bencana yang Efektif.

Tujuan dari penyusunan rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Tapin mencakup berbagai aspek penting. Pertama, pengelolaan tata guna lahan bertujuan untuk meminimalkan risiko banjir dan kekeringan melalui pengelolaan lahan yang sesuai dengan perencanaan bencana. Kedua, peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tanggap dan siap menghadapi bencana. Selanjutnya, peningkatan infrastruktur drainase dan irigasi bertujuan untuk memperkuat kapasitas infrastruktur dalam menghadapi curah hujan ekstrem. Selain itu, pengembangan infrastruktur mitigasi bencana dan fasilitas penampungan air bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang memadai dalam mendukung mitigasi bencana dan penyimpanan air. Terakhir, penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama antar sektor dan memperkuat kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif.

Terdapat rencana aksi yang selanjutnya guna memastikan bahwa rencana aksi penanggulangan bencana ini terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, maka langkah monitoring dan evaluasi secara berkala disetiap masa dan tahapan perlu dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tapin selaku leading sector.

DAFTAR ISTILAH



Pemahaman utuh mengenai Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tapin yang selanjutnya disebut dengan RPB Kabupaten Tapin diperlukan pemahaman beberapa istilah. Istilah-istilah ini disajikan dalam daftar istilah kata dan kelompok kata sebagai berikut :

1. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
5. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
6. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
7. Data dan Informasi Bencana Indonesia yang selanjutnya disingkat DIBI adalah sebuah aplikasi analisis *tools* yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non spasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
8. Forum Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut Forum PRB adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana.

9. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
10. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
11. Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh berbagai penyebab.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
14. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana.
15. Mitigasi Struktural adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan membangun infrastruktur.
16. Mitigasi Non-Struktural adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
17. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin .
18. Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
19. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
20. Penanganan Darurat Bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,

- perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra sarana dan sarana.
21. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
 22. Peringatan Dini adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
 23. Pusdalops adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi Penanggulangan Bencana.
 24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
 25. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
 26. Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2024-2029 adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang menjadi acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana baik saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana untuk jangka waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2029.
 27. Rencana Kontijensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontijensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontijensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
 28. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara BNPB/BPBD bersama kementerian/lembaga, atau perangkat daerah, serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk periode waktu tertentu.
 29. Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAD PRB adalah rencana kegiatan yang disusun untuk mencapai indikator kinerja dari program yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak terkait yang berisi prioritas dan strategi pemerintah daerah untuk mengurangi

Risiko Bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan, mengelola risiko, ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

30. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
31. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketentuan tindakan teknis
32. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
33. Rencana Induk Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RIPB adalah Rencana yang memuat visi dan misi penanggulangan bencana Indonesia dalam jangka panjang yang selaras dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
34. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
37. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
38. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
39. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang selanjutnya disingkat RPKB adalah acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana keadaan darurat.
40. Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
41. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

42. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang dibertugas untuk menanggulangi bencana.
43. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sesuai amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Bab III pasal 8 tentang tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang memadai.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 bahwa, Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana, sebagai salah satu urusan wajib layanan dasar di tingkat kabupaten/kota. Dokumen RPB dapat dikategorikan sebagai "master plan" atau rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (Lima) tahun. Sebagai dokumen perencanaan daerah, RPB harus merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh instansi pemerintahan daerah yang terlibat. Oleh karenanya RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya.

Dokumen Penyusunan RPB Kabupaten Tapin telah disusun pada periode yang lalu dan masa berlakunya sudah berakhir sehingga perlu disusun kembali. Penyusunan dokume RPB sebaiknya terlebih dahulu dilakukan review agar tersusun RPB yang lebih akurat. Dengan dokumen RPB yang disusun ini, setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkordinasi dengan baik.

Adapun potensi ancaman bencana yang tersebar merata di Kabupaten Tapin antara lain adalah: banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrim, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan bencana dari sisi kerentanannya, besaran dampak bencana serta peluang terjadinya di waktu mendatang, maka diperlukan sebuah perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh melalui dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.

Sebagai rencana induk bidang penanggulangan bencana, RPB diharapkan mampu mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis dan menjadi salah satu isu utama dalam perencanaan Pembangunan Kabupaten Tapin. Upaya ini dapat dilakukan dengan sinkronisasi RPB dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun dengan perencanaan-perencanaan tematik lintas sektor di daerah. RPB disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana sehingga memberikan objektivitas arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

1.2 MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

Maksud dari pekerjaan ini adalah menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang menjadi pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Tapin dalam rangka aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana antara lain pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Tujuan

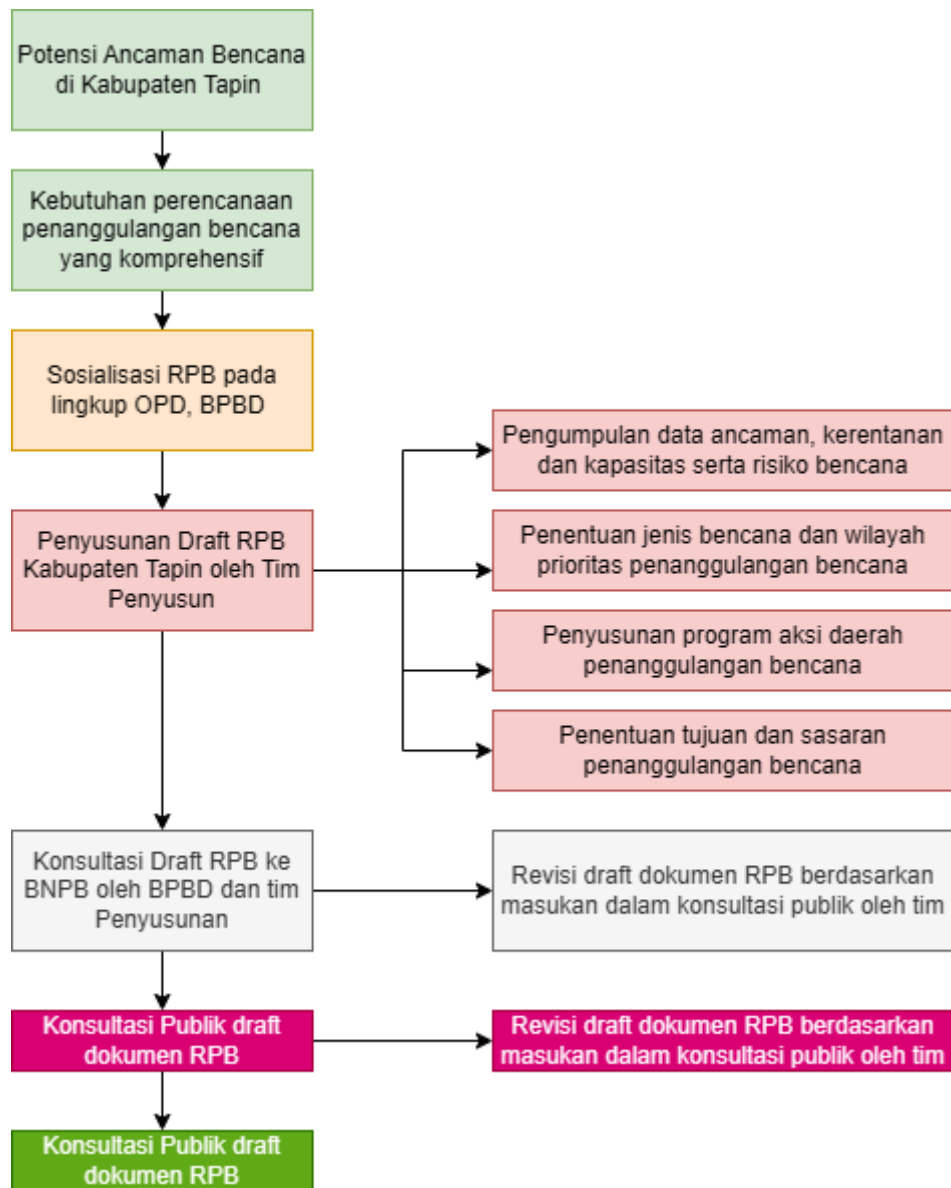
Tujuan dari pekerjaan ini adalah:

1. Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu dan terkoordinasi untuk menurunkan risiko bencana.
2. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kabupaten Tapin menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah.
3. Membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tapin.
4. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Adapun **sasaran** dari pekerjaan ini adalah tersusunnya dokumen rencana penanggulangan bencana sebagai pedoman bagi para pelaku PB (Pemerintah, OMS, Perguruan Tinggi dan Lembaga Usaha) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tapin dan masa periode berlaku Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2025 – 2029.

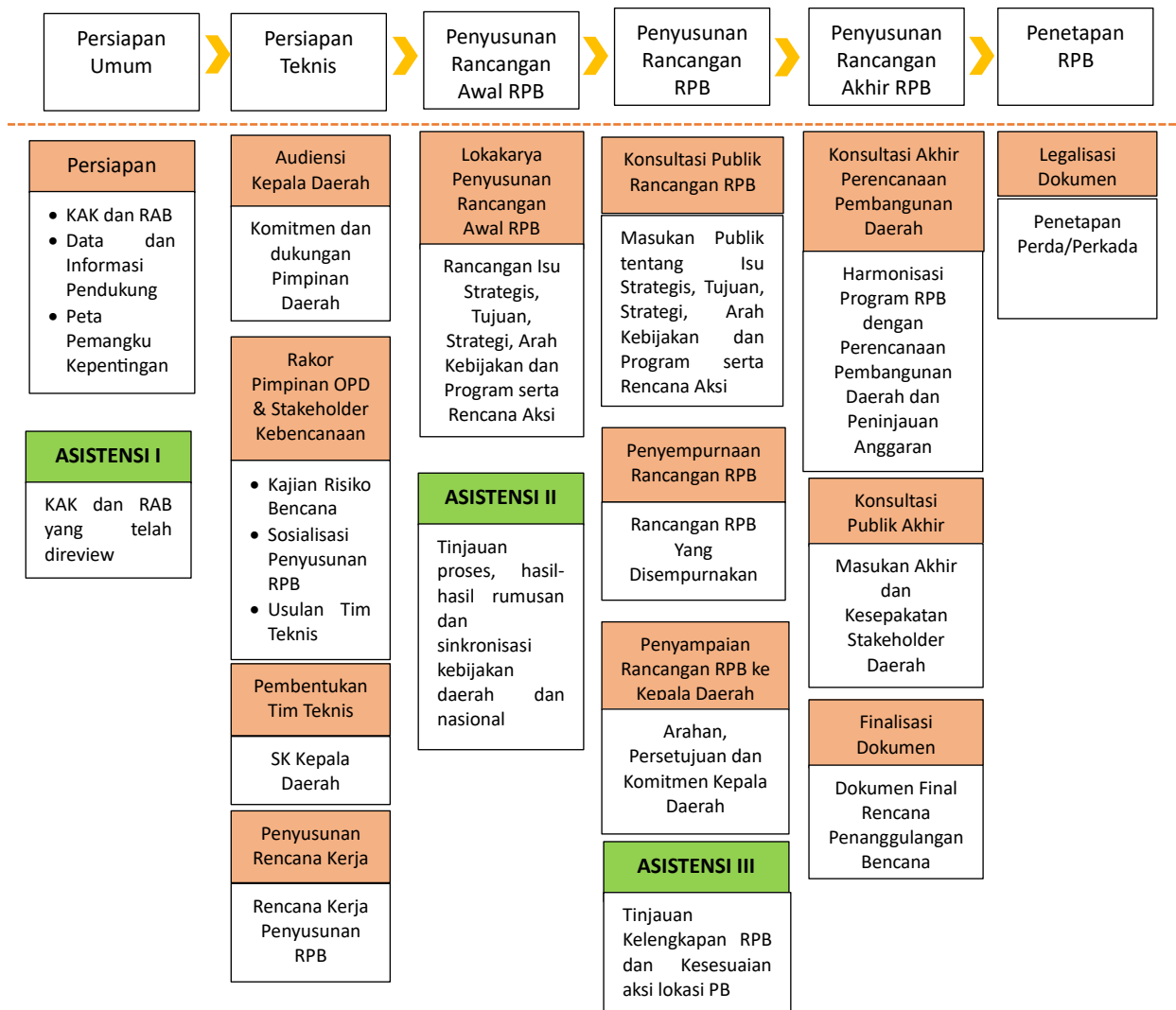
1.3 KERANGKA PIKIR

Kerangka Pikir Penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Tapin dapat dilihat sebagai berikut



Gambar 1. 1 Kerangka Penyusunan RPB Kabupaten Tapin
(sumber: hasil analisis, 2024)

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029



Gambar 1. 2 Alur Kegiatan Penyusunan RPB Kabupaten Tapin
(sumber: hasil analisis, 2024)

1.4 KEDUDUKAN DOKUMEN

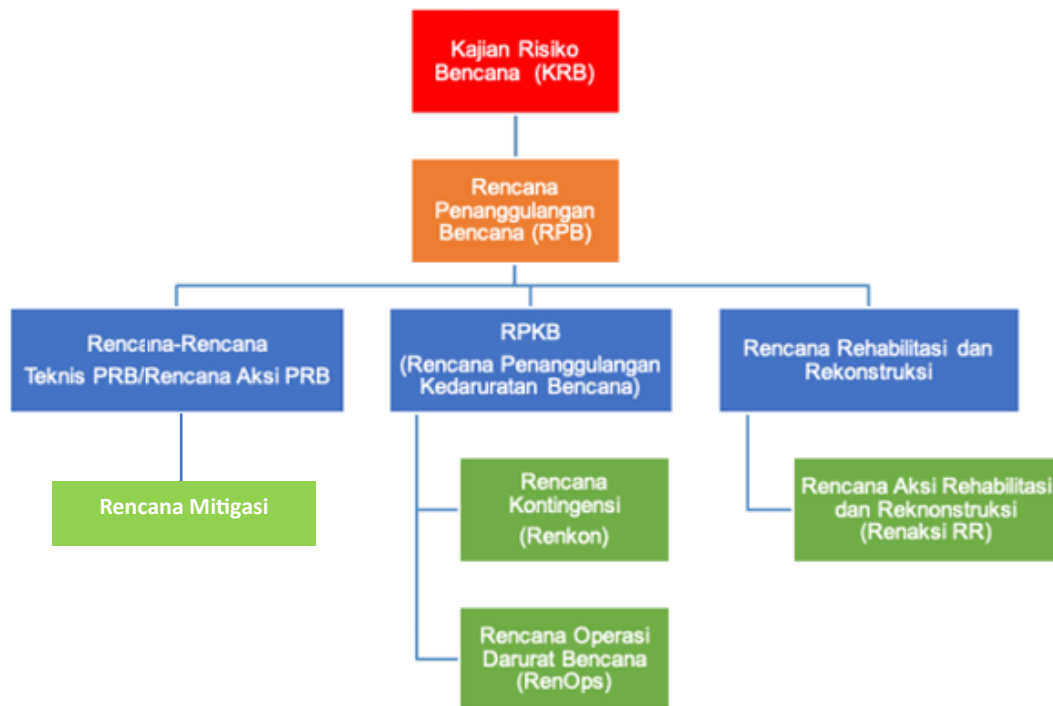
Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, RPB Kabupaten Kulon Tapin Tahun 2025-2029 mempunyai hubungan dan konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, penyusunan RPB Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPD Kabupaten Tapin, RPJMD Kabupaten Tapin dan mengacu pada RPB Provinsi Kalimantan Selatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Tapin. Selanjutnya RPB Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen rencana teknis pengurangan

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

risiko bencana (Rencana Aksi Daerah PRB), dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB), dan dokumen rencana rehabilitasi rekonstruksi. Dokumen RPB ini juga menjadi dokumen sandingan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, termasuk juga dokumen perencanaan-perencanaan sejenis seperti kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), master plan pengembangan wisata, rencana tindak darurat, rencana penanggulangan bencana kawasan khusus dan perencanaan lainnya yang dilakukan oleh semua stakeholder di bidang kebencanaan.



Gambar 1. 3 Kedudukan RPB dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah
(sumber: hasil analisis, 2024)



Gambar 1. 4 Kedudukan RPB Dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana Indonesia
(sumber: hasil analisis, 2024)

1.5 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Tapin setidaknya meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.

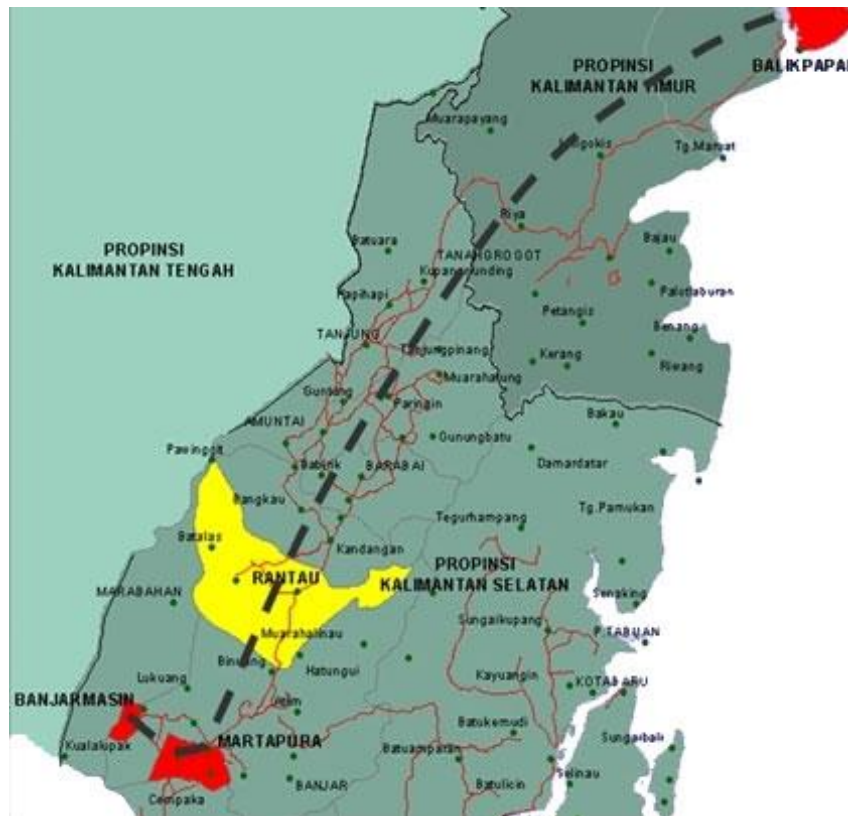
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan BPBD.
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

Beserta peraturan-peraturan daerah Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan yang terkait.

1.6 RUANG LINGKUP

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin tahun 2025-2029, merupakan panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan berbagai kajian dari seluruh sektor yang dijabarkan dalam visi, misi, kebijakan, program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Kabupaten Tapin dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan. Selain itu panduan ini menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan, pemantauan, dan evaluasi dalam kegiatan pada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. Selain itu dokumen ini menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan pemantauan dan evaluasi dari perencanaan.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin mencakup seluruh wilayah administratif yang terdiri dari 12 kecamatan, yaitu Tapin Utara, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Binuang, Candi Laras Selatan, Candi Laras Utara, Bungur, Bakarangan, Piani, Salam Babaris, Hatungun, dan Lokpaikat. Dokumen ini mengatur tahapan penanggulangan bencana (pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana), tipe bencana sesuai UU No. 24 Tahun 2007, serta upaya pengurangan ancaman, kerentanan, dan peningkatan kapasitas. Periode pelaksanaan berlaku dari tahun 2025 hingga 2029, dengan monitoring tahunan dan reviu pada tahun terakhir.



Gambar 1. 5 Kedudukan Kabupaten Tapin di Provinsi Kalimantan Selatan

(sumber: <https://perindagkopukmtapin.wordpress.com/2009/07/03/sekilas-wilayah-kabupaten-tapin/>)

1. Lingkup Risiko Bencana

Jenis-jenis bahaya atau ancaman bencana di suatu daerah dapat diidentifikasi berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana, serta memperhatikan kondisi spesifik ancaman lain yang mungkin belum tercakup dalam kajian tersebut, namun berpotensi memberikan dampak serius. Di Kabupaten Tapin, bencana yang menjadi prioritas meliputi banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan. Ancaman-ancaman ini memerlukan perhatian khusus mengingat risiko dan dampaknya yang signifikan terhadap keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan setempat.

2. Lingkup Jenis Rencana Aksi

Rencana aksi atau kegiatan mencakup langkah-langkah pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, serta rencana mekanisme penanganan darurat dan pemulihan pascabencana yang dirancang untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana ini disusun dengan menyesuaikan tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan tingkatan RPB yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan sinergi dan efektivitas dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di seluruh wilayah yang terdampak.

3. Lingkup Pelaksana Rencana Aksi

Semua pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana di daerah, termasuk pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya, turut dilibatkan dalam pelaksanaan rencana aksi atau kegiatan penanggulangan bencana. Kolaborasi ini bertujuan untuk memanfaatkan berbagai sumber daya, keahlian, dan jaringan yang tersedia, guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan dalam upaya pengurangan risiko dan penanganan bencana. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Lingkup Pelaksana Rencana Aksi

No	Nama Instansi	No	Nama Instansi
1	Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin	20	Dinas Pertanian Kabupaten Tapin
2	TNI	21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin
3	Polres	22	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23	Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin	24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin	25	Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
7	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin	26	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin	27	Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin	28	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin
10	Dinas Perikanan Kabupaten Tapin	29	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
11	Dinas Ketahanan dan Pangan Kabupaten Tapin	30	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin	32	Ketua PMI Kabupaten Tapin
14	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	33	MUI Kabupaten Tapin
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	34	BAZNAS Kabupaten Tapin
16	Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin	35	ORARI Kabupaten Tapin
17	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin	36	RAPI Kabupaten Tapin
18	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin	37	Politeknik Syekh Salman Al-Farisi Rantau
19	Dinas Sosial Kabupaten Tapin	38	RSUD

BAB KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

2

Bab ini menjelaskan atau mendeskripsikan tentang profil kebencanaan di Kabupaten Tapin. Substansi bab ini merujuk pada hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tapin. Bab ini dibagi dalam 5 (lima) sub bab, yaitu karakteristik kebencanaan daerah, risiko bencana daerah, prioritas risiko bencana yang ditangani, masalah pokok atau analisis akar masalah, dan rumusan isu strategis. Penjelasan dari setiap sub bab akan dijabarkan berikut ini:

2.1 KARAKTERISTIK KEBENCANAAN DAERAH

2.1.1. Administrasi Kabupaten Tapin

Aspek administratif merupakan gambaran umum wilayah administratif daerah dalam hal ini Kabupaten Tapin. Kabupaten Tapin adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Tapin adalah **Kota Rantau**, yang merupakan bagian dari Kecamatan Tapin Utara. Wilayah Kabupaten Tapin dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Tapin. Sungai Tapin mempunyai empat cabang yaitu Sungai Muning, Sungai Tatakan, Sungai Halat, dan Sungai Gadung.

Secara administratif, Kabupaten Tapin dibagi menjadi 12 kecamatan, 9 kelurahan, dan 126 desa, yang masing-masing memiliki karakteristik geografis dan sumber daya alam yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial setempat. Kecamatan Tapin Selatan, misalnya, dikenal dengan areal perkebunan kelapa sawitnya yang luas, sedangkan Kecamatan Tapin Tengah memiliki potensi besar dalam bidang perikanan karena akses ke sungai-sungai besar.

Dari data statistik yang ada, wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Tapin Tengah yaitu 309,56 km², dan wilayah kecamatan yang luasnya paling kecil adalah Kecamatan Tapin Utara yaitu 32,34 km². Secara keseluruhan, luasan wilayah kecamatan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

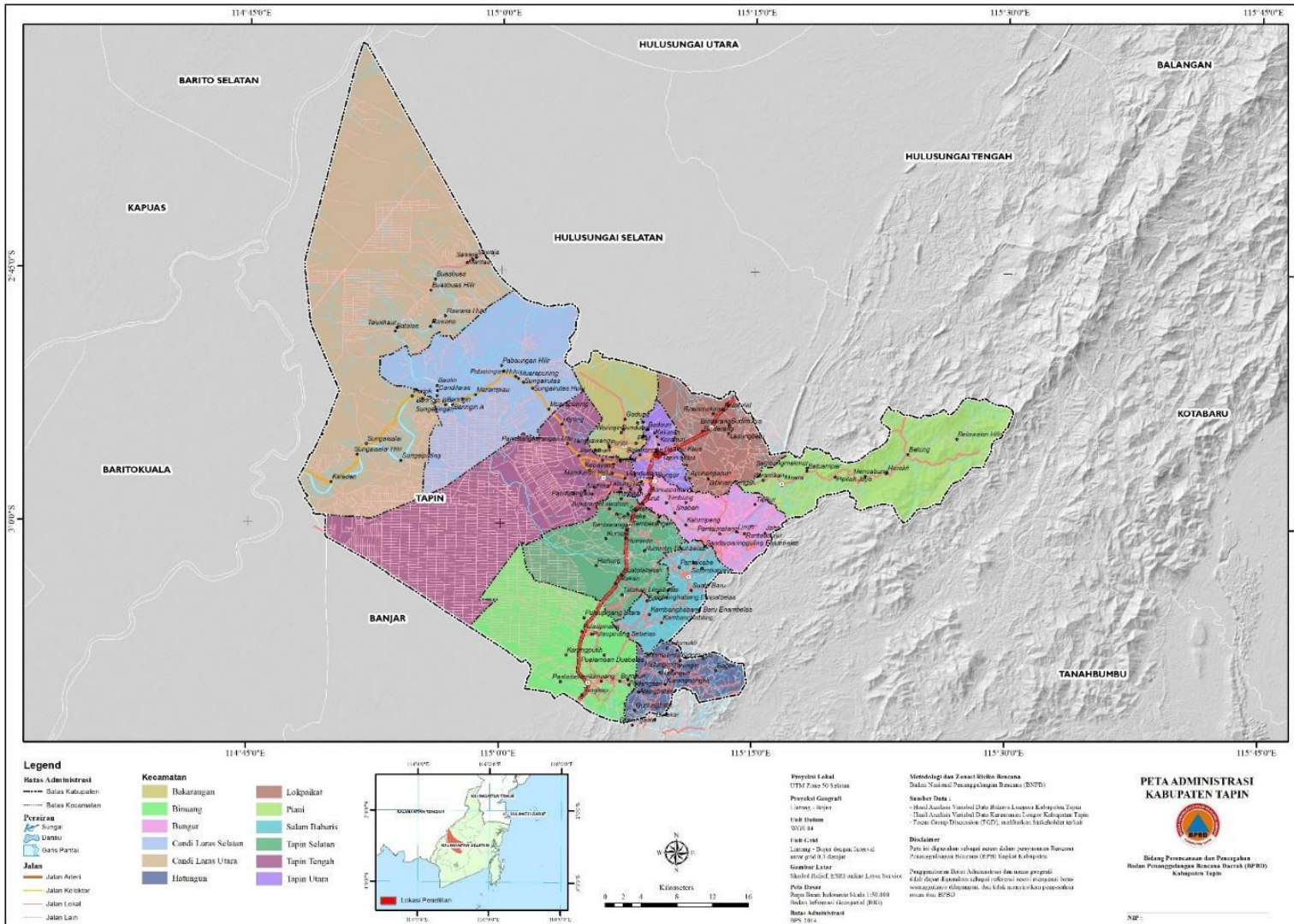
Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Tabel 2. 1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)
1	Binuang	Binuang	132,39
2	Hatungan	Hatungan	95,6
3	Tapin Selatan	Tambarangan	153,44
4	Salam Babaris	Salam Babaris	72,8
5	Tapin Tengah	Pematang Karangan Hulu	309,56
6	Bungur	Bungur	91,26
7	Piani	Miawa	200,09
8	Lokpakait	Lokpakait	93,89
9	Tapin Utara	Rangda Malingkung	32,34
10	Bakarangan	Bakarangan	62,57
11	Candi Laras Selatan	Baringin	249,61
12	Candi Laras Utara	Margasari Ilir	681,4
Total			2174,95

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2023

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Tapin

2.1.2. Kondisi Demografis

Aspek demografis merupakan kondisi populasi yang menjadi faktor risiko bencana di daerah. Aspek kependudukan ini menguraikan jumlah penduduk secara terpilah berdasar gender dan kelompok umur, angka pertumbuhan penduduk, dan tren jumlah penduduk dalam 5 tahun terakhir maupun proyeksi 5 tahun mendatang. Berikut ini disampaikan kondisi demografis Kabupaten Tapin:

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan Data BPS *online* (<https://tapinkab.bps.go.id/id/statistics-table/3>), penduduk Kabupaten Tapin pada tahun 2023 adalah sejumlah 196.498 jiwa.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki)	Penduduk (Perempuan)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan)
0-4	8.218	7.967	16.185
5-9	9.448	8.712	18.160
10-14	8.933	8.465	17.398
15-19	7.363	6.911	14.274
20-24	7.292	7.089	14.381
25-29	7.925	7.794	15.719
30-34	8.036	7.820	15.856
35-39	7.991	7.582	15.573
40-44	7.418	7.197	14.615
45-49	6.721	6.820	13.541
50-54	6.023	6.013	12.036
55-59	4.984	4.978	9.962
60-64	3.817	3.847	7.664
65-69	2.644	2.744	5.388
70-74	1.481	1.695	3.176
75+	1.001	1.539	2.540
Jumlah/Total	99.295	97.173	196.468

Sumber: Data BPS *online* (<https://tapinkab.bps.go.id/id/statistics-table/3>)

2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tapin

Berdasarkan Data BPS *online* (<https://tapinkab.bps.go.id/id/statistics-table/3>), laju pertumbuhan penduduk rata-rata adalah 1,68. Kepadatan penduduk per km² adalah 91 yang berarti tergolong kepadatan sedang.

Tabel 2. 3 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tapin Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	Persentase Penduduk Terhadap Total Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km persegi (km ²)
Binuang	32.500	1,75	16,44	246
Hatungun	9.900	1,75	5,01	104
Tapin Selatan	21.300	1,57	10,75	139
Salam Babaris	12.600	1,27	6,36	173
Tapin Tengah	21.500	2,21	10,88	70
Bungur	14.400	2,37	7,28	158
Piani	6.300	2,43	3,2	32
Lokpaikat	12.400	2,54	6,26	132
Tapin Utara	26.100	0,93	13,17	806
Bakarangan	11.000	1,90	5,55	175
Candi Laras Selatan	12.600	1,01	6,37	51
Candi Laras Utara	17.300	1,30	8,73	25
Tapin	197.900	1,68	100	91

Data BPS online (<https://tapinkab.bps.go.id/id/statistics-table/3>)

Dari tabel 2.3 di atas dapat diketahui kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Binuang dengan jumlah penduduk 32.500 jiwa sementara kecamatan dengan penduduk terendah adalah Kecamatan Piani dengan jumlah penduduk 6.300 jiwa. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Lokpaikat dengan nilai 2,54% dan terendah di Kecamatan Tapin Utara dengan nilai 0,93%.

3. Proyeksi Penduduk 5 (lima) tahun Mendatang

Berdasarkan data 5 (lima) tahun ke belakang, maka akan dapat diproyeksikan penduduk Kabupaten 5 tahun ke depan. Jumlah penduduk ini akan menjadi pertimbangan dalam analisis kerawanan bencana di Kabupaten Tapin. Berikut ini adalah hasil proyeksi penduduk berdasarkan analisis proyeksi eksponensial bunga-berbunga.

Tabel 2. 4 Proyeksi Penduduk Kabupaten Tapin 5 (lima) tahun ke depan

Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin					Proyeksi Penduduk 2027
2018	2019	2020	2021	2022	2029
189.081	189.475	191.372	191.801	197.900	215.092

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Jadi pada tahun 2029, ketika dokumen Rencana Penanggulangan Bencana berakhir, Jumlah penduduk di Kabupaten Tapin diperkirakan akan mencapai 215.092 jiwa.

4. Ketenagakerjaan

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Tapin Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin pada Tahun 2022 sebesar 1,241 pekerja dengan penurunan sebesar 28,51 persen dibanding tahun 2021, Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada dinas Sosial dan Tenaga Kerja berpendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 73,89 persen (917 pekerja), Sementara itu menurut kecamatan, jumlah pencari kerja terbanyak berada di Kecamatan Tapin Utara sebanyak 180 orang.

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan jenis Kelamin di Kabupaten Tapin, 2022

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin (jiwa)		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Angkatan Kerja	62.927	40.389	103.316
	Bekerja	59.759	39.268	99.027
	Pengangguran Terbuka	3.168	1.121	4.289
2	Bukan Angkatan kerja	10.678	32.940	43.618
	Sekolah	3.923	3.931	7.854
	Mengurus Rumah Tangga	2.890	27.588	30.478
	Lainnya	3.865	1.421	5.286
Jumlah		73.605	73.329	146.934
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		85,49	55,08	70,31
Tingkat Pengangguran		5,03	2,78	4,15

Sumber: Kabupaten Tapin dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak yang bekerja dibandingkan dengan penduduk perempuan, dengan jumlah penduduk laki-laki yang bekerja sebanyak 73.605 jiwa dan penduduk perempuan 73.329 jiwa, selisih penduduk laki-laki dan perempuan yang bekerja adalah 276 jiwa. Sementara untuk selisih penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka adalah sebanyak 94.738 jiwa.

2.1.3. Kondisi Geografis

Aspek geografis merupakan posisi atau letak geografis daerah yang relevan sebagai faktor risiko bencana daerah. Kondisi geografis dan administrasi Kabupaten Tapin jika dihubungkan dengan bencana yang berpotensi terjadi maka akan berdampak pada faktor pemicu luas paparan bencana. Luas paparan bencana tersebut akan berbeda tiap kecamatannya. Semakin luas wilayah suatu daerah maka semakin luas daerah terdampak bencana di Kabupaten Tapin. Berikut adalah uraian kondisi geografis di Kabupaten Tapin:

Kabupaten Tapin terletak di Provinsi Kalimantan Selatan dan memiliki luas wilayah sekitar **2.174,95 km²**, dengan batas-batas administratif meliputi Kabupaten Hulu Sungai Selatan di utara, Kabupaten Banjar di timur dan selatan, serta Kabupaten Barito Kuala di barat. Secara geografis, Kabupaten Tapin berada pada koordinat antara 2°32'43" hingga 3°00'43" Lintang Selatan dan 114°46'13" hingga 115°30'33" Bujur Timur, sehingga beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi.

Kabupaten Tapin memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh pola hujan monsun dengan rata-rata curah hujan tinggi, terutama pada bulan Oktober hingga Juni. Suhu rata-rata di kabupaten ini berkisar antara 25°C hingga 27°C, dengan tingkat kelembapan yang cenderung tinggi sepanjang tahun. Curah hujan yang tinggi ini mendukung sektor pertanian, terutama dalam produksi padi sawah yang membutuhkan pasokan air cukup sepanjang tahun.

Dengan potensi geografis yang kaya dan strategis, Kabupaten Tapin memiliki peluang besar untuk menjadi pusat agribisnis dan perikanan di Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah juga tengah berupaya meningkatkan sektor pariwisata berbasis alam, seperti pengembangan destinasi ekowisata di sekitar sungai dan lahan pertanian sebagai bentuk diversifikasi ekonomi.

2.1.4. Kondisi Ekosistem dan Topografis

Aspek ekosistem dan topografi merupakan kondisi bentang alam dan keanekaragaman hayati yang menjadi faktor risiko bencana di daerah. Berikut ini diberikan uraian tentang kondisi ekosistem dan topografis Kabupaten Tapin:

1. Kondisi Ekosistem

Kabupaten Tapin, yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki ekosistem yang kaya dan beragam, mencakup hutan dataran rendah, sungai, rawa, dan lahan pertanian. Wilayah ini berperan penting dalam mendukung keanekaragaman hayati serta menjaga keseimbangan ekosistem regional. Hutan dataran rendah yang masih tersisa di Tapin merupakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna yang endemik, sekaligus menjadi salah satu area penting bagi konservasi ekologi di Kalimantan Selatan. Jenis vegetasi yang umum ditemukan adalah pohon meranti, ulin, dan keruing, yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan, mengurangi erosi, serta menjadi habitat bagi fauna lokal.

Ekosistem sungai di Tapin juga sangat penting, terutama karena wilayah ini dialiri oleh Sungai Tapin dan anak-anak sungainya, seperti Sungai Muning, Sungai Tatakan, Sungai Halat, dan Sungai Gadung. Sungai-sungai ini tidak hanya mendukung sektor pertanian dengan menyediakan irigasi yang dibutuhkan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kehidupan akuatik dan keseimbangan hidrologis wilayah. Beragam spesies ikan air tawar ditemukan di sungai-sungai Tapin, yang tidak hanya menjadi sumber pangan bagi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi ekonomi melalui perikanan. Namun, aliran sungai di Tapin kerap terancam oleh sedimentasi yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan di wilayah hulu. Sedimentasi ini dapat mengurangi kualitas air serta merusak habitat ikan dan biota sungai lainnya.

Di sisi lain, ekosistem rawa juga memberikan kontribusi penting bagi Kabupaten Tapin. Rawa-rawa ini berfungsi sebagai area resapan air, yang membantu mencegah banjir pada musim hujan sekaligus menjaga kestabilan air tanah pada musim kemarau. Beberapa rawa di Tapin bahkan telah dimanfaatkan untuk budidaya perikanan serta perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit dan karet. Namun, perubahan lahan yang masif untuk perkebunan juga membawa dampak negatif, seperti berkurangnya area rawa alami dan rusaknya habitat satwa liar. Hal ini dapat memengaruhi populasi

satwa rawa seperti burung air, reptil, dan amfibi yang bergantung pada ekosistem tersebut.

Wilayah pertanian di Kabupaten Tapin juga menjadi bagian integral dari ekosistem daerah ini. Lahan pertanian yang luas dan subur mendukung produksi padi, yang menjadi komoditas pangan utama bagi masyarakat lokal. Penggunaan metode pertanian berkelanjutan menjadi penting dalam menjaga kelestarian lahan dan mencegah degradasi tanah. Namun, intensifikasi pertanian yang tidak tepat, seperti penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan, dapat menurunkan kualitas tanah dan air, serta mengancam ekosistem di sekitarnya.

Pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan beberapa upaya untuk menjaga ekosistemnya, termasuk rehabilitasi hutan dan program konservasi sungai. Pengelolaan hutan berkelanjutan dan upaya penanaman kembali area yang terdampak deforestasi diharapkan mampu memulihkan beberapa bagian dari ekosistem yang rusak. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas pertambangan juga ditingkatkan untuk mengurangi dampaknya terhadap kualitas air sungai dan keseimbangan ekosistem.

Secara keseluruhan, ekosistem di Kabupaten Tapin menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dari kegiatan pertambangan dan konversi lahan untuk perkebunan. Langkah konservasi dan pendekatan ekologis berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem di wilayah ini tetap terjaga, sehingga dapat mendukung kesejahteraan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan hidup jangka panjang.

Kabupaten Tapin memiliki ekosistem yang kaya namun rentan terhadap berbagai bencana alam yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan mengancam kesejahteraan masyarakat. Sebagai wilayah dengan ekosistem hutan dataran rendah, sungai, rawa, dan lahan pertanian, Tapin menghadapi kerentanan terhadap bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta degradasi lingkungan akibat sedimentasi dan konversi lahan untuk aktivitas perkebunan dan pertambangan.

Banjir menjadi salah satu ancaman terbesar bagi ekosistem di Tapin, terutama pada musim hujan ketika curah hujan meningkat. Rawa-rawa yang biasanya berfungsi sebagai area resapan air telah banyak dikonversi menjadi lahan perkebunan dan pertanian, sehingga kapasitas alamiah untuk menahan limpasan air berkurang. Selain itu,

sedimentasi yang berasal dari aktivitas pertambangan di hulu sungai memperburuk kondisi ini. Sungai-sungai di Tapin, seperti Sungai Tapin dan anak-anak sungainya, kerap meluap karena endapan lumpur yang mempersempit aliran, sehingga mengakibatkan banjir yang meluas ke lahan pertanian dan pemukiman di sekitar aliran sungai. Dampak dari banjir ini bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga hilangnya habitat bagi flora dan fauna lokal, yang menggantungkan hidup pada ekosistem sungai dan rawa.

Selain banjir, kebakaran hutan dan lahan juga menjadi ancaman serius, terutama di musim kemarau. Hutan dataran rendah di Tapin, yang sebagian besar terdiri dari vegetasi kering seperti pohon ulin dan meranti, sangat rentan terbakar saat kondisi kering memuncak. Aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan dengan metode pembakaran untuk perluasan perkebunan, sering kali memicu kebakaran yang tidak terkendali. Kebakaran ini tidak hanya merusak ekosistem hutan yang menjadi habitat satwa liar, tetapi juga meningkatkan emisi karbon dioksida yang berkontribusi pada perubahan iklim. Selain itu, kebakaran hutan berdampak langsung terhadap kualitas udara yang menurun drastis, menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Dampak dari konversi lahan yang masif juga membawa kerentanan lain berupa erosi dan degradasi tanah. Perubahan fungsi lahan, terutama untuk perkebunan kelapa sawit dan karet, menghilangkan tutupan vegetasi alami yang sebelumnya menahan tanah dari erosi. Akibatnya, daerah yang dulunya stabil kini menjadi rentan terhadap longsor, terutama di area dengan kemiringan yang lebih tinggi. Tanah yang terdegradasi juga mengalami penurunan produktivitas, sehingga mempengaruhi hasil pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tapin telah mengambil beberapa langkah untuk mengurangi kerentanan bencana ini, seperti melakukan rehabilitasi hutan dan program konservasi sungai untuk mengurangi risiko banjir dan kebakaran. Penanaman kembali pohon di area yang telah terdeforestasi dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan juga menjadi prioritas untuk menjaga kualitas lingkungan. Selain itu, masyarakat lokal mulai dilibatkan dalam program pengelolaan lahan berkelanjutan, seperti penggunaan metode pertanian yang ramah lingkungan dan pelatihan pencegahan kebakaran hutan.

Dengan kondisi ekosistem yang kaya namun rentan, diperlukan strategi mitigasi dan adaptasi yang holistik untuk melindungi Kabupaten Tapin dari ancaman bencana yang semakin meningkat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian ekosistem dan memastikan bahwa sumber daya alam di wilayah ini tetap terjaga demi keberlanjutan generasi mendatang.

2. Kondisi Topografis

Topografi wilayah Tapin sebagian besar terdiri dari dataran rendah, sekitar 67,34% dari keseluruhan wilayah berada pada ketinggian 0–7 meter di atas permukaan laut, sementara hanya sekitar 1,21% wilayahnya yang berada pada ketinggian lebih dari 500 meter. Tanah di wilayah ini cenderung datar, dengan sekitar 82,93% memiliki kemiringan antara 0–2%, yang mendukung pengembangan berbagai sektor seperti pertanian dan perkebunan. Sungai Tapin menjadi salah satu aliran air utama yang mengalir di wilayah ini, bersama dengan anak sungainya seperti Sungai Muning, Sungai Tatakan, Sungai Halat, dan Sungai Gadung. Sungai-sungai ini tidak hanya penting sebagai sistem irigasi, tetapi juga berperan dalam sektor perikanan tradisional yang menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat.

Ketinggian daratan di Kabupaten Tapin sangat bervariasi yang didominasi dengan dataran rendah, dan sebagian kecil berupa dataran tinggi. Kelerengan di Kabupaten Tapin cukup bervariasi yaitu 0-3%, 3-5%, dan 8-15%. Tingkat kelerengan paling banyak di Kabupaten Tapin yaitu 0-3% yang termasuk klasifikasi datar, 3-5% yang termasuk klasifikasi datar, sementara untuk 8-15% termasuk klasifikasi landai, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelerengan di Kabupaten Tapin termasuk kedalam klasifikasi datar. Persebaran ketinggian dan kelerengan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel dan peta berikut ini.

Tabel 2. 6 Ketinggian Kabupaten Tapin

Kecamatan	Luas Ketinggian (Ha)						Total
	0-100	100-250	250-500	500-750	750-1000	>1000	
Bakarangan	7.137						7.137
Binuang	14.850	295					15.145

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

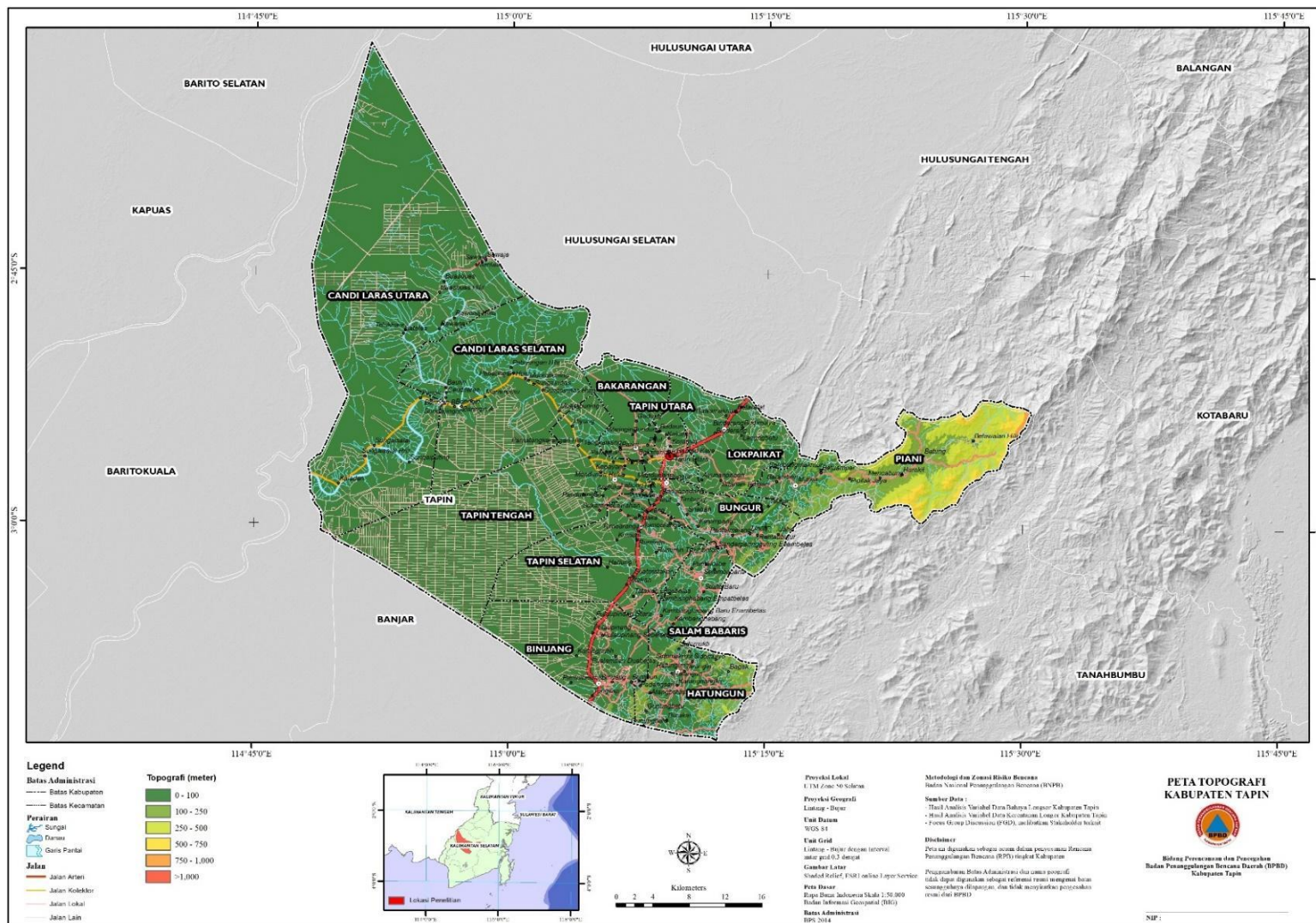
Kecamatan	Luas Ketinggian (Ha)						Total
	0-100	100-250	250-500	500-750	750-1000	>1000	
Bungur	7.694	1.244	8				8.945
Candi Laras Selatan	27.761						27.761
Candi Laras Utara	62.499						62.499
Hatungun	7.288	3.169	146				10.603
Lokpaikat	10.456	364					10.820
Piani	2.820	6.727	7.080	2.290	232	9	19.158
Salam Babaris	5.729	266					5.995
Tapin Selatan	17.185						17.185
Tapin Tengah	30.697						30.697
Tapin Utara	3.262						3.262
Total	197.37						
	9	12.064	7.233	2.290	232	9	219.206

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

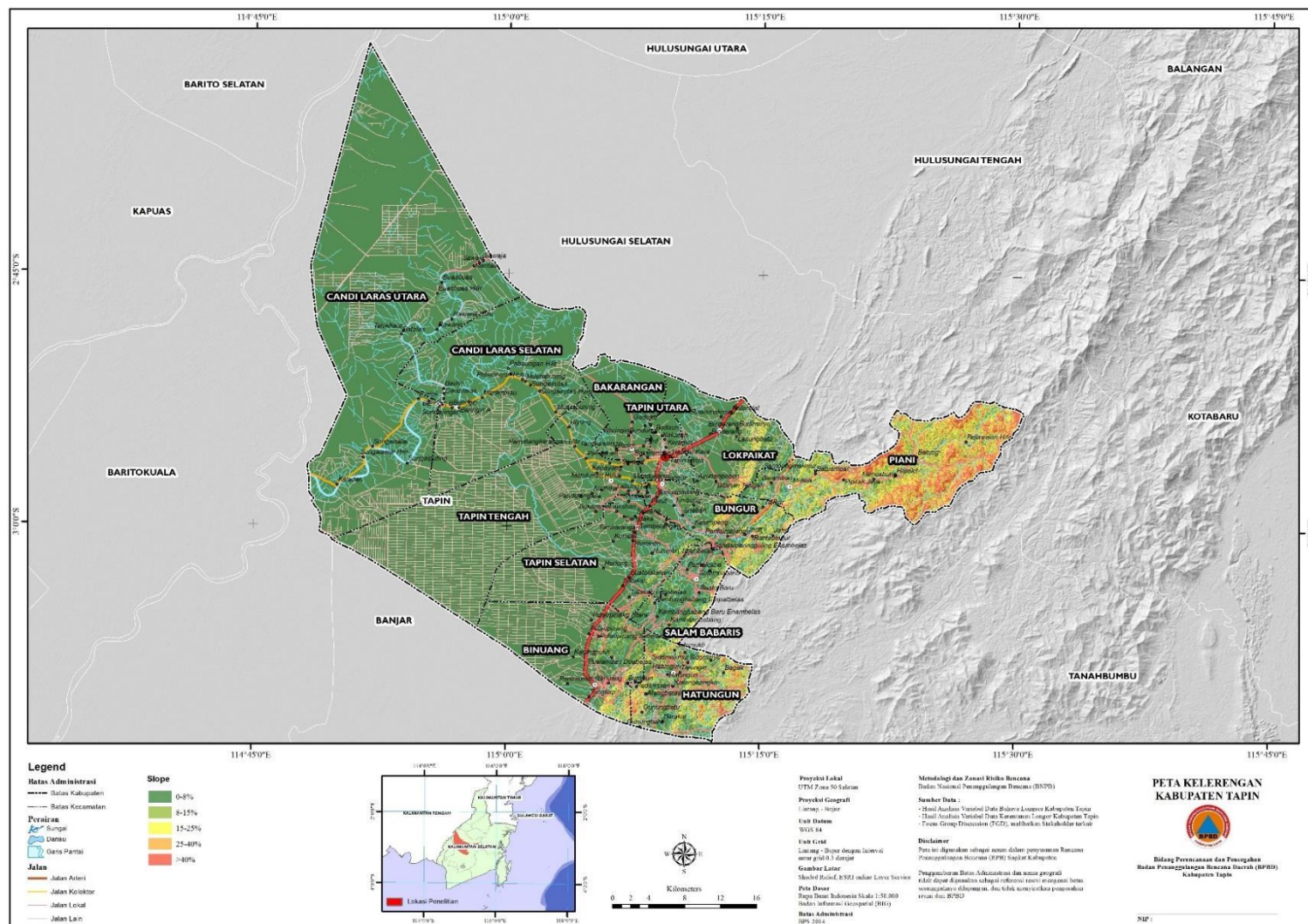
Tabel 2. 7 Kelerengn Kabupaten Tapin

Kecamatan	Luas Lereng (Ha)					Total
	0-8%	15-25%	25-40%	8-15%	>40%	
Bakarangan	7.089	1		47		7.137
Binuang	13.087	546	179	1.310	22	15.145
Bungur	5.551	1.032	519	1.715	128	8.945
Candi Laras Selatan	27.700	2		59		27.761
Candi Laras Utara	62.290	18		192		62.499
Hatungun	3.949	2.060	1.077	3.208	309	10.603
Lokpaikat	8.702	650	143	1.298	27	10.820
Piani	2.712	4.847	5.422	3.487	2.689	19.158
Salam Babaris	4.475	398	103	1.017	1	5.995
Tapin Selatan	16.255	105	2	823		17.185
Tapin Tengah	30.625	2		71		30.697
Tapin Utara	3.198	1		63		3.262
Total	185.633	9.662	7.444	13.290	3.176	219.206

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023



Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Tapin



Gambar 2. 3 Peta Kelerengan Kabupaten Tapin

2.1.5. Kondisi Hidrologis

Aspek hidrologi merupakan kondisi air yang menjadi faktor risiko bencana di daerah. Aspek menguraikan tentang jumlah daerah aliran sungai maupun subdaerah aliran sungai, termasuk uraian tentang sungai utama, serta kondisi kualitas air permukaan dan cadangan air tanah.

Aspek hidrologi di Kabupaten Tapin berperan penting dalam menentukan risiko bencana, terutama terkait banjir dan kekeringan. Kondisi air permukaan dan cadangan air tanah di wilayah ini secara langsung dipengaruhi oleh jumlah dan kondisi daerah aliran sungai (DAS) serta sub-daerah aliran sungai (sub-DAS) yang mencakup area ini. Sungai utama yang mengalir di Kabupaten Tapin adalah Sungai Tapin, yang merupakan sumber air utama bagi keperluan irigasi, domestik, dan perikanan. Selain Sungai Tapin, terdapat beberapa anak sungai utama seperti Sungai Muning, Sungai Tatakan, Sungai Halat, dan Sungai Gadung yang memperkaya sistem hidrologi daerah ini.

Kabupaten Tapin memiliki beberapa DAS dan sub-DAS yang tersebar di seluruh wilayahnya, yang masing-masing berkontribusi pada pola aliran dan distribusi air di berbagai kecamatan. DAS utama adalah DAS Tapin, yang mencakup wilayah aliran Sungai Tapin dan anak-anak sungainya. Struktur DAS ini penting karena menyuplai air bagi aktivitas pertanian, perkebunan, dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Namun, aktivitas penambangan di hulu sungai serta konversi lahan untuk perkebunan telah meningkatkan sedimentasi, yang mengakibatkan aliran sungai menjadi dangkal dan risiko banjir meningkat saat musim hujan.

Kondisi kualitas air permukaan di Kabupaten Tapin cenderung bervariasi, terutama di titik-titik yang dekat dengan kawasan industri dan perkebunan. Pencemaran akibat limbah industri dan penggunaan pestisida serta pupuk kimia dalam kegiatan pertanian menyebabkan degradasi kualitas air, yang berdampak pada kesehatan ekosistem sungai. Pengamatan menunjukkan bahwa beberapa titik air di sungai-sungai Tapin memiliki kandungan zat terlarut yang melebihi batas aman, mengancam kehidupan biota air serta kesehatan masyarakat yang bergantung pada air sungai. Upaya pengelolaan kualitas air menjadi penting untuk memastikan bahwa air permukaan tetap layak untuk kebutuhan berbagai sektor.

Selain air permukaan, cadangan air tanah di Kabupaten Tapin juga menjadi perhatian dalam aspek hidrologi, terutama terkait dengan ketersediaan air selama musim kemarau. Tapin

memiliki beberapa lapisan akuifer yang menjadi sumber utama air tanah bagi masyarakat yang tidak memiliki akses langsung ke air permukaan. Namun, over-eksploitasi air tanah untuk keperluan domestik dan pertanian telah menurunkan kapasitas cadangan air tanah, yang menyebabkan penurunan muka air tanah secara bertahap. Penurunan ini berisiko menimbulkan kekeringan yang akan berdampak serius pada pertanian serta ketersediaan air bersih bagi penduduk lokal.

Kondisi hidrologi di Kabupaten Tapin menunjukkan bahwa sungai-sungai dan air tanahnya memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat, namun juga mengandung risiko bencana jika tidak dikelola dengan baik. Untuk mengurangi risiko banjir dan kekeringan, pemerintah daerah bersama masyarakat dan industri perlu mengambil langkah-langkah pengelolaan terpadu, seperti rehabilitasi daerah hulu DAS, pengendalian pencemaran, serta pengaturan penggunaan air tanah yang lebih bijak. Dengan pendekatan ini, diharapkan aspek hidrologi di Kabupaten Tapin dapat lebih terjaga dan risiko bencana yang disebabkan oleh faktor air dapat diminimalisasi.

Aspek hidrologi di Kabupaten Tapin secara langsung terkait dengan kerentanan terhadap bencana, terutama bencana banjir, kekeringan, dan penurunan kualitas air yang dapat berdampak luas pada masyarakat dan ekosistem. Jumlah daerah aliran sungai (DAS) dan sub-daerah aliran sungai (sub-DAS) di wilayah ini membentuk pola hidrologi yang kompleks, namun perubahan tata guna lahan dan degradasi lingkungan telah meningkatkan risiko terhadap berbagai bencana hidrometeorologis.

Sungai Tapin sebagai sungai utama, bersama anak-anak sungainya seperti Sungai Muning, Sungai Tatakan, Sungai Halat, dan Sungai Gadung, mengalir sebagian besar wilayah kabupaten ini. DAS Tapin dan sub-DAS-nya memiliki kapasitas penting dalam menyerap dan mendistribusikan air hujan. Namun, aktivitas di hulu seperti penambangan, pembalakan liar, dan konversi hutan menjadi lahan perkebunan telah menyebabkan sedimentasi berat di sungai-sungai ini. Sedimentasi ini tidak hanya mempersempit aliran sungai, tetapi juga meningkatkan risiko banjir saat curah hujan tinggi, karena sungai-sungai tidak mampu menampung limpasan air secara optimal.

Kerentanan terhadap bencana banjir semakin diperparah oleh degradasi rawa-rawa dan lahan basah alami yang seharusnya berfungsi sebagai area resapan air. Banyak rawa dan

lahan basah telah dikonversi menjadi lahan pertanian dan perkebunan, sehingga kemampuan alamiah untuk mengendalikan limpasan air berkurang signifikan. Setiap musim hujan, wilayah sekitar aliran sungai, terutama di DAS Tapin, menjadi daerah berisiko tinggi mengalami banjir yang merusak lahan pertanian, pemukiman, dan infrastruktur.

Selain banjir, kondisi hidrologi di Kabupaten Tapin juga menyebabkan kerentanan terhadap kekeringan, terutama di musim kemarau. Cadangan air tanah yang menjadi sumber air alternatif bagi masyarakat seringkali mengalami penurunan kualitas dan kuantitas karena over-eksploitasi dan penurunan muka air tanah secara bertahap. Pengambilan air tanah secara berlebihan, khususnya untuk keperluan pertanian dan domestik, menyebabkan akuifer di beberapa wilayah berkurang kapasitasnya, sehingga banyak daerah mengalami kekurangan air selama musim kering. Dampaknya bukan hanya pada keterbatasan akses air bersih, tetapi juga pada penurunan hasil pertanian yang bergantung pada irigasi.

Kualitas air permukaan yang terdegradasi juga meningkatkan kerentanan terhadap risiko kesehatan. Pencemaran dari limbah industri dan penggunaan pestisida serta pupuk kimia dalam kegiatan pertanian telah menurunkan kualitas air sungai dan rawa. Beberapa titik air di wilayah DAS Tapin menunjukkan tingginya kandungan zat terlarut yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan biota air. Hal ini berpotensi menimbulkan krisis kesehatan lingkungan, khususnya bagi masyarakat yang menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari.

Kerentanan ini menuntut langkah mitigasi yang serius, termasuk upaya rehabilitasi daerah hulu DAS, perbaikan fungsi lahan basah sebagai area resapan air, dan pengelolaan kualitas air permukaan serta penggunaan air tanah secara berkelanjutan. Penerapan kebijakan yang berbasis konservasi dan kolaborasi dengan masyarakat untuk menjaga DAS, mengendalikan pencemaran, dan membatasi eksploitasi air tanah dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko bencana di Kabupaten Tapin. Dengan pengelolaan hidrologi yang baik, risiko bencana akibat faktor air ini dapat ditekan, sehingga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

2.1.6. Kondisi Iklim

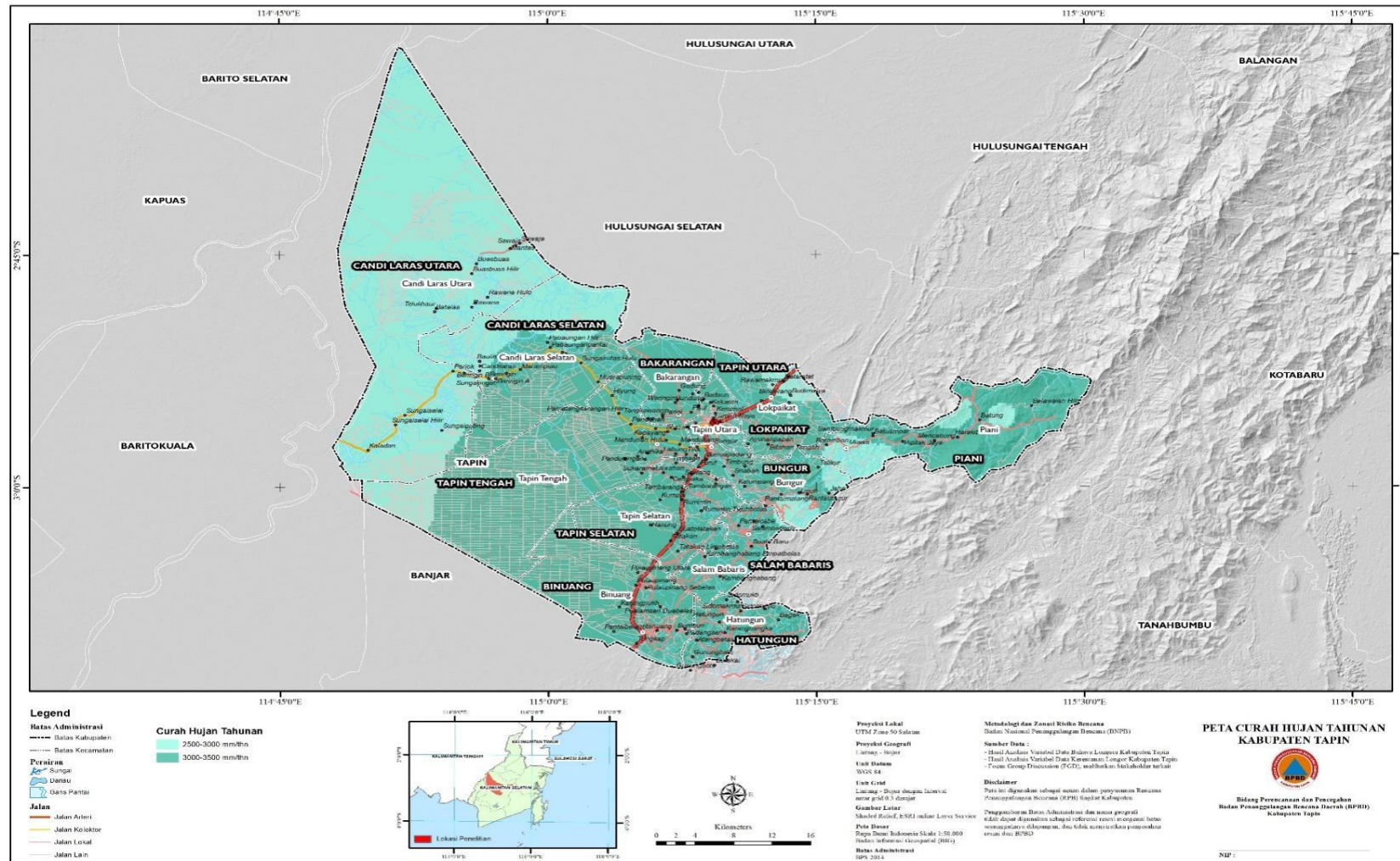
Aspek iklim merupakan kondisi cuaca dan siklus iklim yang menjadi faktor risiko bencana di daerah. Aspek ini dapat diuraikan dengan mengklasifikasikan iklim daerah menurut

Schmidt-Ferguson, termasuk juga rerata curah hujan per tahun, suhu udara, dan waktu kecenderungan musim penghujan dan musim kemarau. Berikut adalah keterangannya:

1. Curah Hujan

Curah hujan dipengaruhi oleh iklim, topografi suatu daerah, kecuraman lereng, arah angin dan perjalanan angin. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam waktu panjang yang terjadi di atmosfer yang terdapat pada suatu daerah yang luas serta pada waktu yang relatif lama. Curah hujan dapat diklasifikasi menjadi 3 kategori, yaitu rendah (0 – 100 mm), menengah (100 – 300 mm), tinggi (300 – 500 mm), dan sangat tinggi (>500 mm). Curah hujan di Kabupaten Tapin berkisar antara 1000 mm/tahun sampai dengan 4000 mm/tahun. Dengan demikian, curah hujan di Kabupaten Tapin termasuk kategori sangat tinggi. Persebaran curah hujan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada Peta Curah Hujan.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029



Gambar 2. 4 Peta Curah Hujan Kabupaten Tapin

2.1.7.Kondisi Geologis

Aspek geologis merupakan kondisi dan karakteristik permukaan bumi yang menjadi faktor risiko di daerah. Aspek ini dapat menjelaskan tentang bentuk struktur tanah/batu, keberadaan sesar aktif, dan keberadaan gunung berapi di daerah. Berikut uraiannya:

1. Jenis Tanah

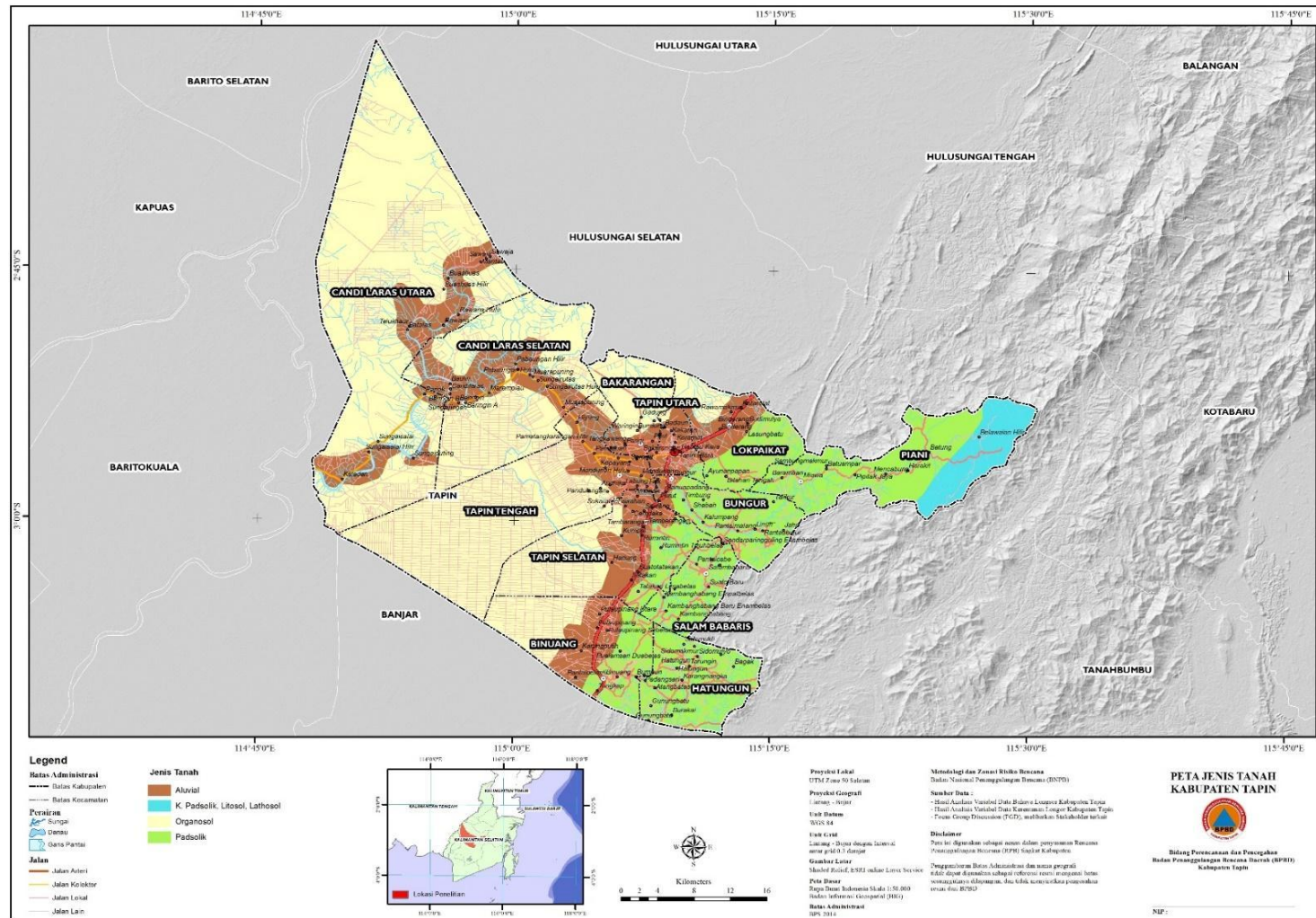
Jenis tanah di Kabupaten Tapin yang telah diidentifikasi yaitu jenis tanah gambut yang tersebar hampir di seluruh kecamatan, sedangkan jenis tanah paling sedikit di Kabupaten Tapin yaitu kompleks PMK laterit latosol lathos yang hanya ditemukan di Kecamatan Piani. Persebaran jenis tanah di Kabupaten Tapin secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dan peta berikut ini.

Tabel 2. 8 Luasan Jenis Tanah Kabupaten Tapin

Kecamatan	Luas Jenis Tanah (Ha)				Total
	Aluvial	K. PMK Laterit, Litosol, Lathosol	Gambut	Podsolik	
Bakaranan	1.469,2		5.668,3		7.137,5
Binuang	4.686,5		5.311,7	5.146,6	15.144,8
Bungur	721,4			8.223,3	8.944,7
Candi Laras Selatan	7.373,0		20.387,5		27.760,5
Candi Laras Utara	9.939,4		52.559,8		62.499,2
Hatungun				10.602,5	10.602,5
Lokpaikat	3.454,0		2.016,0	5.350,1	10.820,1
Piani		6.493,9		12.664,1	19.158,0
Salam Babaris				5.994,6	5.994,6
Tapin Selatan	5.382,2		8.032,3	3.770,0	17.184,5
Tapin Tengah	5.221,5		25.476,0		30.697,5
Tapin Utara	2.801,5		182,9	277,9	3.262,3
Total	41.049	6.494	119.634	52.029	219.206

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029



Gambar 2. 5 Jenis Tanah Kabupaten Tapin

2. Geologi

Tipe batuan di Kabupaten Tapin didominasi oleh silika, kuarsa, granit, granodiorit, andesit seluas 150.892 Ha. Tipe batuan lainnya adalah Batu lempung, batu berpasir dan batulanau; batu gamping, abu-abu muda kecoklatan; batupasir kuarsa abu-abu; batupasir kuarsa, batu lempung; granit berwarna abu-abu muda; lava andesite-basalt; dan Andesit abu-abu tua.

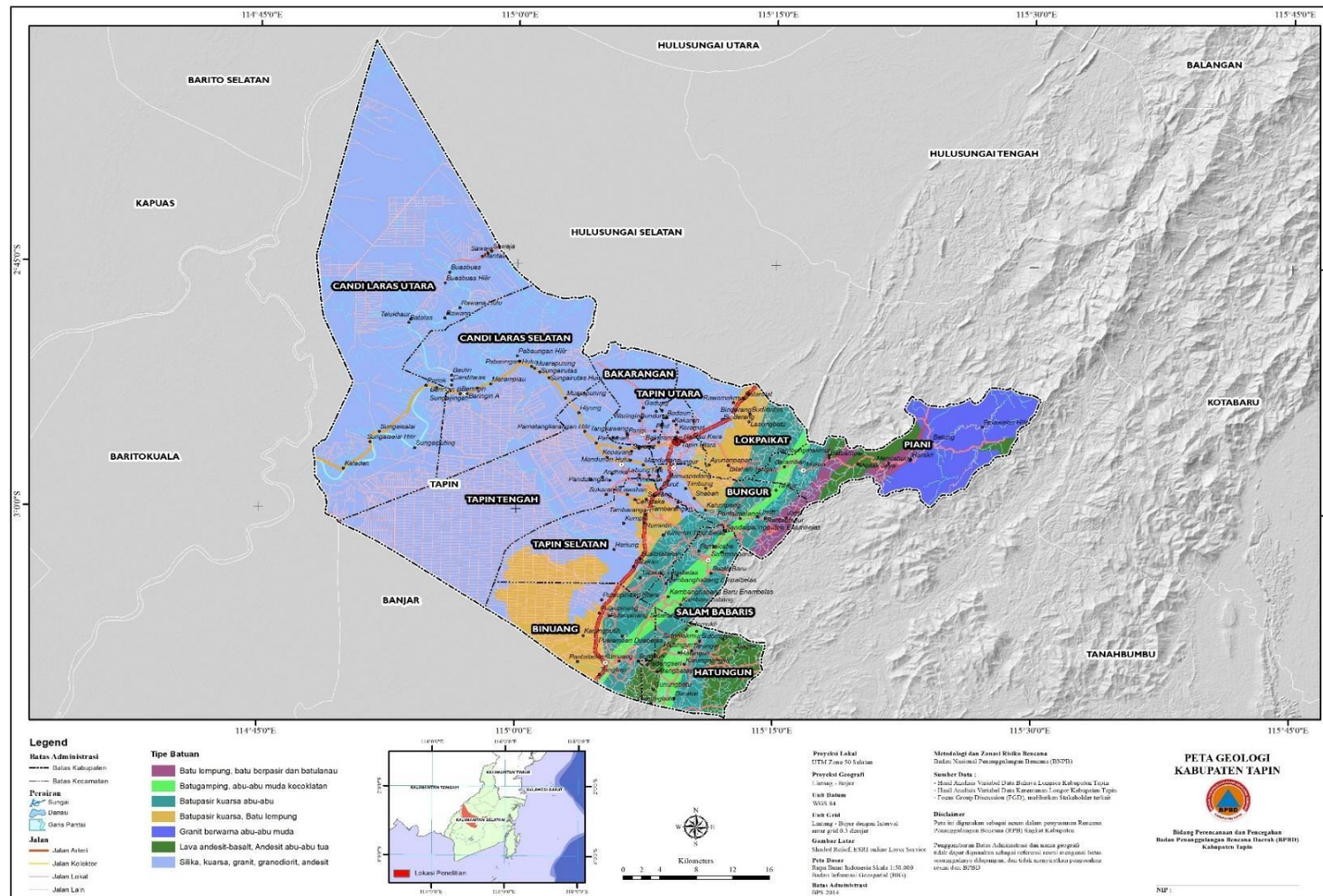
Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Tabel 2. 9 Tipe Batuan Kabupaten Tapin

Kecamatan	Luas Jenis Batuan (Ha)							Total
	Batu lempung, batu berpasir dan batulanau	Batu gamping, abu-abu muda kecoklatan	Batupasir kuarsa abu-abu	Batupasir kuarsa, Batu lempung	Granit berwarna abu-abu muda	Lava andesit-basalt, Andesit abu-abu tua	Silika, kuarsa, granit, granodiorit, andesit	
Bakarangan							7.358	7.358
Binuang		1.263	3.772	7.992		604	1.976	15.606
Bungur	1.667	788	3.610	1.767			1.395	9.227
Candi Laras Selatan							28.590	28.590
Candi Laras Utara							64.316	64.316
Hatungun		2.216	3.253			5.465		10.934
Lokpaikat		257	2.958	3.883			4.063	11.162
Piani	2.444	650	2.011		11.557	3.127		19.788
Salam Babaris		2.232	3.950					6.182
Tapin Selatan			3.107	6.025			8.580	17.711
Tapin Tengah							31.615	31.615
Tapin Utara				364			3.000	3.364
Total	4.111	7.407	22.661	20.031	11.557	9.196	150.892	225.854

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029



Gambar 2. 6 Peta Geologi Kabupaten Tapin

2.1.8.Kondisi Ekonomi dan Kemiskinan

Aspek ekonomi merupakan kondisi perekonomian yang menjadi faktor risiko bencana di daerah. Aspek ini juga menjelaskan tentang aktivitas ekonomi utama dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Aspek ekonomi dapat menggambarkan tingkat kemiskinan daerah. Berikut adalah uraian mengenai kondisi ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten Tapin:

1. Ekonomi

Ekonomi merupakan indikator penting dalam menentukan pembangunan, menganalisis serta mengevaluasi perkembangan di suatu kawasan atau daerah. Salah satu indikator penting dalam mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dengan analisis PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) daerah. PDRB memberikan gambaran perkembangan ekonomi yang terjadi di suatu daerah, apakah daerah tersebut mempengaruhi sistem dan struktur perekonomian daerah di sekitarnya, atau bahkan daerah tersebut dipengaruhi, baik secara sistem maupun struktur perekonomian oleh daerah di sekitarnya.

Selama lima tahun terakhir, PDRB Kabupaten Tapin fluktuatif karena dampak dari Pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Tapin mengalami penurunan, namun meningkat kembali pada tahun 2021. Hingga tahun berikutnya, PDRB Kabupaten Tapin masih meningkat menjadi 6.898.883,24 juta rupiah. Secara lengkap, kondisi PDRB Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Tabel 2. 10 PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022

No	Kategori PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,202,482	1,266,917	1,211,918	1,192,945	1,188,681	1,231,472.8
2	Pertambangan dan Penggalian	2,166,543	2,231,500	2,185,994	2,313,115	2,494,486	2,641,401.6
3	Industri Pengolahan	380,579	396,907	379,894	396,492	407,156	412,223.7
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,965	5,171	5,397	5,627	6,044	6,612.6
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,551	18,950	18,888	19,545	20,333	21,661.7
6	Konstruksi	320,882	336,046	333,777	341,787	357,362	374,382.2
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	546,357	581,234	579,879	587,239	631,559	670,523.8
8	Transportasi dan Pergudangan	189,444	198,709	195,526	204,681	218,235	230,835.8
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	134,215	138,142	136,938	144,641	154,025	164,201.4
10	Informasi dan Komunikasi	228,955	239,311	257,077	275,903	290,562	308,068.7
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	63,307	67,140	71,070	70,121	69,000	74,228.2
12	Real Estate	84,919	88,045	90,660	93,465	98,798	103,144.5
13	Jasa Perusahaan	6,072	6,365	6,197	6,540	6,945	7,380.1
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	395,662	414,685	418,646	432,849	442,521	454,093.3
15	Jasa Pendidikan	293,918	305,623	304,474	318,459	333,173	343,367.8
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,736	107,535	109,802	119,831	124,199	131,927.7
17	Jasa lainnya	51,860	52,710	52,352	53,032	55,803	59,705.8
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,192,446.99	6,454,990.15	6,358,489.90	6,576,273.85	6,898,883.24	7,235,231.92

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan suatu daerah (Arsyad, 2004). Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan dengan dimensi tunggal yang diukur berupa peningkatan hasil produksi dan pendapatan. Dalam hal ini adanya kenaikan dalam pendapatan berupa besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk perencanaan kebijakan pembangunan daerah, penetapan arah dari pembangunan daerah, untuk mengevaluasi hasil dari pembangunan daerah, dan sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi sektoral untuk mengetahui sektor mana saja yang menjadi penyebab perubahan secara signifikan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah. PDRB yang semakin laju pertumbuhannya menunjukkan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah sehingga mempercepat pembangunan daerahnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin tertinggi ada pada tahun 2018 dengan nilai laju pertumbuhan sebanyak 5,01 % kemudian tertinggi kedua pada tahun 2022 dengan nilai laju pertumbuhan sebanyak 4,91 % sedangkan untuk nilai laju pertumbuhan terendah ada pada tahun 2020 dengan nilai laju pertumbuhan sebanyak -1,49 %.

Tabel 2. 11 Laju Pertumbuhan Kabupaten Tapin

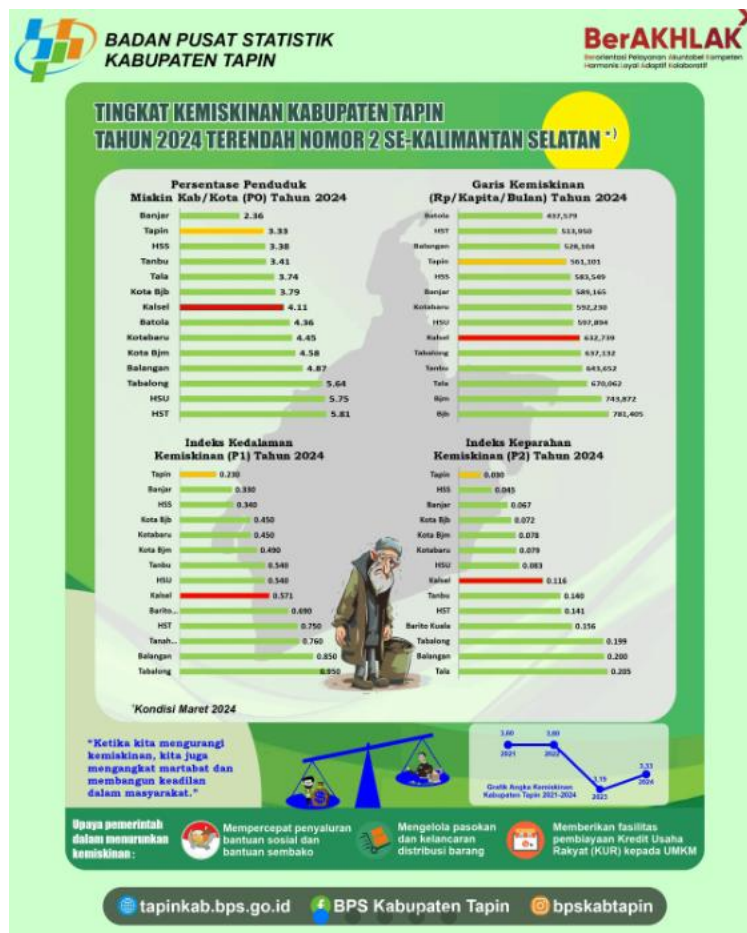
No	Kategori PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0.43	5.36	-4.34	-1.57	-0.36	3.60
2	Pertambangan dan Penggalian	6.82	3.00	-2.04	5.82	7.84	5.89
3	Industri Pengolahan	3.92	4.29	-4.29	4.37	2.69	1.24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.41	4.14	4.38	4.27	7.4	9.41
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.77	2.15	-0.33	3.48	4.03	6.53
6	Konstruksi	5.75	4.73	-0.68	2.4	4.56	4.76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.84	6.38	-0.23	1.27	7.55	6.17
8	Transportasi dan Pergudangan	7.31	4.89	-1.6	4.68	6.62	5.77
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.85	2.93	-0.87	5.62	6.49	6.61
10	Informasi dan Komunikasi	6.99	4.52	7.42	7.32	5.31	6.03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.29	6.05	5.85	-1.34	-1.6	7.58
12	Real Estate	5.17	3.68	2.97	3.09	5.71	4.40
13	Jasa Perusahaan	3.84	4.81	-2.64	5.54	6.19	6.26
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.78	4.81	0.96	3.39	2.23	2.62

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No	Kategori PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
15	Jasa Pendidikan	6.96	3.98	-0.38	4.59	4.62	3.06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.66	3.66	2.11	9.13	3.65	6.22
17	Jasa lainnya	7.25	1.64	-0.68	1.3	5.22	6.99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5.01	4.24	-1.49	3.43	4.91	5.48

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

2. Kemiskinan



Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan

merupakan masalah global, Kemiskinan menurut BPS adalah Ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapin dalam Periode 2021-2022 cenderung meningkat, Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebanyak 6,925 jiwa meningkat menjadi 6,982 jiwa pada tahun 2022, Namun persentase penduduk miskin tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yakni 3,60%.

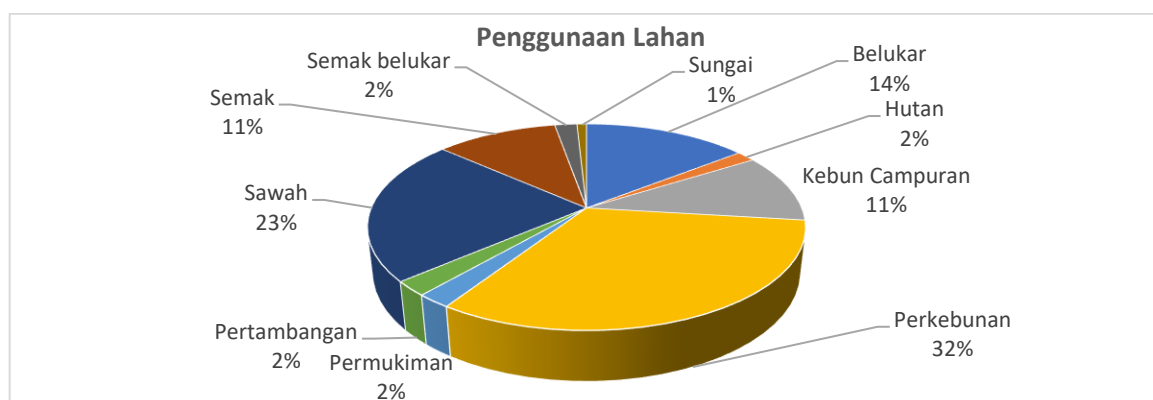
Tabel 2. 12 Nilai Variabel Kemiskinan di Kabupaten Tapin

Variabel Kemiskinan	Nilai Variabel		
	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan	446.577	459.160	484.113
Jumlah Penduduk Miskin	5.899	6.925	6.982
Persentase Penduduk Miskin (P0)	3,06	3,6	3,6
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,45	0,28	0,33
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	0,12	0,04	0,07

Berdasarkan tabel diatas garis kemiskinan di Kabupaten Tapin tiap tahun selalu meningkat yang awalnya tahun 2020 dengan angka 446.577 kemudian di tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 dengan angka 459.160 dan di tahun terakhir yaitu tahun 2022 dengan angka 484.113. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapin setiap tahunnya selalu meningkat, peningkatan dari tahun 2020 menuju tahun 2021 sebanyak 1,026 penduduk dan dari tahun 2021 menuju tahun 2022 sebanyak 57 penduduk.

2.1.9. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tapin sangat bervariasi dengan didominasi oleh perkebunan yaitu seluas 70.815 Ha (32,35% dari luas wilayah Kabupaten Tapin) yang terdapat di Kecamatan Candi Laras Utara, Tapin Tengah, Candi Laras Selatan, Binuang, dan Tapin Selatan. Selain itu, di wilayah Kabupaten Tapin juga terdapat sawah yaitu seluas 49.839 Ha (22,77% dari luas wilayah Kabupaten Tapin) dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, dan Tapin Tengah.

**Gambar 2. 7 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Tapin**

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Tabel 2. 13 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Tapin

Kecamatan	Luas Tutupan Lahan (Ha)										Total
	Belukar	Hutan	Kebun Campuran	Perkebunan	Permukiman	Pertambangan	Sawah	Semak	Semak Belukar	Sungai	
Bakarangan			511		191		4.230	1.919	243	35	7.130
Binuang	1.932		4.066	6.350	1.154	814	827				15.142
Bungur	4.247	560	2.373		171	551	900			138	8.939
Candi Laras Selatan				9.143	164		11.848	3.876	2.190	505	27.726
Candi Laras Utara				30.567	225		13.661	5.299	1.757	898	62.407
Hatungun	2.240		7.740		142	438					10.560
Lokpaikat	4.203		1.966		297	2.029	459	1.841			10.795
Piani	10.920	3.105	4.808		22	30				226	19.111
Salam Babaris	4.830		267		642	246					5.986
Tapin Selatan	3.179		1.116	5.694	668	890	5.632		4		17.185
Tapin Tengah			126	19.061	379		10.846	154	77		30.642
Tapin Utara	73		629		712		1.437	370		41	3.262
Total	31.624	3.665	23.602	70.815	4.767	4.997	49.839	23.461	4.272	1.841	218.883

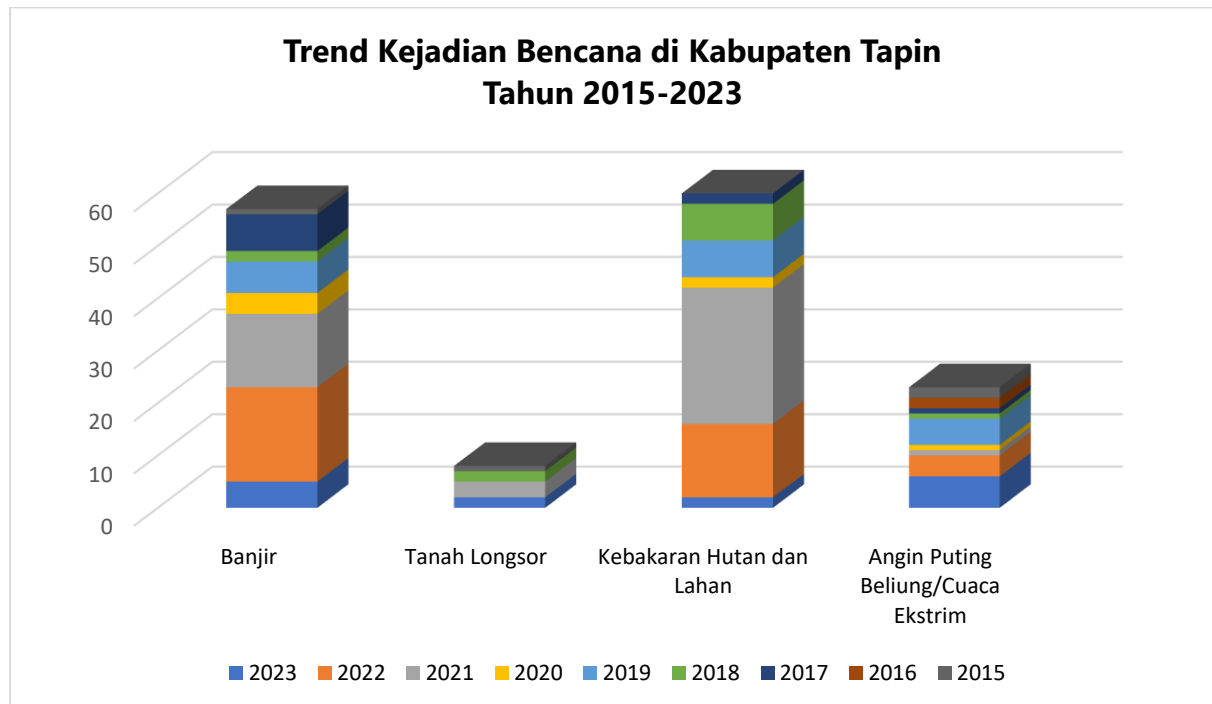
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

2.1.10 Kondisi Keterjadian Bencana

Aspek keterjadian kebencanaan merupakan uraian kejadian bencana di Kabupaten Tapin dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Aspek ini diuraikan tentang daftar jumlah kejadian dan akibat-kerugian bencana, yang terjadi. Berikut adalah data kejadian bencana di Kabupaten Tapin selama periode 2013 hingga 2023:

Tabel 2. 14 Kejadian Bencana di Kabupaten Tapin Periode Tahun 2014 – 2023 (10 tahun terakhir)

Tahun	Bencana				
	Dampak yang terjadi	Banjir	Tanah Longsor	Kebakaran Hutan dan Lahan	Angin Puting Beliung/Cuaca Ekstrim
2023	1. Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan	5	2	2	6
		330	56	-	66
2022	2. Pengungsian warga dan kerugian ekonomi	18	-	14	4
		475	-	-	10
2021	3. Kerusakan fasilitas umum dan rumah warga	14	3	26	1
		868	1	-	5
2020	4. Gangguan aktivitas ekonomi dan pendidikan	4	0	2	1
		2,315	0	0	2
2019	5. Kerusakan lahan pertanian dan pemukiman	6	0	7	5
		3,331	0	0	21
2018	6. Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan	2	2	7	1
		445	8	0	6
2017	7. Pengungsian warga dan kerugian ekonomi	7	0	2	1
		5,613	0	0	0
2016	8. Kerusakan fasilitas umum dan rumah warga	0	0	0	2
		0	0	0	0
2015	9. Gangguan aktivitas ekonomi dan pendidikan	1	1	0	2
		13,88	0	0	8
2014	10. Kerusakan lahan pertanian dan pemukiman	4	0	0	0



Gambar 2. 8 Trend Kejadian Bencana Kabupaten Tapin Tahun 2015-2023

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Selain bencana-bencana di atas, Kabupaten Tapin pernah mengalami beberapa kejadian gempa bumi baru-baru ini. Berikut adalah beberapa peristiwa gempa bumi yang tercatat di wilayah tersebut:

1. **13 Februari 2024:** Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 terjadi dengan pusat gempa di Kabupaten Banjar, namun getarannya dirasakan hingga Kabupaten Tapin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa ini disebabkan oleh aktivitas Patahan Meratus. Meskipun getarannya dirasakan oleh warga, tidak ada laporan kerusakan atau korban jiwa akibat gempa ini.
2. **26 Februari 2024:** Gempa berkekuatan magnitudo 2,9 terjadi dengan pusat gempa di Kabupaten Tapin. BMKG melaporkan bahwa gempa ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Patahan Meratus. Getaran dirasakan di Kecamatan Salam Babaris dan Bungur, namun tidak ada laporan kerusakan yang ditimbulkan.

3. **23 Maret 2024:** Getaran gempa yang berpusat di Laut Jawa dengan kekuatan magnitudo 6,5 dirasakan oleh warga di beberapa kawasan di Kabupaten Tapin, termasuk Kecamatan Tapin Utara, Tapin Tengah, Bakarangan, dan Candi Laras Utara. Meskipun getaran cukup terasa, tidak ada laporan kerusakan atau korban jiwa di wilayah Tapin akibat gempa ini.

Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tapin, meskipun jarang, pernah mengalami getaran gempa bumi yang dirasakan oleh warganya. Namun, hingga saat ini, tidak ada laporan kerusakan signifikan atau korban jiwa akibat gempa-gempa tersebut.

1. Data di atas merupakan hasil kompilasi dari berbagai sumber, termasuk laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2023.
2. Jenis bencana yang dominan di Kabupaten Tapin selama 10 tahun terakhir adalah **banjir**, yang sering terjadi akibat curah hujan tinggi dan kondisi geografis wilayah.
3. Dampak utama yang tercatat meliputi kerusakan lahan pertanian, pemukiman, infrastruktur, serta gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat.
4. Perkiraan kerugian bersifat estimasi dan dapat berbeda berdasarkan sumber data serta metode perhitungan yang digunakan.

Untuk informasi lebih rinci mengenai data kejadian bencana di Kabupaten Tapin, dapat merujuk pada sumber resmi seperti Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikelola oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Tapin.

2.2 RISIKO BENCANA DAERAH

Berikut ini adalah uraian tentang profil risiko dari setiap ancaman bencana yang ada di Kabupaten Tapin.

1. Deskripsi nilai risiko dan luas wilayah terdampak dari setiap ancaman

Nilai Risiko merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh suatu ancaman bencana di suatu wilayah. Nilai risiko biasanya ditentukan berdasarkan tiga komponen utama, yaitu:

- a. Bahaya (Hazard): Potensi terjadinya suatu bencana tertentu, seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran hutan.
- b. Kerentanan (Vulnerability): Tingkat kerentanan atau kelemahan dari wilayah dan populasi yang dapat terpengaruh oleh bencana tersebut, seperti infrastruktur yang tidak memadai atau populasi dengan kapasitas rendah untuk menghadapi bencana.
- c. Kapasitas (Capacity): Kemampuan masyarakat, pemerintah, dan infrastruktur untuk mengantisipasi, merespons, dan pulih dari bencana.

Nilai risiko dihitung menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif untuk memberikan angka atau klasifikasi yang menunjukkan tingkat risiko (misalnya, rendah, sedang, atau tinggi). Semakin tinggi nilai risiko, semakin besar potensi kerugian atau dampak yang bisa ditimbulkan oleh bencana tersebut.

2. Luas Wilayah Terdampak merujuk pada seberapa besar atau luas area yang mungkin akan terkena dampak langsung dari suatu bencana. Luas wilayah terdampak diukur dalam satuan luas (seperti hektar atau kilometer persegi) dan mencakup area yang paling rentan terhadap bencana berdasarkan jenis dan skala ancaman tersebut. Misalnya, dalam kasus banjir, luas wilayah terdampak mencakup area yang diprediksi mengalami genangan air. Untuk gempa bumi, luas wilayah terdampak adalah area yang berada dalam radius getaran atau intensitas tertentu yang dapat merusak bangunan dan infrastruktur.

3. Deskripsi nilai risiko dan keterpaparan bagi penduduk dari setiap ancaman

Keterpaparan bagi penduduk adalah tingkat atau kondisi sekelompok orang atau individu di dalam suatu wilayah terpapar terhadap risiko atau dampak dari ancaman eksternal, seperti bencana alam, perubahan iklim, atau ancaman kesehatan. Dalam konteks risiko bencana, keterpaparan merujuk pada sejauh mana penduduk berada dalam jangkauan bahaya dan seberapa rentan mereka terhadap dampaknya. Misalnya, penduduk yang tinggal di dekat pantai lebih terpapar risiko banjir atau tsunami dibandingkan dengan mereka yang tinggal di wilayah pegunungan. Faktor-faktor yang

mempengaruhi keterpaparan mencakup lokasi geografis, densitas populasi, infrastruktur yang ada, dan pola tata ruang kota. Semakin tinggi tingkat keterpaparan suatu komunitas, semakin besar pula potensi dampak yang akan dirasakan apabila terjadi bencana. Selain itu, keterpaparan juga dapat diperparah oleh faktor-faktor sosial ekonomi, seperti kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya dan informasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang keterpaparan menjadi penting dalam perencanaan mitigasi dan adaptasi untuk mengurangi risiko bagi penduduk yang tinggal di area rawan. Analisis keterpaparan ini membantu para pemangku kebijakan dalam merancang strategi pengurangan risiko bencana yang efektif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi ancaman yang ada.

Pemahaman terhadap nilai risiko dan luas wilayah terdampak dari ancaman bencana penting untuk merencanakan mitigasi yang tepat, alokasi sumber daya, dan langkah-langkah kesiapsiagaan, sehingga dapat mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan. Berikut adalah nilai risiko dan luas wilayah terdampak dari masing-masing bencana di Kabupaten Tapin

2.2.1 Bencana Banjir

1. Bahaya (Hazard)

Berdasarkan Modul Penyusunan Kajian Risiko Bencana Banjir BNPB Tahun 2019, wilayah dengan ketinggian genangan kurang dari sama dengan 75 cm termasuk dalam kategori bahaya rendah; Wilayah dengan ketinggian genangan 75 - 150 cm termasuk dalam kategori bahaya sedang; dan wilayah dengan ketinggian genangan di atas 150 cm termasuk dalam kategori bahaya tinggi (BNPB, 2019). Wilayah yang masuk ke dalam area rawan banjir merupakan wilayah dengan topografi datar dan berada di sekitar sungai. Penentuan kelas bahaya banjir dianalisis berdasarkan nilai ketinggian genangan.

Berdasarkan perhitungan parameter-parameter bahaya banjir, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di Kabupaten Tapin. Berdasarkan

parameter bahaya banjir tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir di Kabupaten Tapin, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 15 Potensi Bahaya Banjir di Kabupaten Tapin

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Bakarangan	909,26	1.489,18	4.305,20	6.703,64	Tinggi
2	Binuang	5.022,90	3.112,20	2.983,68	11.118,78	Tinggi
3	Bungur	1.097,55	933,27	677,19	2.708,01	Tinggi
4	Candi Laras Selatan	9.009,45	8.941,30	6.228,17	24.178,92	Sedang
5	Candi Laras Utara	19.431,63	18.385,29	17.288,01	55.104,93	Tinggi
6	Hatungun	81,27	119,79	238,41	439,47	Tinggi
7	Lokpaikat	931,32	886,77	1.417,95	3.236,04	Tinggi
8	Piani	125,10	177,48	274,95	577,53	Tinggi
9	Salam Babaris	214,65	261,18	333,09	808,92	Tinggi
10	Tapin Selatan	3.151,08	3.306,51	1.795,50	8.253,09	Tinggi
11	Tapin Tengah	7.182,43	13.258,95	12.274,69	32.716,06	Tinggi
12	Tapin Utara	1.209,00	449,30	776,95	2.435,25	Tinggi
KABUPATEN TAPIN		48.365,63	51.321,21	48.593,79	148.280,64	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Total luas bahaya banjir di Kabupaten Tapin secara keseluruhan adalah 148.280,64 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 48.365,63 Ha, kelas sedang seluas 51.321,21 Ha, sedangkan luas yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas 48.593,79 Ha.

Jika dilihat dari sebaran luas bahaya banjir per kecamatan di Kabupaten Tapin, maka disimpulkan bahwa kecamatan yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir pada kelas rendah adalah Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas **19.431,63 Ha**. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya banjir juga pada Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas **18.385,29 Ha**. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas tinggi adalah Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas **17.288,01 Ha**.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Kecamatan yang mayoritas memiliki potensi bahaya banjir kategori tinggi meliputi Kecamatan Bakarangan, Bimuang, Bungur, Candi Laras Utara, Hatungun, Lokpaikat, Piani, Salam Babaris, Tapin Selatan, Tapin Tengah dan Tapin Utara. Untuk kategori sedang meliputi Kecamatan Candi Laras Selatan. Dengan melihat data tersebut, dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar kecamatan di Kabupaten Tapin didominasi oleh potensi bahaya banjir yang tergolong tinggi. Sehingga kelas bahaya banjir tingkat kabupaten tergolong kelas tinggi.

2. Kerentanan (Vulnerability)

Kerentanan untuk bencana banjir di Kabupaten Tapin melingkupi hasil analisa potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian (kerugian fisik, ekonomi, dan kerusakan serta lingkungan). Berdasarkan analisa kajian risiko bencana di bagian kerentanan ini akan dijabarkan potensi jumlah orang dari penduduk terpapar dikawasan banjir serta jumlah orang dari kelompok rentan yaitu kelompok umur rentan, penduduk miskin dan penyandang disabilitas. Sedangkan untuk potensi kerugian dihitung dalam bentuk nilai rupiah dan potensi kerusakan lingkungan dalam bentuk nilai hektar lalu semua komponen kerentanan ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana banjir. Adapun rekapitulasi potensi penduduk terpapar yang berpotensi ditimbulkan bencana banjir di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 16 Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan (Jiwa)				Kelas
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Usia Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Bakarangan	6.890	102	834	254	47	Sedang
2	Binuang	7.855	99	851	290	54	Sedang
3	Bungur	6.232	99	666	230	44	Sedang
4	Candi Laras Selatan	12.006	104	1.235	442	84	Sedang
5	Candi Laras Utara	15.651	140	1.759	581	109	Sedang
6	Hatungun	547	51	65	20	4	Sedang
7	Lokpaikat	1.549	55	475	57	11	Sedang
8	Piani	2.193	104	251	81	16	Sedang
9	Salam Babaris	2.672	90	325	99	19	Sedang
10	Tapin Selatan	6.230	100	671	231	43	Sedang
11	Tapin Tengah	14.113	102	4.203	521	97	Sedang
12	Tapin Utara	15.602	99	1.846	577	108	Sedang

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan (Jiwa)				Kelas
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Usia Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
	KABUPATEN TAPIN	91.541	99	13.181	3.384	634	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari kecamatan terdampak bencana banjir. Penduduk terpapar bencana banjir terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana banjir. Kelas penduduk terpapar bencana di Kabupaten Tapin ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh kecamatan terdampak bencana banjir.

Penduduk terpapar bencana banjir di Kabupaten Tapin diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar, yaitu sejumlah 91.541 jiwa dan berada pada kelas Sedang. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok usia rentan sejumlah 13.181 jiwa, penduduk miskin sejumlah 3.384 jiwa, dan penduduk disabilitas sejumlah 634 jiwa. Jika dilihat dari tingkat kecamatan yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana banjir adalah Kecamatan Candi Laras Utara, yaitu dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 15.651 jiwa dan kecamatan yang memiliki potensi penduduk rentan tertinggi adalah Kecamatan Tapin Tengah mencapai 4.203 jiwa. Untuk potensi penduduk miskin tertinggi di Kecamatan Candi Laras Utara sejumlah 581 jiwa dan disabilitas tertinggi di Kecamatan Candi Laras Utara dengan total 109 jiwa. Sementara itu, potensi kerugian dan kerusakan lingkungan akibat bencana banjir di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 17 Potensi Kerugian Bencana Banjir di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Potensi Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas Lingkungan
		Fisik	Ekonomi	Total Kerugian	Kelas Kerugian		
1	Bakarangan	16.372,56	20.228,39	36.600,94	Tinggi	974	Tinggi
2	Binuang	16.884,65	23.013,19	39.897,84	Tinggi	157	Sedang
3	Bungur	10.005,72	2.753,65	12.759,37	Tinggi	232	Tinggi
4	Candi Laras Selatan	36.525,50	51.258,99	87.784,49	Tinggi	679	Tinggi

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Potensi Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas Lingkungan
		Fisik	Ekonomi	Total Kerugian	Kelas Kerugian		
5	Candi Laras Utara	81.587,92	108.151,31	189.739,23	Tinggi	2.875	Tinggi
6	Hatungun	2.084,94	991,27	3.076,21	Sedang	73	Sedang
7	Lokpaikat	3.571,47	8.405,87	11.977,34	Tinggi	89	Sedang
8	Piani	8.692,83	177,57	8.870,40	Tinggi	141	Tinggi
9	Salam Babaris	8.183,46	139,89	8.323,35	Tinggi	211	Tinggi
10	Tapin Selatan	12.194,65	16.077,47	28.272,13	Tinggi	263	Tinggi
11	Tapin Tengah	44.885,99	98.210,14	143.096,14	Tinggi	485	Tinggi
12	Tapin Utara	23.741,67	4.550,15	28.291,83	Tinggi	67	Sedang
KABUPATEN TAPIN		264.731,37	333.957,89	598.689,27	Tinggi	6.246	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Total potensi kerugian akibat bencana banjir di Kabupaten Tapin merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari seluruh wilayah terdampak bencana banjir. Total kerugian untuk bencana banjir adalah sebesar **598,68 milyar rupiah**. Berdasarkan kajian dihasilkan kelas kerugian bencana banjir di Kabupaten Tapin adalah pada kelas **Tinggi**. Secara terperinci, kerugian fisik adalah sebesar **264,73 milyar rupiah** dan kerugian ekonomi sebesar **333,95 milyar rupiah**. Jika dilihat dari tingkat kecamatan, yang memiliki nilai kerugian fisik tertinggi adalah Kecamatan Candi Laras Utara sebesar 81,58 milyar rupiah, sedangkan kerugian ekonomi tertinggi di Kecamatan Candi Laras Utara sebesar 108,15 milyar rupiah.

Total Potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari seluruh wilayah terdampak bencana banjir. Kelas kerusakan lingkungan bencana di Kabupaten Tapin dilihat berdasarkan kelas maksimum dari kecamatan terdampak bencana banjir. Total kerusakan lingkungan dari potensi bencana banjir adalah seluas **6.246 Ha** tergolong kelas kerusakan lingkungan tinggi, dimana Kecamatan Candi Laras Utara menjadi kecamatan dengan potensi kerusakan lingkungan tertinggi dengan luas **2.875 Ha**.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan dari bencana banjir di Kabupaten Tapin di atas, maka dapat diketahui kelas kerentanan bencana banjir di tiap kecamatan di Kabupaten Tapin. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 18 Kelas Kerentanan Bencana Banjir di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
1	Bakarangan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
2	Binuang	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
3	Bungur	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4	Candi Laras Selatan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
5	Candi Laras Utara	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
6	Hatungun	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
7	Lokpaikat	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
8	Piani	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
9	Salam Babaris	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
10	Tapin Selatan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
11	Tapin Tengah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
12	Tapin Utara	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
KABUPATEN TAPIN		Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara Kabupaten Tapin dikategorikan kelas kerentanan bahaya banjir **tinggi**.

3. Kapasitas (Capacity)

Berdasarkan pengkajian kapasitas Kabupaten Tapin dalam menghadapi bencana banjir, maka diperoleh kelas kapasitas dalam menghadapi bencana banjir. Hasil analisis kapasitas untuk bencana banjir dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2. 19 Kapasitas Per Kecamatan Bencana Banjir di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Indeks Ketahanan Daerah	Kelas Ketahanan Daerah	Indeks Kesiapsiagaan	Kelas Kesiapsiagaan	Indeks Kapasitas	Kelas Kapasitas
1	Bakarangan	0,62	Sedang	0,259	Rendah	0,404	Sedang
2	Binuang	0,62	Sedang	0,315	Rendah	0,437	Sedang
3	Bungur	0,62	Sedang	0,262	Rendah	0,405	Sedang
4	Candi Laras Selatan	0,62	Sedang	0,261	Rendah	0,404	Sedang
5	Candi Laras Utara	0,62	Sedang	0,257	Rendah	0,402	Sedang
6	Hatungun	0,62	Sedang	0,308	Rendah	0,433	Sedang
7	Lokpaikat	0,62	Sedang	0,272	Rendah	0,411	Sedang
8	Piani	0,62	Sedang	0,283	Rendah	0,418	Sedang

Tabel di atas menunjukkan rangkuman nilai indeks dan kelas kapasitas setiap kecamatan terpapar bahaya banjir. Perhitungan data tersebut didasarkan pada hasil gabungan ketahanan daerah nilainya tetap (penilaian ketahanan tingkat kabupaten) dengan kesiapsiagaan masyarakat (berdasarkan analisa input dalam aplikasi Inarisk Personal). Jika dilihat secara umum keseluruhan kecamatan di Kabupaten Tapin memiliki kelas kapasitas sedang. Untuk kelas kapasitas tersebut diperoleh dari nilai rata-rata kapasitas seluruh kecamatan yang terpapar bahaya banjir di Kabupaten Tapin maka disimpulkan berada pada kelas kapasitas **Sedang**.

4. Risiko

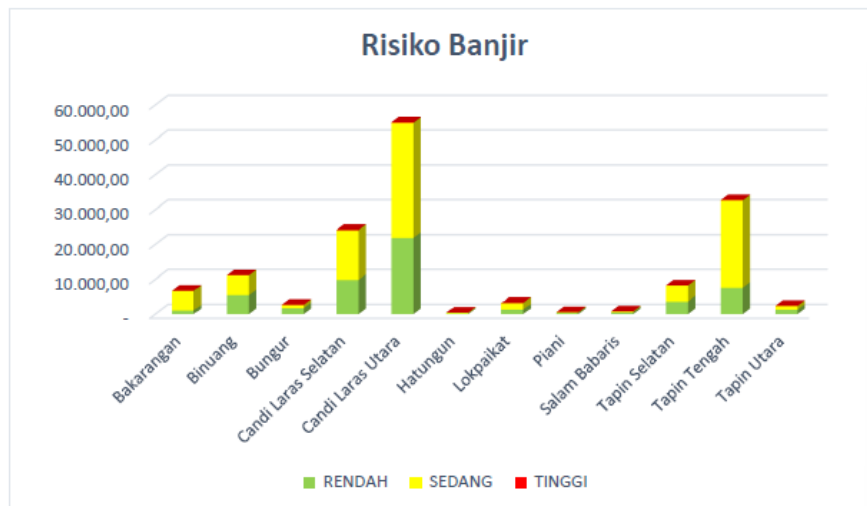
Kajian risiko bencana banjir diperoleh dari hasil Analisa gabungan dari luas dan tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas. Adapun potensi risiko bencana banjir di Kabupaten Tapin ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 20 Potensi Risiko Banjir di Kabupaten Tapin

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Bakarangan	1.046,02	5.632,68	24,94	6.703,64	Sedang
2	Binuang	5.406,57	5.684,35	27,86	11.118,78	Sedang
3	Bungur	1.730,10	959,28	18,63	2.708,01	Sedang
4	Candi Laras Selatan	9.844,68	14.271,23	63,01	24.178,92	Sedang
5	Candi Laras Utara	21.889,41	33.035,58	179,94	55.104,93	Sedang
6	Hatungun	190,71	245,61	3,15	439,47	Sedang
7	Lokpaikat	1.309,91	1.918,75	7,39	3.236,04	Sedang
8	Piani	374,10	192,57	10,87	577,53	Sedang
9	Salam Babaris	517,72	277,24	13,95	808,92	Sedang
10	Tapin Selatan	3.616,30	4.616,55	20,24	8.253,09	Sedang
11	Tapin Tengah	7.567,28	25.061,90	86,88	32.716,06	Sedang
12	Tapin Utara	1.273,07	1.118,63	43,55	2.435,25	Sedang
KABUPATEN TAPIN		54.765,87	93.014,37	500,40	148.280,64	Sedang

Jika dilihat pada tabel di atas maka sebagian besar wilayah di Kabupaten Tapin terdampak banjir dengan tingkat risiko sedang. Total luas risiko banjir di Kabupaten Tapin secara

keseluruhan adalah **148.280,64 Ha** dan berada pada kelas Sedang. Secara rinci, luas risiko banjir terdapat pada pada kelas rendah seluas **54.765,87 Ha**, kelas sedang seluas **93.014,37 Ha** dan kelas tinggi seluas **500,40 Ha**.



Gambar 2. 9 Diagram Potensi Luas Risiko Banjir Pada Tiap Kecamatan

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Berdasarkan grafik di atas maka disimpulkan bahwa sebaran luas risiko banjir per kecamatan di Kabupaten Tapin semuanya sedang. Kecamatan yang memiliki luas tertinggi risiko banjir pada kelas rendah adalah Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas 21.889,41 Ha (rendah). Kecamatan yang memiliki luas risiko banjir kelas sedang adalah Kecamatan Candi Laras Utara seluas 33.035,58 Ha (sedang). Sedangkan Kecamatan Candi Laras Utara juga merupakan kecamatan dengan luas risiko tinggi untuk bencana banjir seluas 179,94 Ha (tinggi).

2.2.2 Bencana Banjir Bandang

1. Bahaya (*Hazard*)

Kajian bahaya banjir bandang merupakan kondisi yang disesuaikan dengan kabupaten/kota karena belum ada pedoman teknis yang dikeluarkan oleh BNPB. Secara umum bahaya banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas

tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsor gelincir pada area hulu sungai.

Hasil pemetaan spasial terkait bencana banjir bandang di Kabupaten Tapin, terlihat jelas landaan bahaya banjir bandang terputus pada bagian pusat kota yaitu bagian Utara Kecamatan Bungur. Hal ini disebabkan karena adanya bloking area yang tidak terlalu luas dari bahaya tanah longsor di bagian utara Desa Kalumpang dan berdasarkan hasil analisis jarak landaan aliran banjir bandang tidak mencapai lokasi yang paling rendah.

Analisa potensi luas bahaya dan kelas bahaya bencana banjir bandang merupakan analisa awal dalam proses pengkajian yang dalam dokumen ini dirangkum pada tiap-tiap kecamatan. Kelas bahaya tersebut terdiri atas kelas rendah, sedang, dan tinggi. Adapun hasil potensi luas bahaya banjir bandang per kecamatan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 21 Potensi Risiko Banjir Bandang di Kabupaten Tapin

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Bungur	749,79	805,14	579,96	2.134,89	Tinggi
2	Piani	1.621,26	760,05	318,78	2.700,09	Rendah
3	Salam Babaris	143,55	71,10	60,03	274,68	Rendah
4	Tapin Tengah	26,19	35,91	4,05	66,15	Sedang
5	Tapin Utara	10,35	1,53	0	11,88	Rendah
KABUPATEN TAPIN		2.551,14	1.673,73	962,82	5.187,69	Tinggi

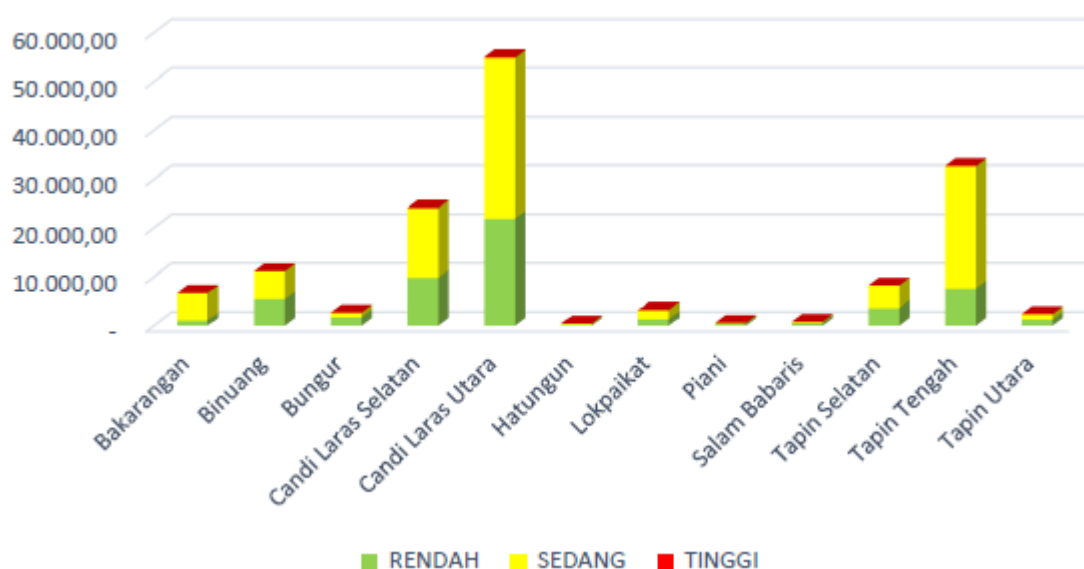
Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Potensi luas bahaya banjir bandang dari tabel di atas merupakan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana banjir bandang berdasarkan kajian bahaya banjir bandang. Total luas bahaya Kabupaten Tapin ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya kecamatan terdampak banjir bandang, sedangkan kelas bahaya banjir bandang Kabupaten Tapin ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kecamatan yang terdampak bahaya banjir bandang.

Potensi luas bahaya banjir bandang di Kabupaten Tapin adalah **5.187,69 Ha** dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya banjir bandang tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas **2.551,14 Ha**, kelas sedang

seluas **1.673,73** Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi seluas **962,82** Ha.

Jika dilihat dari sebaran luas bahaya banjir bandang per kecamatan di Kabupaten Tapin yang terdampak, maka disimpulkan bahwa Kecamatan yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir bandang adalah Kecamatan Piani pada kelas bahaya rendah seluas **1.621,26** Ha, Sedangkan Kecamatan Bungur merupakan kecamatan yang memiliki luas tertinggi untuk kelas sedang seluas **805,14** Ha. Sedangkan Kecamatan Bungur juga merupakan luas tertinggi kelas bahaya tinggi yaitu seluas **579,96** Ha.



Gambar 2. 10 Diagram Potensi Luas Risiko Banjir Pada Tiap Kecamatan

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Kecamatan yang mayoritas memiliki potensi bahaya banjir bandang kategori rendah meliputi Kecamatan Piani, Salam Babaris, dan Tapin Utara. Untuk kategori sedang meliputi Kecamatan Tapin Tengah serta kategori tinggi meliputi Kecamatan Bungur. Dengan melihat data tersebut, dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar kecamatan di Kabupaten Tapin didominasi oleh potensi bahaya banjir bandang yang tergolong rendah, namun ada satu kecamatan potensi bahaya banjir bandang tinggi. Sehingga kelas bahaya banjir bandang tingkat kabupaten tergolong kelas tinggi.

2. Kerentanan (*Vulnerability*)

Pengkajian kerentanan bencana banjir bandang dilakukan berdasarkan standar pengkajian risiko bencana. Penilaian kerentanan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) indeks yaitu indeks penduduk terpapar, indeks kerugian, dan indeks kerusakan lingkungan. Untuk pengkajian potensi jumlah penduduk terpapar bencana banjir bandang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan (Jiwa)				Kelas
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Usia Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Bungur	6.235	90	668	230	44	Sedang
2	Piani	3.822	105	437	141	27	Sedang
3	Salam Babaris	26	108	3	1	0	Sedang
4	Tapin Tengah	288	51	86	11	2	Sedang
5	Tapin Utara	0	0	0	0	0	Rendah
KABUPATEN TAPIN		10.370	84	1.194	383	73	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari kecamatan di Kabupaten Tapin terdampak bencana banjir bandang. Penduduk terpapar bencana banjir bandang terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rawan terhadap bencana banjir bandang. Kelas penduduk terpapar bencana di Kabupaten Tapin ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh kecamatan terdampak bencana banjir bandang.

Penduduk terpapar bencana banjir bandang di Kabupaten Tapin diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar, yaitu sejumlah **10.370 jiwa** dan berada pada kelas Sedang. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah **1.194 jiwa**, penduduk miskin sejumlah **383 jiwa**, dan penduduk disabilitas sejumlah **73 jiwa**.

Jika dilihat dari tingkat kecamatan maka kecamatan yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana banjir bandang adalah Kecamatan Bungur, yaitu dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai **6.235 jiwa** dan **668 jiwa** pada kelompok umur rentan. Untuk potensi penduduk miskin tertinggi dan penduduk disabilitas tertinggi juga ada di Kecamatan Bungur dengan total sebanyak **230 jiwa** dan **44 jiwa**. Sedangkan potensi kerugian bencana banjir bandang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23 Potensi Kerugian Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Potensi Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas Lingkungan
		Fisik	Ekonomi	Total Kerugian	Kelas Kerugian		
1	Bungur	17.065,11	2.402,52	19.467,63	Tinggi	198	Sedang
2	Piani	10.247,76	603,38	10.851,14	Tinggi	180	Tinggi
3	Salam Babaris	60,00	1,98	61,98	Rendah	53	Tinggi
4	Tapin Tengah	300,42	55,30	355,73	Rendah	9	Rendah
5	Tapin Utara	0	4,46	4,46	Rendah	0	Rendah
KABUPATEN TAPIN		27.673,29	3.067,65	30.740,95	Tinggi	440	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Total potensi kerugian bencana banjir bandang merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari kecamatan di Kabupaten Tapin. Kelas kerugian bencana banjir bandang di Kabupaten Tapin dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian kecamatan terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana banjir bandang adalah sebesar **30,74 milyar rupiah**. Berdasarkan kajian dihasilkan kelas kerugian bencana banjir bandang di Kabupaten Tapin adalah pada kelas **Tinggi**. Secara terperinci, kerugian fisik adalah sebesar **27,67 milyar rupiah**, dan kerugian ekonomi sebesar **3,06 milyar**. Jika dilihat dari tingkat kecamatan maka yang memiliki nilai kerugian fisik tertinggi adalah Kecamatan Bungur dengan nilai sebesar **17,06 milyar rupiah** dan kecamatan dengan kerugian ekonomi tertinggi adalah Kecamatan Bungur sebesar **2,4 milyar rupiah**.

Dilihat dari potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan terdampak bencana banjir bandang. Kelas kerusakan lingkungan bencana banjir bandang di Kabupaten Tapin dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian wilayah terdampak bencana banjir bandang. Potensi kerusakan lingkungan bencana banjir bandang di Kabupaten Tapin adalah seluas **440,00 Ha**. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana banjir bandang tertinggi adalah Kecamatan Bungur dengan luas **198 Ha**.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan dari bencana banjir bandang di Kabupaten Tapin di atas, maka dapat diketahui kelas kerentanan bencana banjir bandang di tiap kecamatan di Kabupaten Tapin. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24 Kelas Kerentanan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
1	Bungur	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Piani	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
3	Salam Babaris	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang
4	Tapin Tengah	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang
5	Tapin Utara	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
KABUPATEN TAPIN		Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk bencana banjir bandang di Kabupaten Tapin memiliki kelas kelas penduduk terpapar Sedang, kelas kerugian Tinggi dan kerusakan lingkungan tergolong tinggi. Maka kesimpulan kelas kerentanan bencana banjir bandang di Kabupaten Tapin adalah **Tinggi**.

3. Kapasitas (*Capacity*)

Berdasarkan pengkajian kapasitas Kabupaten Tapin dalam menghadapi bencana banjir bandang, untuk memperoleh kelas kapasitas didapatkan dari analisa gabungan

nilai indeks ketahanan daerah dan indeks kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana banjir bandang. Hasil analisis kapasitas untuk bencana banjir dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.25. Kapasitas Per Kecamatan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Indeks Ketahanan Daerah	Kelas Ketahanan Daerah	Indeks Kesiapsiagaan	Kelas Kesiapsiagaan	Indeks Kapasitas	Kelas Kapasitas
1	Bungur	0,62	Sedang	0,113	Rendah	0,316	Rendah
2	Piani	0,62	Sedang	0,178	Rendah	0,355	Rendah
3	Salam Babaris	0,62	Sedang	0,120	Rendah	0,320	Rendah
4	Tapin Tengah	0,62	Sedang	0,093	Rendah	0,304	Rendah
5	Tapin Utara	0,62	Sedang	0,104	Rendah	0,310	Rendah
KABUPATEN TAPIN		0,62	Sedang	0,137	Rendah	0,330	Rendah

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Tabel di atas menunjukkan rangkuman nilai indeks dan kelas kapasitas setiap kecamatan terpapar bahaya banjir bandang. Perhitungan data tersebut didasarkan pada hasil gabungan ketahanan daerah nilainya tetap (penilaian ketahanan tingkat kabupaten) dengan kesiapsiagaan masyarakat (berdasarkan analisa input dalam aplikasi Inarisk Personal). Jika dilihat secara umum keseluruhan kecamatan di Kabupaten Tapin memiliki kelas kapasitas rendah dan sedang. Untuk kelas kapasitas tersebut diperoleh dari nilai rata-rata kapasitas seluruh kecamatan yang terpapar bahaya banjir bandang di Kabupaten Tapin maka disimpulkan berada pada kelas kapasitas **rendah**.

4. Risiko

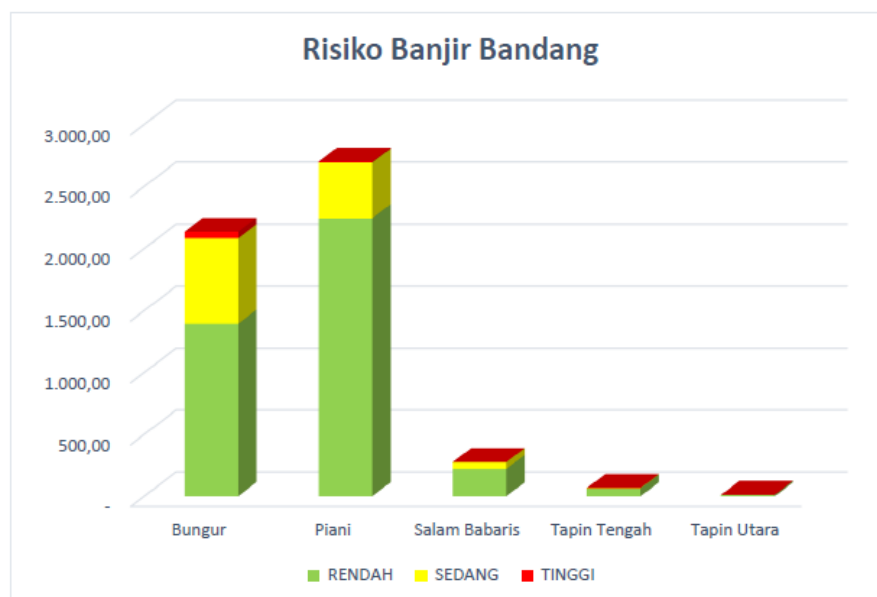
Tingkat risiko bencana banjir bandang diperoleh dari hasil luas dan tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas bencana banjir bandang di Kabupaten Tapin yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.26. Potensi Risiko Banjir Bandang di Kabupaten Tapin

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Bungur	1.393,76	687,67	53,46	2.134,89	Sedang
2	Piani	2.243,14	449,48	7,47	2.700,09	Rendah
3	Salam Babaris	220,57	54,11 0	0	274,68	Rendah
4	Tapin Tengah	61,38	4,77	0	66,15	Rendah
5	Tapin Utara	11,88	0	0	11,88	Rendah
KABUPATEN TAPIN		3.930,74	1.196,02	60,93	5.187,69	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Jika dilihat pada tabel di atas maka sebagian besar wilayah di Kabupaten Tapin terdampak banjir bandang dengan tingkat risiko **sedang**. Total luas risiko banjir bandang di Kabupaten Tapin secara keseluruhan adalah **5.187,69 Ha** dan berada pada kelas Sedang. Secara rinci, luas risiko banjir bandang terdapat pada pada kelas rendah seluas **3.930.74 Ha**, kelas sedang seluas **1.196,02 Ha** dan kelas tinggi seluas **60,93 Ha**.



Gambar 2.11. Diagram Potensi Luas Risiko Banjir Bandang Pada Tiap Kecamatan

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Berdasarkan grafik diatas maka disimpulkan bahwa sebaran luas risiko banjir bandang per kecamatan di Kabupaten Tapin cukup bervariasi. Kecamatan yang memiliki luas tertinggi risiko banjir bandang pada kelas rendah adalah Kecamatan Piani dengan luas 2.243,14 Ha. Sedangkan Kecamatan Bungur merupakan kecamatan dengan luas risiko sedang seluas 687,67 Ha dan Kecamatan Piani yang tergolong kelas risiko tertinggi untuk bencana banjir bandang seluas 2.700,09 Ha.

2.2.3. Bencana Cuaca Ekstrim

1. Bahaya (*Hazard*)

Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrim berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai. Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrim tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Tapin, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.27. Potensi Bahaya Banjir di Kabupaten Tapin

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Bakarangan	0	2.286,25	4.808,80	7.095,05	Tinggi
2	Binuang	0	11.615,86	4.540,92	16.156,78	Tinggi
3	Bungur	28,35	3.603,62	2.028,32	5.660,29	Tinggi
4	Candi Laras Selatan	0	12.982,69	12.786,63	25.769,32	Tinggi
5	Candi Laras Utara	0	29.880,81	32.513,22	62.394,03	Tinggi
6	Hatungun	0	1.345,77	434,52	1.780,29	Tinggi
7	Lokpaikat	0,09	5.301,38	2.757,02	8.058,49	Tinggi
8	Piani	23,85	1.206,99	110,16	1.341,00	Sedang
9	Salam Babaris	0,27	4.840,62	925,09	5.765,97	Sedang

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

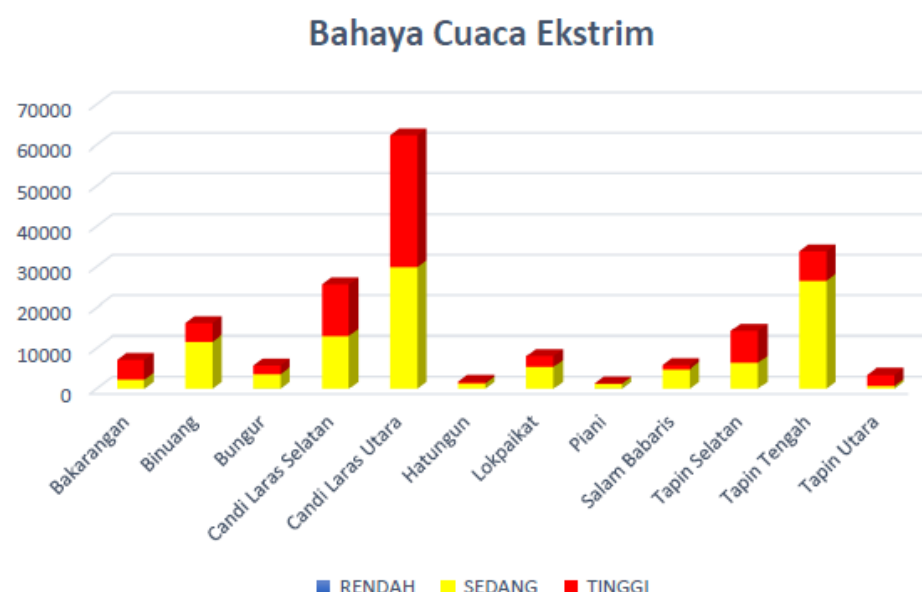
No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
10	Tapin Selatan	0	6.339,83	7.873,91	14.213,74	Tinggi
11	Tapin Tengah	0	26.630,50	7.255,02	33.885,53	Tinggi
12	Tapin Utara	0	675,20	2.764,58	3.439,79	Tinggi
KABUPATEN TAPIN		52,56	106.709,53	78.798,20	185.560,29	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Potensi bahaya cuaca ekstrim pada tabel tersebut di atas memaparkan jumlah luasan kecamatan yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Tapin berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya di Kabupaten Tapin ditentukan berdasarkan total luas bahaya kecamatan. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum kecamatan di Kabupaten Tapin terdampak cuaca ekstrim.

Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Tapin secara keseluruhan adalah seluas **185.560,29 Ha** dan berada pada kelas **Tinggi**. Dari total luas bahaya tersebut, yang terdampak cuaca ekstrim hasil analisisnya hanya berada pada kelas rendah seluas **52,56 Ha**, sedangkan yang berada pada kelas sedang seluas **106.709,53 Ha**, serta daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas **78.798,20 Ha**.

Jika dilihat dari sebaran luas bahaya cuaca ekstrim per kecamatan di Kabupaten Tapin yang terdampak paling luas hanya pada kelas sedang dan tinggi, maka disimpulkan bahwa kecamatan yang memiliki luas bahaya cuaca ekstrim pada kelas Tinggi, luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim untuk kelas sedang adalah Kecamatan Tapin Tengah dengan luas **26.630,50 Ha**. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas tinggi adalah Kecamatan Tapin Tengah dengan luas **33.885,53 Ha**.



Gambar 2.12. Diagram Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim Bandang Pada Tiap Kecamatan

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Kecamatan yang mayoritas memiliki potensi bahaya cuaca ekstrim kategori sedang meliputi Kecamatan Piani dan Salam Babaris. Untuk kategori tinggi meliputi Kecamatan Bakarangan, Binuang, Bungur, Candi Laras Selatan, Candi Laras Utara, Hatungun, Lokpaikat, Tapin Selatan, Tapin Tengah dan Tapin Utara. Dengan melihat data tersebut, dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar kecamatan di Kabupaten Tapin didominasi oleh potensi bahaya cuaca ekstrim yang tergolong tinggi, namun ada satu kecamatan potensi bahaya cuaca ekstrim sedang. Sehingga kelas bahaya cuaca ekstrim tingkat kabupaten tergolong kelas tinggi.

2. Kerentanan (*Vulnerability*)

Kajian kerentanan pada bagian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kerentanan saat terjadi bencana cuaca ekstrim (angin kencang). Kajian kerentanan untuk bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Tapin diperoleh dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik maupun ekonomi. Potensi jumlah penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim dapat dilihat pada tabel berikut.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Tabel 2.28. Potensi Penduduk Terpapar Cuaca Ekstrem di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan (Jiwa)				Kelas
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Usia Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Bakarangan	10.587	102	1.280	391	73	Sedang
2	Binuang	29.480	99	3.196	1.090	206	Sedang
3	Bungur	12.336	99	1.320	456	87	Sedang
4	Candi Laras Selatan	12.211	104	1.256	450	85	Sedang
5	Candi Laras Utara	16.369	140	1.837	608	114	Sedang
6	Hatungun	4.383	84	521	162	31	Sedang
7	Lokpaikat	10.747	98	3.301	398	75	Sedang
8	Piani	2.277	106	261	84	17	Sedang
9	Salam Babaris	12.326	107	1.504	457	87	Sedang
10	Tapin Selatan	20.698	100	2.229	767	144	Sedang
11	Tapin Tengah	20.042	102	5.969	740	139	Sedang
12	Tapin Utara	25.318	99	2.995	936	176	Sedang
KABUPATEN TAPIN		176.775	104	25.668	6.540	1.233	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari kecamatan di Kabupaten Tapin terdampak bencana cuaca ekstrem. Penduduk terpapar bencana cuaca ekstrem terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rawan terhadap bencana cuaca ekstrem. Kelas penduduk terpapar bencana ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari kecamatan terdampak bencana cuaca ekstrem.

Penduduk terpapar bencana cuaca ekstrem di Kabupaten Tapin diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar sejumlah **176.775 jiwa** dan berada pada kelas **Sedang**. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah **25.668 jiwa**, penduduk miskin sejumlah **6.540 jiwa**, dan penduduk disabilitas sejumlah **1.233 jiwa**.

Kecamatan yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana cuaca ekstrem adalah Kecamatan Binuang, yaitu dengan jumlah mencapai **29.480 jiwa**, sedangkan penduduk umur rentan tertinggi bahaya cuaca ekstrem adalah Kecamatan Lokpaikat sejumlah **3.301 jiwa**.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Untuk potensi penduduk miskin tertinggi adalah **1.090 jiwa** yang berada pada Kecamatan Binuang sedangkan penduduk disabilitas tertinggi terdapat di Kecamatan Binuang yakni **206 jiwa**. Sedangkan potensi kerugian bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29. Potensi Kerugian Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Potensi Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas Lingkungan
		Fisik	Ekonomi	Total Kerugian	Kelas Kerugian		
1	Bakarangan	112.747,49	20.384,12	133.131,61	Tinggi	-	-
2	Binuang	339.934,21	41.141,46	381.075,67	Tinggi	-	-
3	Bungur	131.964,68	7.257,52	139.222,21	Tinggi	-	-
4	Candi Laras Selatan	137.081,49	69.377,29	206.458,78	Tinggi	-	-
5	Candi Laras Utara	197.077,95	143.621,99	340.699,94	Tinggi	-	-
6	Hatungun	49.228,21	3.902,31	53.130,52	Tinggi	-	-
7	Lokpaikat	109.659,24	15.969,34	125.628,57	Tinggi	-	-
8	Piani	21.301,17	139,13	21.440,30	Tinggi	-	-
9	Salam Babaris	130.801,46	1.322,98	132.124,44	Tinggi	-	-
10	Tapin Selatan	245.453,18	37.292,67	282.745,85	Tinggi	-	-
11	Tapin Tengah	234.762,26	98.540,31	333.302,58	Tinggi	-	-
12	Tapin Utara	296.074,44	9.955,39	306.029,83	Tinggi	-	-
KABUPATEN TAPIN		2.006.085,79	448.904,51	2.454.990,29	Tinggi	-	-

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Total potensi kerugian bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Tapin merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi dari kecamatan terdampak bencana cuaca ekstrim. Kelas kerugian cuaca ekstrim di Kabupaten Tapin dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana cuaca ekstrim adalah sebesar **2,45 triliun rupiah**. Berdasarkan kajian dihasilkan kelas kerugian bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Tapin adalah pada kelas **Tinggi**. Secara terperinci, kerugian fisik sebesar **2,00 triliun rupiah**, dan kerugian ekonomi sebesar **448,90 milyar rupiah**. Kecamatan yang memiliki nilai kerugian fisik tertinggi adalah Kecamatan Binuang sebesar **339,93 milyar rupiah**,

sedangkan kerugian ekonomi tertinggi di Kecamatan Binuang sebesar **381,07 milyar rupiah**.

Analisis potensi kerentanan lingkungan dalam bentuk hektar lingkungan terdampak tidak dianalisis pada kajian cuaca ekstrim, hal ini dikarenakan cuaca ekstrim terjadi di wilayah dengan keterbukaan lahan yang tinggi, dan dianggap tidak merubah fungsi lingkungan.

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar dan kelas kerugian dari bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Tapin di atas, maka dapat diketahui kelas kerentanan bencana cuaca ekstrim di tiap kecamatan di Kabupaten Tapin. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30. Kelas Kerentanan Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
1	Bakarangan	Sedang	Tinggi	-	Tinggi
2	Binuang	Sedang	Tinggi	-	Tinggi
3	Bungur	Sedang	Tinggi	-	Tinggi
4	Candi Laras Selatan	Sedang	Tinggi	-	Tinggi
5	Candi Laras Utara	Sedang	Tinggi	-	Tinggi
6	Hatungun	Sedang	Tinggi	-	Tinggi
7	Lokpaikat	Sedang	Tinggi	-	Tinggi
8	Piani	Sedang	Tinggi	-	Sedang
9	Salam Babaris	Sedang	Tinggi	-	Tinggi
10	Tapin Selatan	Sedang	Tinggi	-	Tinggi
11	Tapin Tengah	Sedang	Tinggi	-	Tinggi
12	Tapin Utara	Sedang	Tinggi	-	Tinggi
KABUPATEN TAPIN		Sedang	Tinggi	-	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kecamatan di Kabupaten Tapin dikategorikan memiliki kelas penduduk terpapar sedang dan kelas kerugian bencana cuaca ekstrim adalah tinggi. Oleh karenanya, kelas kerentanan bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Tapin juga berada di kelas **tinggi**.

3. Kapasitas (*Capacity*)

Berdasarkan pengkajian kapasitas Kabupaten Tapin dalam menghadapi bencana cuaca ekstrim, maka diperoleh kelas kapasitas dalam menghadapi bencana cuaca ekstrim. Hasil analisis kapasitas untuk bencana cuaca ekstrim dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.31. Kapasitas Per Kecamatan Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Indeks Ketahanan Daerah	Kelas Ketahanan Daerah	Indeks Kesiapsiagaan	Kelas Kesiapsiagaan	Indeks Kapasitas	Kelas Kapasitas
1	Bakarangan	0,62	Sedang	0,259	Rendah	0,404	Sedang
2	Binuang	0,62	Sedang	0,315	Rendah	0,437	Sedang
3	Bungur	0,62	Sedang	0,262	Rendah	0,405	Sedang
4	Candi Laras Selatan	0,62	Sedang	0,261	Rendah	0,404	Sedang
5	Candi Laras Utara	0,62	Sedang	0,257	Rendah	0,402	Sedang
6	Hatungun	0,62	Sedang	0,308	Rendah	0,433	Sedang
7	Lokpaikat	0,62	Sedang	0,272	Rendah	0,411	Sedang
8	Piani	0,62	Sedang	0,282	Rendah	0,417	Sedang
9	Salam Babaris	0,62	Sedang	0,282	Rendah	0,417	Sedang
10	Tapin Selatan	0,62	Sedang	0,260	Rendah	0,404	Sedang
11	Tapin Tengah	0,62	Sedang	0,265	Rendah	0,407	Sedang
12	Tapin Utara	0,62	Sedang	0,260	Rendah	0,404	Sedang
KABUPATEN TAPIN		0,62	Sedang	0,271	Rendah	0,410	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Tabel di atas menunjukkan kapasitas setiap kecamatan terpapar bahaya cuaca ekstrim. Perhitungan data tersebut didasarkan pada hasil gabungan ketahanan daerah dengan kesiapsiagaan masyarakat. Secara penilaian indeks keseluruhan kecamatan di Kabupaten Tapin tergolong kelas kapasitas **Sedang**. Kelas kapasitas tersebut diperoleh dari nilai rata-rata kapasitas seluruh kecamatan yang terpapar bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Tapin.

4. Risiko

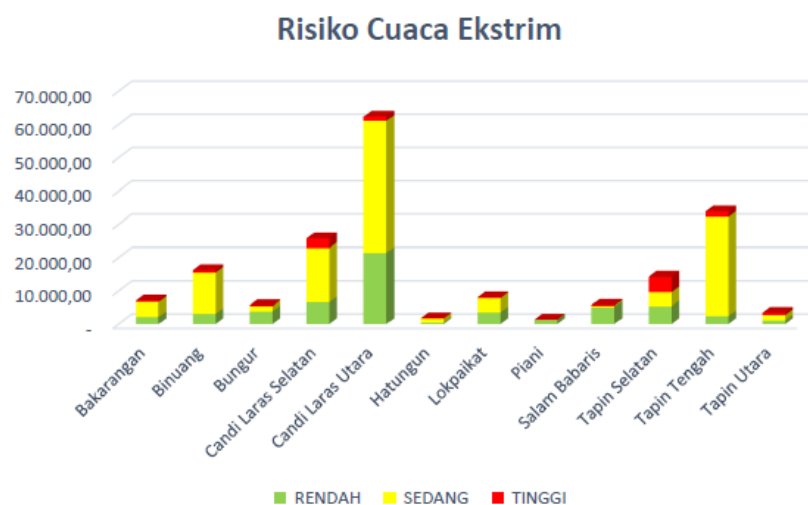
Tingkat risiko bencana cuaca ekstrim diperoleh dari hasil luas dan tingkat bahaya, kerentanan serta kapasitas bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Tapin yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.32. Potensi Risiko Cuaca Ekstrim di Kabupaten Tapin

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Bakarangan	2.131,07	4.528,77	435,21	7.095,05	Tinggi
2	Binuang	3.092,97	12.303,99	759,82	16.156,78	Sedang
3	Bungur	3.815,89	1.598,67	245,73	5.660,29	Sedang
4	Candi Laras Selatan	6.565,42	16.308,30	2.895,60	25.769,32	Sedang
5	Candi Laras Utara	21.395,15	39.701,75	1.297,13	62.394,03	Sedang
6	Hatungun	401,46	1.286,85	91,98	1.780,29	Sedang
7	Lokpaikat	3.507,92	4.292,27	258,31	8.058,49	Sedang
8	Piani	1.271,57	38,02	31,41	1.341,00	Rendah
9	Salam Babaris	5.093,23	410,01	262,74	5.765,97	Rendah
10	Tapin Selatan	5.355,92	4.252,16	4.605,66	14.213,74	Tinggi
11	Tapin Tengah	2.391,67	29.789,56	1.704,30	33.885,53	Tinggi
12	Tapin Utara	1.058,11	1.687,87	693,80	3.439,79	Tinggi
KABUPATEN TAPIN		56.080,37	116.198,23	13.281,69	185.560,29	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Jika dilihat pada tabel di atas maka wilayah di Kabupaten Tapin terdampak cuaca ekstrim dengan tingkat risiko **tinggi**. Total luas risiko cuaca ekstrim di Kabupaten Tapin secara keseluruhan adalah **185.560,29 Ha** dan berada pada kelas Tinggi. Secara rinci, luas risiko cuaca ekstrim terdapat pada pada kelas rendah seluas **56.080,37 Ha**, kelas sedang seluas **116.198,23 Ha** dan kelas tinggi seluas **13.281,69 Ha**.



Gambar 2.13. Diagram Potensi Luas Risiko Cuaca Ekstrim Bandang Pada Tiap Kecamatan

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Berdasarkan grafik di atas maka disimpulkan bahwa sebaran luas risiko cuaca ekstrim per kecamatan di Kabupaten Tapin cukup bervariasi. Kecamatan yang memiliki luas tertinggi risiko cuaca ekstrim pada kelas rendah dan sedang adalah Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas 21.395,15 Ha dan 39.701,75 Ha.

2.2.4. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

1. Bahaya (*Hazard*)

Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan). Penyusunan kajian pemetaan bahaya kebakaran hutan dan lahan mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.6/PPI/PKHL/PPI.4/9/2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim di atas, keluaran hasil

kajian yang berupa potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tapin sebagai berikut.

Tabel 2.33. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tapin

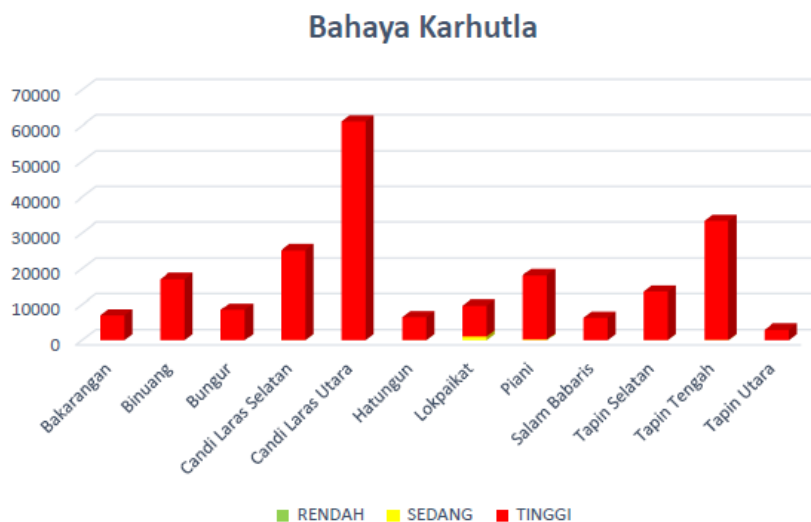
No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Bakaranagan	0	0	6.942,96	6.942,96	Tinggi
2	Binuang	0	0	17.140,50	17.140,50	Tinggi
3	Bungur	0	19,89	8.554,14	8.574,03	Tinggi
4	Candi Laras Selatan	0	37,44	25.154,46	25.191,90	Tinggi
5	Candi Laras Utara	0	61.139,34	61.139,34	61.139,34	Tinggi
6	Hatungun	0	44,64	6.392,34	6.436,98	Tinggi
7	Lokpaikat	0	1.082,16	8.612,55	9.694,71	Tinggi
8	Piani	0	217,80	17.998,20	18.216,00	Tinggi
9	Salam Babaris	0	0	6.268,23	6.268,23	Tinggi
10	Tapin Selatan	0	38,79	13.591,17	13.629,96	Tinggi
11	Tapin Tengah	0	82,80	33.254,73	33.337,53	Tinggi
12	Tapin Utara	0	0	2.972,70	2.972,70	Tinggi
KABUPATEN TAPIN		0	1.523,52	208.021,32	209.544,84	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel di atas merupakan luasan kecamatan di Kabupaten Tapin yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tapin ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kecamatan terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Tapin ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan di Kabupaten Tapin yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan.

209.544,84 Ha dan berada pada kelas **Tinggi**. Luas bahaya kebakaran hutan dan lahan berdasarkan hasil kajian bahaya hanya ada di kelas sedang dan tinggi. Untuk total

kelas bahaya rendah seluas **0 Ha**, dan kelas bahaya sedang seluas **1.523,52 Ha** serta kelas bahaya tinggi seluas **208.021,32 Ha**. Jika dilihat dari sebaran luas bahaya kebakaran hutan dan lahan per kecamatan di Kabupaten Tapin yang terdampak, maka disimpulkan bahwa pada kelas sedang luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah Kecamatan Lokpaikat dengan luas **1.082,16 Ha**, Kecamatan Candi Laras Utara pada kelas tinggi seluas **61.139,34 Ha**.



Gambar 2.14. Diagram Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Tiap Kecamatan

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Kabupaten Tapin memiliki potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan yang signifikan, dengan total luas area terkena bahaya mencapai 209.544,84 Ha. Rata-rata keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin memiliki tingkat kelas bahaya tinggi, sehingga pada level kabupaten tingkat atau kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah tinggi.

2. Kerentanan (*Vulnerability*)

Berdasarkan pengkajian risiko untuk potensi bencana kebakaran hutan dan lahan terkait kerentanan sosial (jumlah penduduk terpapar, penduduk usia rentan, penduduk miskin dan penduduk disabilitas) tidak dihasilkan dalam kajian. Hal ini

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

disebabkan karena potensi terdampak langsung dari kebakaran hutan dan lahan ini berada di luar kawasan permukiman. Oleh sebab itu tidak ditampilkan tabel penduduk terpapar untuk kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tapin, Namun demikian untuk nilai kelas penduduk terpapar dikategorikan pada kelas rendah.

Untuk kajian kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan dari hasil analisa juga menunjukkan nilai kerugian fisik bernilai (-) yang ada hanya potensi kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan dimana rekapitulasi potensi kerugian yang ditimbulkan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34 Potensi Kerugian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Potensi Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas Lingkungan
		Fisik	Ekonomi	Total Kerugian	Kelas Kerugian		
1	Bakarangan	-	26.665,91	59.129,97	Tinggi	2.037	Tinggi
2	Binuang	-	76.805,31	176.701,33	Tinggi	1.826	Tinggi
3	Bungur	-	10.429,98	68.214,55	Tinggi	5.240	Tinggi
4	Candi Laras Selatan	-	104.852,82	141.684,27	Tinggi	6.018	Tinggi
5	Candi Laras Utara	-	224.228,13	273.862,87	Tinggi	18.333	Tinggi
6	Hatungun	-	20.501,59	66.051,75	Tinggi	2.222	Tinggi
7	Lokpaikat	-	24.603,94	95.359,04	Tinggi	2.856	Tinggi
8	Piani	-	33.305,80	58.601,75	Tinggi	10.333	Tinggi
9	Salam Babaris	-	2.540,11	33.050,72	Tinggi	4.677	Tinggi
10	Tapin Selatan	-	46.455,21	110.809,13	Tinggi	3.114	Tinggi
11	Tapin Tengah	-	171.453,81	259.529,46	Tinggi	2.030	Tinggi
12	Tapin Utara	-	10.740,64	82.388,04	Tinggi	861	Tinggi
KABUPATEN TAPIN		-	752.583,25	1.425.382,88	Tinggi	59.547	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Setelah analisis hasil ternyata dari kawasan terdampak nilai total potensi kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tapin sebesar **1,42 triliun rupiah**. Sedangkan untuk potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari kecamatan di Kabupaten Tapin terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan adalah **59.547 Ha** dengan kelas kerusakan lingkungan adalah Tinggi. Kecamatan yang terdampak potensi kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan tertinggi adalah Kecamatan Candi Laras Utara sebesar **224,22 milyar rupiah**. Sedangkan untuk kecamatan dengan luas terdampak potensi kerusakan lingkungan tertinggi adalah Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas **18.333 Ha**.

Berdasarkan informasi kelas kerugian dan kelas kerusakan lingkungan dari bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tapin di atas, maka dapat diketahui kelas kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan di tiap kecamatan di Kabupaten Tapin. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35. Kelas Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
1	Bakarangan	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2	Binuang	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3	Bungur	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4	Candi Laras Selatan	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi
5	Candi Laras Utara	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi
6	Hatungun	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi
7	Lokpaikat	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi
8	Piani	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi
9	Salam Babaris	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi
10	Tapin Selatan	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi
11	Tapin Tengah	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi
12	Tapin Utara	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi
KABUPATEN TAPIN		-	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kelas kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tapin adalah **tinggi**.

3. Kapasitas (*Capacity*)

Berdasarkan pengkajian kapasitas Kabupaten Tapin dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan, maka diperoleh kelas kapasitas dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan. Hasil analisis kapasitas untuk bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.36. Kapasitas Per Kecamatan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Indeks Ketahanan Daerah	Kelas Ketahanan Daerah	Indeks Kesiapsiagaan	Kelas Kesiapsiagaan	Indeks Kapasitas	Kelas Kapasitas
1	Bakaran	0,62	Sedang	0,199	Rendah	0,368	Sedang
2	Binuang	0,62	Sedang	0,175	Rendah	0,353	Sedang
3	Bungur	0,62	Sedang	0,184	Rendah	0,358	Sedang
4	Candi Laras Selatan	0,62	Sedang	0,198	Rendah	0,367	Sedang
5	Candi Laras Utara	0,62	Sedang	0,201	Rendah	0,369	Sedang
6	Hatungun	0,62	Sedang	0,176	Rendah	0,354	Sedang
7	Lokpaikat	0,62	Sedang	0,190	Rendah	0,362	Sedang
8	Piani	0,62	Sedang	0,197	Rendah	0,366	Sedang
9	Salam Babaris	0,62	Sedang	0,186	Rendah	0,360	Sedang
10	Tapin Selatan	0,62	Sedang	0,175	Rendah	0,353	Sedang
11	Tapin Tengah	0,62	Sedang	0,186	Rendah	0,359	Sedang
12	Tapin Utara	0,62	Sedang	0,184	Rendah	0,358	Sedang
KABUPATEN TAPIN		0,62	Sedang	0,188	Rendah	0,361	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Tabel di atas menunjukkan kapasitas setiap kecamatan terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan. Perhitungan data tersebut didasarkan pada hasil gabungan ketahanan daerah dengan kesiapsiagaan masyarakat. Secara penilaian indeks keseluruhan kecamatan di Kabupaten Tapin tergolong kelas kapasitas sedang. Kelas kapasitas tersebut diperoleh dari nilai

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

rata-rata kapasitas seluruh kecamatan yang terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tapin.

4. Risiko

Tingkat risiko bencana kebakaran hutan dan lahan diperoleh dari hasil luas dan tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tapin yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

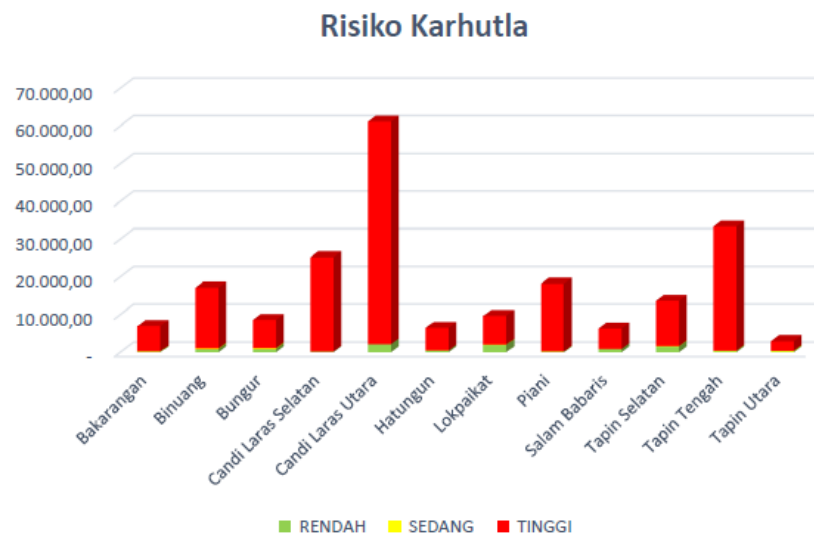
Tabel 2.37. Potensi Risiko Kebakaran dan Hutan di Kabupaten Tapin

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Bakarangan	150,75	108,39	6.683,82	6.942,96	Tinggi
2	Binuang	790,78	244,12	16.105,60	17.140,50	Tinggi
3	Bungur	834,89	265,92	7.473,23	8.574,03	Tinggi
4	Candi Laras Selatan	169,40	0	25022,5008	25.191,90	Tinggi
5	Candi Laras Utara	2.168,55	0	58970,78945	61.139,34	Tinggi
6	Hatungun	424,51	43,90	5.968,57	6.436,98	Tinggi
7	Lokpaikat	1.948,41	115,34	7.630,96	9.694,71	Tinggi
8	Piani	145,50	72,35	17.998,15	18.216,00	Tinggi
9	Salam Babaris	854,47	28,53	5.385,23	6.268,23	Tinggi
10	Tapin Selatan	1.514,54	136,79	11.978,62	13.629,96	Tinggi
11	Tapin Tengah	264,17	135,82	32.937,55	33.337,53	Tinggi
12	Tapin Utara	155,15	230,31	2.587,24	2.972,70	Tinggi
KABUPATEN TAPIN		9.421,12	1.381,47	198.742,26	209.544,84	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Jika dilihat pada tabel di atas maka sebagian besar wilayah di Kabupaten Tapin terdampak kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat risiko rendah, sedang dan tinggi. Total luas risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tapin secara keseluruhan adalah **209.544,84 Ha** dan berada pada kelas **tinggi**. Secara rinci, luas risiko kebakaran hutan dan

lahan terdapat pada pada kelas rendah seluas **9.421,12 Ha**, kelas sedang seluas **1.381,47 Ha** dan kelas tinggi seluas **198.742,26 Ha**.



Gambar 2.15. Diagram Potensi Luas Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Tiap Kecamatan

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Berdasarkan grafik di atas maka disimpulkan bahwa sebaran luas risiko kebakaran hutan dan lahan per kecamatan di Kabupaten Tapin cukup bervariasi. Kecamatan yang memiliki luas tertinggi risiko kebakaran hutan dan lahan pada kelas rendah adalah Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas 2.168,55 Ha. Pada kelas sedang tertinggi di Kecamatan BUNgur dengan luas 265,92 Ha. Sedangkan Kecamatan Candi Laras Utara merupakan kecamatan dengan luas risiko tinggi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan seluas 33.937,55 Ha.

2.2.5. Bencana Kekeringan

1. Bahaya (*Hazard*)

Pengkajian untuk bahaya kekeringan dilihat berdasarkan parameter faktor meteorologi dan kemampuan tanah menyimpan air. Hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya kekeringan dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana

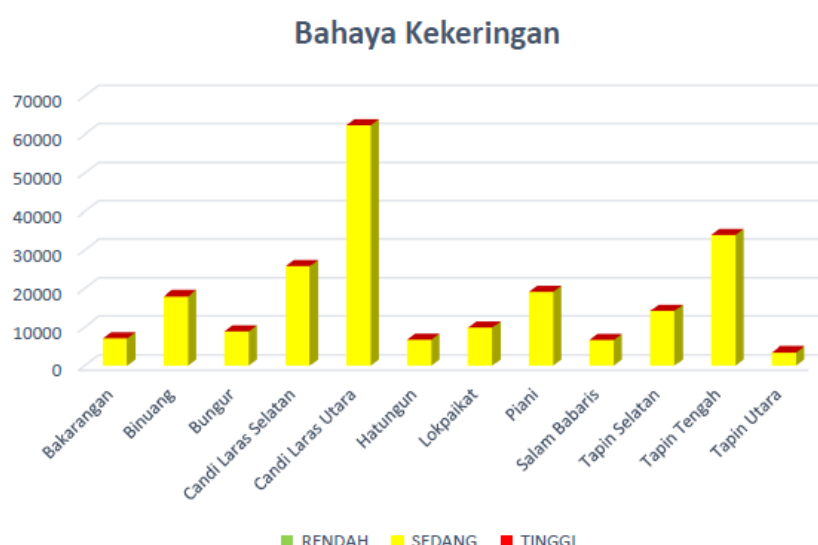
telah diuraikan di atas, diperoleh potensi luas dan kelas bahaya kekeringan di Kabupaten Tapin sebagai berikut.

Tabel 2.38 Potensi Bahaya Kekeringan di Kabupaten Tapin

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Bakarangan	0	7.096,93	0	7.096,93	Sedang
2	Binuang	0	18.017,92	0	18.017,92	Sedang
3	Bungur	0	8.922,01	0	8.922,01	Sedang
4	Candi Laras Selatan	0	25.771,70	0	25.771,70	Sedang
5	Candi Laras Utara	0	62.397,04	0	62.397,04	Sedang
6	Hatungun	0	6.717,20	0	6.717,20	Sedang
7	Lokpaikat	0	9.959,18	0	9.959,18	Sedang
8	Piani	0	19.081,18	0	19.081,18	Sedang
9	Salam Babaris	0	6.642,35	0	6.642,35	Sedang
10	Tapin Selatan	0	14.215,25	0	14.215,25	Sedang
11	Tapin Tengah	0	33.890,63	0	33.890,63	Sedang
12	Tapin Utara	0	3.441,44	0	3.441,44	Sedang
KABUPATEN TAPIN		0	216.152,83	0	216.152,83	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Potensi bahaya kekeringan dari tabel di atas merupakan luasan kecamatan di Kabupaten Tapin yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana kekeringan berdasarkan kajian bahaya. Dari hasil kajian dihasilkan total luas bahaya kekeringan di Kabupaten Tapin secara keseluruhan adalah **216.152,83 Ha** dan berada pada kelas **Sedang**. Luas bahaya kekeringan berdasarkan hasil kajian hanya berada pada kelas bahaya sedang seluas **216.152,83 Ha**. Jika dilihat dari sebaran luas bahaya kekeringan per kecamatan di Kabupaten Tapin yang terdampak, maka disimpulkan bahwa tidak ada kecamatan yang memiliki luas bahaya kekeringan pada kelas rendah dan tinggi.



Gambar 2.16. Diagram Potensi Luas Bahaya Kekeringan Pada Tiap Kecamatan

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Kabupaten Tapin memiliki potensi bahaya kekeringan yang berada pada kelas sedang, dengan total luas area terkena bahaya mencapai 190.006 Ha. Rata-rata keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin memiliki tingkat kelas bahaya sedang, sehingga pada level kabupaten tingkat atau kelas bahaya kekeringan adalah sedang.

2. Kerentanan (*Vulnerability*)

Kajian kerentanan untuk bencana kekeringan di Kabupaten Tapin didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana kekeringan. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar ditimbulkan bencana kekeringan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39 Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kekeringan di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan (Jiwa)				Kelas
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Usia Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Bakarangan	10.587	102	1.280	391	73	Sedang
2	Binuang	31.276	99	3.391	1.157	218	Sedang

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan (Jiwa)				Kelas
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Usia Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
3	Bungur	13.670	99	1.464	505	96	Sedang
4	Candi Laras Selatan	12.211	104	1.256	450	85	Sedang
5	Candi Laras Utara	16.370	140	1.837	608	114	Sedang
6	Hatungun	9.557	101	1.134	353	66	Sedang
7	Lokpaikat	11.785	98	3.620	437	82	Sedang
8	Piani	6.141	105	703	227	43	Sedang
9	Salam Babaris	12.351	107	1.507	458	87	Sedang
10	Tapin Selatan	20.698	100	2.229	767	144	Sedang
11	Tapin Tengah	20.042	102	5.969	740	139	Sedang
12	Tapin Utara	25.318	99	2.995	936	176	Sedang
KABUPATEN TAPIN		190.006	105	27.385	7.029	1.323	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Berdasarkan tabel di atas disimpulkan bahwa kelas penduduk terpapar bencana di Kabupaten Tapin ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh kecamatan terdampak bencana kekeringan. Penduduk terpapar bencana kekeringan di Kabupaten Tapin diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk seluruh wilayah, yaitu sejumlah **190.006 jiwa** dan berada pada kelas **Sedang**. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari penduduk umur rentan sejumlah 27.385 jiwa, penduduk miskin sejumlah 7.029 jiwa, dan penduduk disabilitas sejumlah 1.323 jiwa.

Jika dilihat dari penduduk per kecamatan maka yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana kekeringan adalah Kecamatan Binuang, yaitu dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 31.276 jiwa, untuk kelompok umur rentan sebanyak 3.391 jiwa dan kelompok miskin sebanyak 1.157 jiwa dan kelompok disabilitas sebanyak 218 jiwa. Untuk bencana kekeringan tidak memiliki potensi kerugian fisik karena kekeringan dianggap tidak merusak bangunan rumah maupun infrastruktur fisik suatu wilayah. Oleh karenanya, parameter penentu tingkat kerentanan didasarkan pada potensi kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan. Hasil kajian potensi kerugian dan kerusakan lingkungan akibat bencana kekeringan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40 Potensi Kerugian Bencana Banjir di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Potensi Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas Lingkungan
		Fisik	Ekonomi	Total Kerugian	Kelas Kerugian		
1	Bakarangan	-	13.332,95	33.861,70	Tinggi	1.025	Tinggi
2	Binuang	-	38.607,21	105.801,21	Tinggi	923	Tinggi
3	Bungur	-	5.291,45	34.776,20	Tinggi	2.637	Tinggi
4	Candi Laras Selatan	-	52.470,97	78.443,79	Tinggi	3.021	Tinggi
5	Candi Laras Utara	-	112.114,07	150.000,02	Tinggi	9.167	Tinggi
6	Hatungun	-	10.274,38	33.012,12	Tinggi	1.121	Tinggi
7	Lokpaikat	-	12.358,45	40.875,22	Tinggi	1.446	Tinggi
8	Piani	-	16.652,90	29.869,65	Tinggi	5.282	Tinggi
9	Salam Babaris	-	1.377,54	27.742,84	Tinggi	2.357	Tinggi
10	Tapin Selatan	-	23.410,31	70.716,93	Tinggi	1.563	Tinggi
11	Tapin Tengah	-	85.887,27	130.435,36	Tinggi	1.035	Tinggi
12	Tapin Utara	-	5.379,01	61.062,80	Tinggi	438	Tinggi
KABUPATEN TAPIN		-	377.156,51	796.597,84	Tinggi	30.015	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kerugian fisik tidak dihitung (-) sedangkan total potensi kerugian (kerugian ekonomi) akibat bencana kekeringan di Kabupaten Tapin adalah **377,15 milyar rupiah** dan termasuk ke dalam kelas kerugian **tinggi**. Jika dilihat dari tingkat kecamatan daerah yang tertinggi untuk kerugian ekonomi adalah Kecamatan Candi Laras Utara sebesar **150 milyar rupiah**. Sedangkan potensi kerusakan lingkungan bencana kekeringan di Kabupaten Tapin adalah 30.015 Ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah tinggi Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana kekeringan tertinggi adalah Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas 9.167 Ha.

Berdasarkan hasil kajian kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan dari bencana kekeringan di atas, maka dapat diketahui kelas kerentanan bencana kekeringan di tiap kecamatan di Kabupaten Tapin. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41 Kelas Kerentanan Bencana Kekeringan di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
1	Bakarangan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
2	Binuang	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
3	Bungur	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4	Candi Laras Selatan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
5	Candi Laras Utara	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
6	Hatungun	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
7	Lokpaikat	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
8	Piani	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
9	Salam Babaris	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
10	Tapin Selatan	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
11	Tapin Tengah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
12	Tapin Utara	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
KABUPATEN TAPIN		Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kelas kerentanan bencana kekeringan di Kabupaten Tapin adalah **tinggi**.

3. Kapasitas (*Capacity*)

Berdasarkan pengkajian kapasitas Kabupaten Tapin dalam menghadapi bencana kekeringan, maka diperoleh kelas kapasitas dalam menghadapi bencana kekeringan. Hasil analisis kapasitas untuk bencana kekeringan dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.42 Kapasitas Per Kecamatan Bencana Kekeringan di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Indeks Ketahanan Daerah	Kelas Ketahanan Daerah	Indeks Kesiapsiagaan	Kelas Kesiapsiagaan	Indeks Kapasitas	Kelas Kapasitas
1	Bakarangan	0,62	Sedang	0,086	Rendah	0,299	Rendah
2	Binuang	0,62	Sedang	0,087	Rendah	0,300	Rendah
3	Bungur	0,62	Sedang	0,084	Rendah	0,299	Rendah
4	Candi Laras Selatan	0,62	Sedang	0,075	Rendah	0,293	Rendah
5	Candi Laras Utara	0,62	Sedang	0,072	Rendah	0,291	Rendah
6	Hatungun	0,62	Sedang	0,090	Rendah	0,302	Rendah
7	Lokpaikat	0,62	Sedang	0,086	Rendah	0,299	Rendah
8	Piani	0,62	Sedang	0,093	Rendah	0,304	Rendah
9	Salam Babaris	0,62	Sedang	0,090	Rendah	0,302	Rendah

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Indeks Ketahanan Daerah	Kelas Ketahanan Daerah	Indeks Kesiapsiagaan	Kelas Kesiapsiagaan	Indeks Kapasitas	Kelas Kapasitas
10	Tapin Selatan	0,62	Sedang	0,084	Rendah	0,298	Rendah
11	Tapin Tengah	0,62	Sedang	0,082	Rendah	0,297	Rendah
12	Tapin Utara	0,62	Sedang	0,088	Rendah	0,301	Sedang
KABUPATEN TAPIN		0,62	Sedang	0,084	Rendah	0,298	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Tabel di atas menunjukkan kapasitas setiap kecamatan terpapar bencana kekeringan. Perhitungan data tersebut didasarkan pada hasil gabungan ketahanan daerah dengan kesiapsiagaan masyarakat. Secara penilaian indeks keseluruhan kecamatan di Kabupaten Tapin tergolong kelas kapasitas **rendah**. Kelas kapasitas tersebut diperoleh dari nilai rata-rata kapasitas seluruh kecamatan yang terpapar bahaya kekeringan di Kabupaten Tapin.

4. Risiko

Tingkat risiko bencana kekeringan diperoleh dari hasil luas dan tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas bencana kekeringan di Kabupaten Tapin yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.43 Potensi Risiko Kekeringan di Kabupaten Tapin

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Bakarangan	434,65	6.629,07	33,21	7.096,93	Sedang
2	Binuang	1.367,31	16.474,49	176,13	1.367,31	Sedang
3	Bungur	1.138,17	7.665,14	118,70	8.922,01	Sedang
4	Candi Laras Selatan	520,24	25.158,83	92,63	25.771,70	Sedang
5	Candi Laras Utara	3.162,46	59.082,16	152,42	62.397,04	Sedang
6	Hatungun	545,92	6.064,17	107,11	6.717,20	Sedang
7	Lokpaikat	2.018,39	7.815,55	125,25	9.959,18	Sedang
8	Piani	1.086,19	17.911,61	83,38	19.081,18	Sedang
9	Salam Babaris	1.113,13	5.461,01	68,21	6.642,35	Sedang
10	Tapin Selatan	1.877,76	12.237,24	100,25	14.215,25	Sedang
11	Tapin Tengah	730,59	33.048,72	111,32	33.890,63	Sedang

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
12	Tapin Utara	640,88	2.707,00	93,56	3.441,44	Sedang
KABUPATEN TAPIN		14.635,68	200.254,98	1.262,17	216.152,83	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Jika dilihat pada tabel di atas maka sebagian besar wilayah di Kabupaten Tapin terdampak kekeringan dengan tingkat risiko **sedang**. Total luas risiko kekeringan di Kabupaten Tapin secara keseluruhan adalah **216.152,83 Ha** dan berada pada kelas sedang. Secara rinci, luas risiko kekeringan terdapat pada pada kelas rendah seluas **14.635,68 Ha**, kelas sedang seluas **200.254,98 Ha** dan kelas tinggi seluas **1.262,17 Ha**.



Gambar 2.17. Diagram Potensi Luas Risiko Kekeringan Pada Tiap Kecamatan

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Dari grafik di atas dapat terlihat sebaran luas risiko kekeringan per kecamatan di Kabupaten Tapin. Kecamatan yang memiliki luas tertinggi risiko kekeringan pada kelas rendah adalah Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas 3.162,46 Ha, Untuk kelas risiko sedang yang tertinggi adalah Kecamatan Candi Laras Utara seluas 55.082,16 Ha dan untuk kelas risiko tinggi adalah Kecamatan Binuang dengan luasan yang tertinggi yaitu seluas 176,13 Ha.

2.2.6. Bencana Tanah Longsor

1. Bahaya (*Hazard*)

Tanah longsor merupakan kejadian yang diakibatkan oleh lebih besarnya gaya pendorong yaitu sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah/batuan dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah (Dinas PU, 2012). Kondisi lereng yang curam berpotensi longsor lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi lereng yang landai. Berdasarkan penghitungan parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya tanah longsor untuk Kabupaten Tapin sebagai berikut.

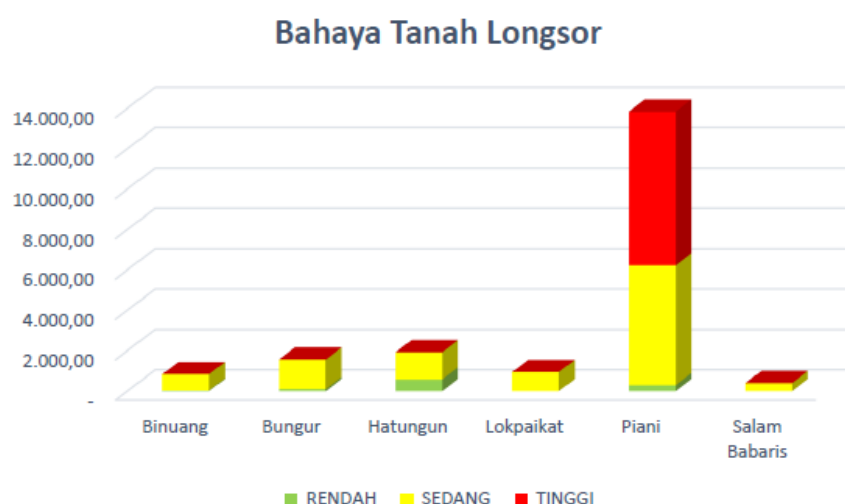
Tabel 2.44 Potensi Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Tapin

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Binuang	29,97	803,07	0	833,04	Sedang
2	Bungur	95,49	1.466,19	0	1.561,68	Sedang
3	Hatungun	573,12	1.346,85	0	1.919,97	Sedang
4	Lokpaikat	0	940,05	0	940,05	Sedang
5	Piani	291,24	5.928,84	7.617,42	13.837,50	Tinggi
6	Salam Babaris	0	394,47	0	394,47	Sedang
KABUPATEN TAPIN		989,82	10.879,47	7.617,42	19.486,71	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Potensi luas bahaya tanah longsor dari tabel di atas merupakan luasan kecamatan di Kabupaten Tapin yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Potensi luas bahaya tanah longsor di Kabupaten Tapin secara keseluruhan adalah **19.486,71 Ha** dan berada pada kelas **tinggi**. Untuk total kelas bahaya rendah seluas **989,82 Ha**, kelas bahaya sedang seluas **10.879,47 Ha** dan bahaya kelas tinggi seluas **7.617,42 Ha**. Jika dilihat dari sebaran luas bahaya tanah longsor per kecamatan di Kabupaten Tapin yang terdampak, maka disimpulkan bahwa pada kelas rendah dengan kecamatan yang

tertinggi adalah Kecamatan Hatungun seluas **573,12 Ha**, Kelas kecamatan yang tertinggi untuk kelas bahaya sedang ada di Kecamatan Piani dengan luas **5.928,84 Ha** serta kelas kecamatan yang tertinggi untuk kelas bahaya tinggi ada di Kecamatan Piani seluas **7.617,42 Ha**.



Gambar 2.18. Diagram Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor Pada Tiap Kecamatan

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

2. Kerentanan (*Vulnerability*)

Kajian kerentanan untuk bencana tanah longsor di Kabupaten Tapin didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian (ekonomi dan fisik), dan kerusakan lingkungan. Adapun Rekapitulasi potensi penduduk terpapar ditimbulkan bencana tanah longsor di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45 Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan (Jiwa)				Kelas
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Usia Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Binuang	279	44	30	10	2	Sedang
2	Bungur	177	57	19	6	1	Sedang
3	Hatungun	381	101	45	13	2	Sedang
4	Lokpaikat	49	56	15	1	0	Sedang
5	Piani	567	92	65	21	3	Sedang
6	Salam Babaris	13	54	1	0	0	Sedang

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan (Jiwa)				Kelas
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Usia Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
	KABUPATEN TAPIN	1.462	71	175	54	10	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari kecamatan di Kabupaten Tapin terdampak tanah longsor. Penduduk terpapar bencana tanah longsor, terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rawan terhadap bencana tanah longsor. Kelas penduduk terpapar bencana di Kabupaten Tapin ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh kecamatan terdampak bencana tanah longsor.

Bencana tanah longsor di Kabupaten Tapin berpotensi terjadi di beberapa kecamatan dimana penduduk terpapar bencana tanah longsor di Kabupaten Tapin yaitu sejumlah **1.462 jiwa** dan berada pada kelas **sedang**. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah **175 jiwa**, penduduk miskin sejumlah **54 jiwa**, dan penduduk disabilitas sejumlah **10 jiwa**. Kecamatan yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana tanah longsor adalah Kecamatan Piani yaitu dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai **567 jiwa**, untuk kelompok umur rentan sebanyak **65 jiwa**. Kecamatan Piani memiliki potensi penduduk miskin tertinggi dengan total **21 jiwa**. Sedangkan untuk penduduk disabilitas tertinggi masih terdapat di kecamatan Piani yakni **3 jiwa**.

Untuk potensi kerugian dan kerusakan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46 Potensi Kerugian Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Potensi Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas Lingkungan
		Fisik	Ekonomi	Total Kerugian	Kelas Kerugian		
1	Binuang	827,35	1.481,10	2.308,45	Tinggi	72	Sedang
2	Bungur	279,45	44,16	323,60	Rendah	329	Tinggi
3	Hatungun	330,40	874,49	1.204,89	Sedang	319	Tinggi
4	Lokpaikat	96,44	11,91	108,36	Rendah	118	Sedang
5	Piani	2.923,42	21.499,54	24.422,96	Tinggi	4.340	Tinggi

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Potensi Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas Lingkungan
		Fisik	Ekonomi	Total Kerugian	Kelas Kerugian		
6	Salam Babaris	52,50	27,04	79,54	Rendah	99	Sedang
KABUPATEN TAPIN		4.509,56	23.939,23	28.447,80	Tinggi	5.277	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Berdasarkan tabel maka terlihat kerugian diperoleh dari kerugian fisik dan ekonomi sedangkan Kerugian lingkungan dihitung dari lahan-lahan yang berpotensi terdampak akibat bencana tanah longsor. Total potensi kerugian akibat bencana tanah longsor di Kabupaten Tapin adalah **28,44 milyar rupiah** dan tergolong pada ke dalam kelas kerugian **tinggi**. Secara terperinci, kerugian fisik sebesar **4,5 miliar rupiah**, dan kerugian ekonomi sebesar **23,93 milyar rupiah**. Jika dilihat dari tingkat kecamatan maka Kecamatan Piani merupakan daerah yang tertinggi untuk kerugian fisik sebesar **2,92 milyar rupiah** dan tertinggi juga untuk kerugian ekonomi sebesar **21,49 milyar rupiah**. Sedangkan potensi kerusakan lingkungan bencana tanah longsor di Kabupaten Tapin adalah **5.277 Ha** dengan kelas kerusakan lingkungan adalah **tinggi**. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana tanah longsor tertinggi adalah Kecamatan Piani dengan luas **4.340 Ha**.

Berdasarkan hasil kajian diatas maka diketahui kelas kerentanan bencana tanah longsor di tiap kecamatan di Kabupaten Tapin. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47 Kelas Kerentanan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
2	Binuang	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
3	Bungur	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang
6	Hatungun	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
7	Lokpaikat	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang
8	Piani	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
9	Salam Babaris	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang
KABUPATEN TAPIN		Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kelas kerentanan bencana tanah longsor di Kabupaten Tapin adalah **tinggi**.

3. Kapasitas (*Capacity*)

Berdasarkan pengkajian kapasitas Kabupaten Tapin dalam menghadapi bencana tanah longsor, maka diperoleh kelas kapasitas dalam menghadapi bencana tanah longsor. Hasil analisis kapasitas untuk bencana tanah longsor dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.48 Kapasitas Per Kecamatan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Indeks Ketahanan Daerah	Kelas Ketahanan Daerah	Indeks Kesiapsiagaan	Kelas Kesiapsiagaan	Indeks Kapasitas	Kelas Kapasitas
1	Binuang	0,62	Sedang	0,152	Rendah	0,339	Sedang
2	Bungur	0,62	Sedang	0,143	Rendah	0,334	Sedang
3	Hatungun	0,62	Sedang	0,146	Rendah	0,336	Sedang
4	Lokpaikat	0,62	Sedang	0,134	Rendah	0,328	Rendah
5	Piani	0,62	Sedang	0,135	Rendah	0,329	Rendah
6	Salam Babaris	0,62	Sedang	0,145	Rendah	0,335	Sedang
KABUPATEN TAPIN		0,62	Sedang	0,142	Rendah	0,33	Rendah

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Tabel di atas menunjukkan kapasitas setiap kecamatan terpapar bencana tanah longsor. Perhitungan data tersebut didasarkan pada hasil gabungan ketahanan daerah dengan kesiapsiagaan masyarakat. Secara penilaian indeks keseluruhan kecamatan di Kabupaten Tapin tergolong kelas kapasitas **rendah**. Kelas kapasitas tersebut diperoleh dari nilai rata-rata kapasitas seluruh kecamatan yang terpapar bencana tanah longsor di Kabupaten Tapin.

4. Risiko

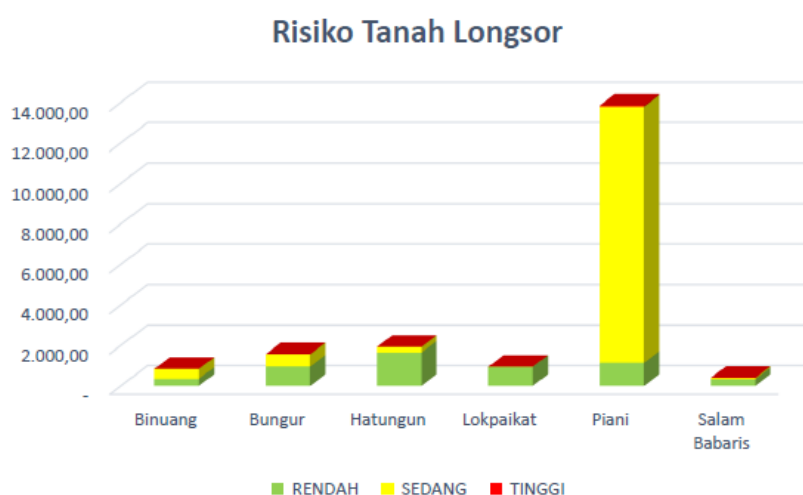
Tingkat risiko bencana tanah longsor diperoleh dari hasil luas dan tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas bencana tanah longsor di Kabupaten Tapin yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.49 Potensi Risiko Tanah Longsor di Kabupaten Tapin

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Binuang	340,18	490,84	2,02	833,04	Sedang
2	Bungur	948,88	612,80	0	1.561,68	Sedang
3	Hatungun	1.636,88	283,09	0	1.919,97	Sedang
4	Lokpaikat	931,23	8,82	0	940,05	Sedang
5	Piani	1.136,24	12.655,65	45,61	13.837,50	Sedang
6	Salam Babaris	325,39	69,08	0	394,47	Sedang
KABUPATEN TAPIN		5.318,80	14.120,28	47,63	19.486,71	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Jika dilihat pada tabel di atas maka sebagian besar wilayah di Kabupaten Tapin terdampak tanah longsor dengan tingkat risiko sedang dan rendah. Total luas risiko tanah longsor di Kabupaten Tapin secara keseluruhan adalah **19.486,71 Ha** dan berada pada kelas **sedang**. Secara rinci, luas risiko tanah longsor terdapat pada pada kelas rendah seluas **5.318,80 Ha**, kelas sedang seluas **14.120,28 Ha** dan kelas tinggi seluas **47,63 Ha**.



Gambar 2.19. Diagram Potensi Luas Risiko Tanah Longsor Pada Tiap Kecamatan

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Dari grafik di atas dapat terlihat sebaran luas risiko tanah longsor per kecamatan di Kabupaten Tapin. Kecamatan yang memiliki luas tertinggi risiko tanah longsor pada kelas rendah adalah Kecamatan Hatungun seluas **1.636,88 Ha**. Kecamatan Piani tertinggi untuk kelas risiko sedang dan tinggi seluas **12.655,65 Ha** dan **45,61 Ha**.

2.2.7 Deskripsi Peta Risiko Kabupaten

Peta risiko bencana adalah peta petunjuk zonasi tingkat risiko bencana di suatu daerah pada waktu tertentu. Penyusunan peta risiko bencana dapat dilakukan dengan melakukan penggabungan (*overlay*) peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas bencana. Dari hasil kajian peta risiko, dapat ditentukan tingkat risiko bencana yang berpotensi terjadi di daerah. Peta risiko bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen capaian Dokumen KRB. Selain itu, dokumen kajian ini juga harus menyajikan rekomendasi tindak minimum dalam rencana penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

Peta risiko dihasilkan berdasarkan peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas. Sedangkan kajian dihasilkan berdasarkan tingkat yang diturunkan dari peta-peta tersebut, peta bahaya (menghasilkan tingkat bahaya), peta kerentanan (menghasilkan tingkat kerentanan), dan peta kapasitas (menghasilkan tingkat kapasitas). Tingkat-tingkat yang dihasilkan tersebut digunakan dalam pengkajian risiko bencana hingga menghasilkan kebijakan dalam rencana penanggulangan bencana daerah. Sedangkan pemetaan risiko multi bahaya dipersiapkan untuk mengkaji risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian pada suatu daerah apabila berbagai jenis bencana terjadi. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan penggabungan hasil kajian peta risiko untuk setiap sejenis bencana. Pemetaan risiko multi bahaya dimaksudkan untuk mengetahui wilayah-wilayah yang rawan terhadap berbagai bencana, khususnya wilayah yang memiliki kelas multi bahaya tinggi di daerah. Peta risiko multi bahaya dihasilkan berdasarkan penjumlahan dari indeks-indeks risiko masing-masing bahaya. Penjumlahan tersebut berdasarkan faktor-faktor pembobotan dari masing-masing

bahaya. Penting untuk dicatat bahwa peta risiko bencana dibuat untuk setiap jenis ancaman yang ada pada suatu kawasan. Metode perhitungan dan data yang dibutuhkan untuk menghitung berbagai indeks akan berbeda untuk setiap jenis bahaya. Adapun peta risiko bencana yang ada di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

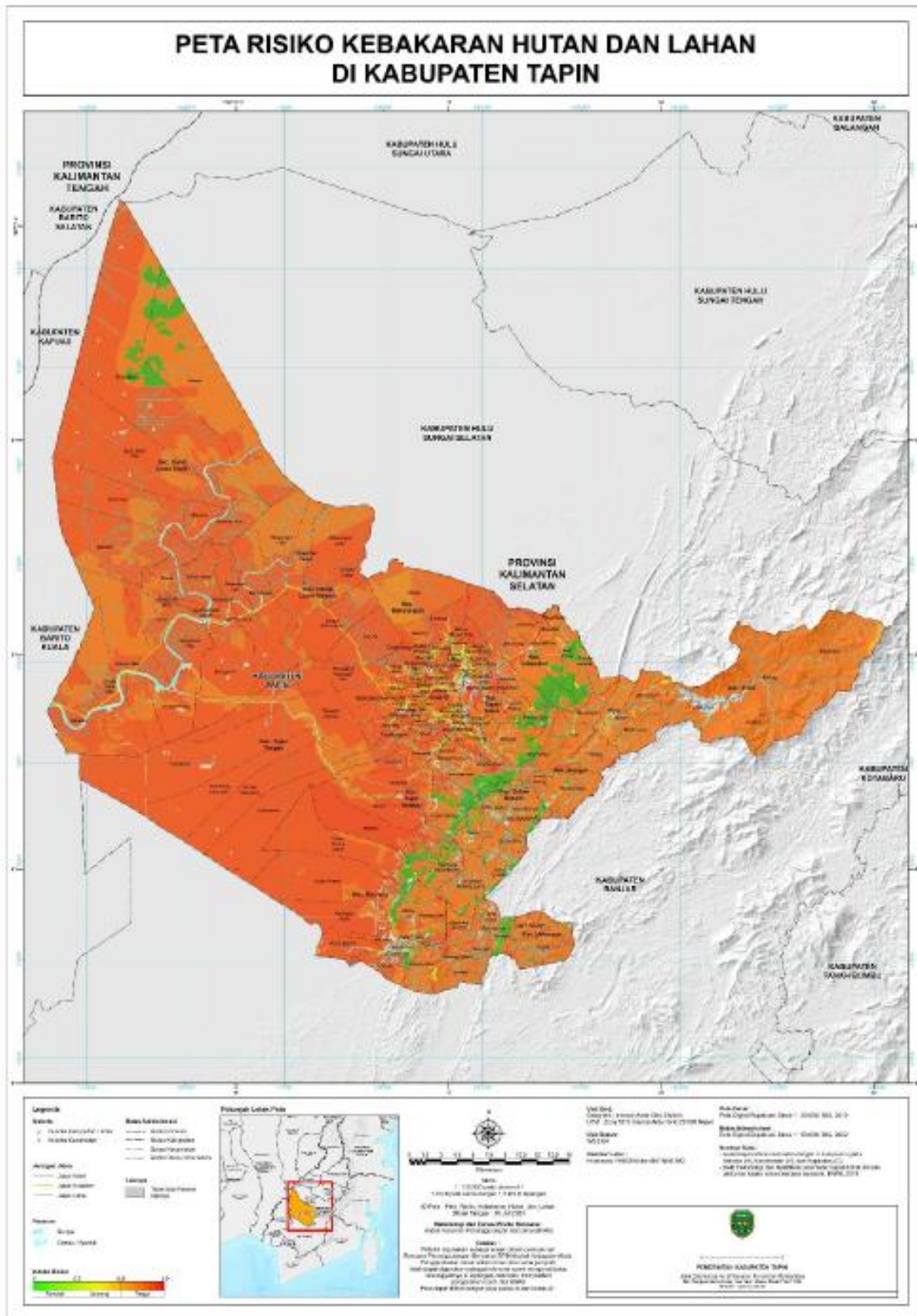
Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023





Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

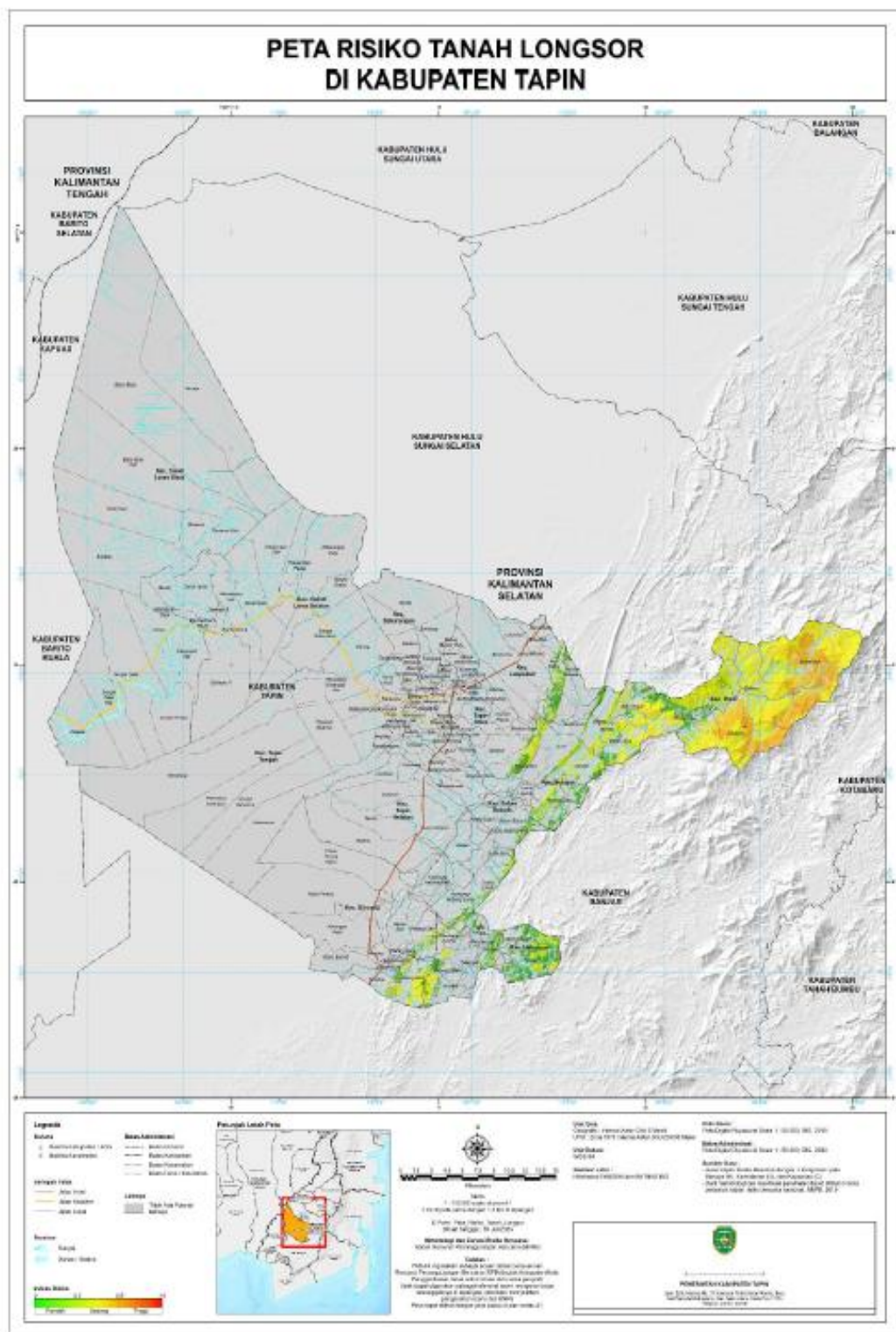




Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 202

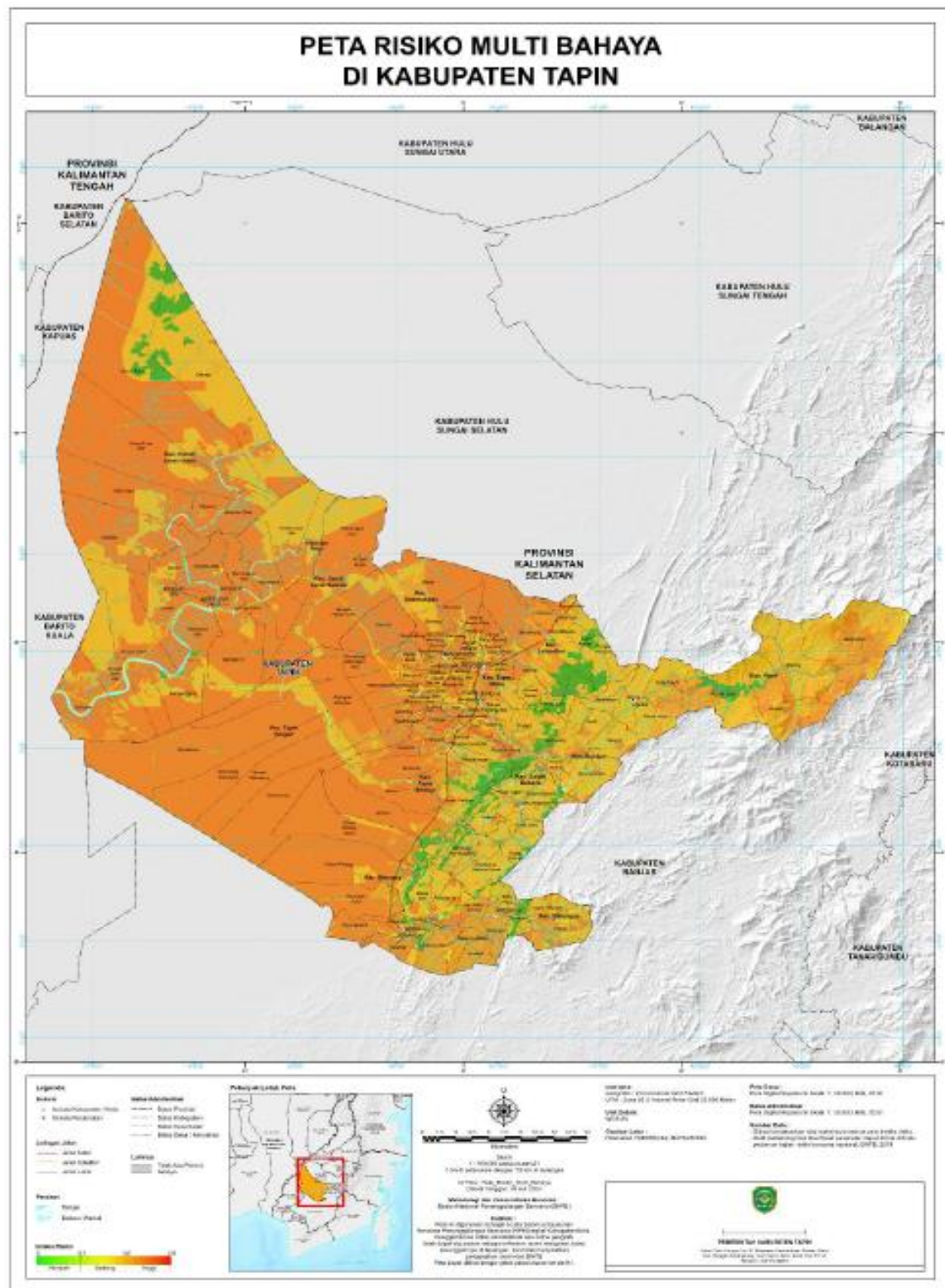




Gambar 2.25 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029



Gambar 2.26 Peta Risiko Multi Bencana (Multi Hazard)

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

2.3 PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI

Untuk menetapkan prioritas risiko bencana yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan daerah, diperlukan pendekatan analisis yang sistematis guna mengidentifikasi ancaman dan dampaknya serta menentukan prioritas yang sesuai dengan kondisi lokal. Salah satu metode analisis yang sering digunakan adalah Analisis Risiko Bencana (Disaster Risk Analysis), yang menggabungkan beberapa langkah utama: identifikasi risiko, penilaian kerentanan, dan analisis kapasitas mitigasi. Proses ini dimulai dengan Identifikasi Ancaman di mana tiap jenis bencana (seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor) dianalisis berdasarkan sejarah kejadian, frekuensi, dan potensi dampaknya di daerah tersebut. Setelah ancaman diidentifikasi, dilakukan Penilaian Kerentanan yang mengevaluasi sejauh mana populasi, infrastruktur, dan ekonomi di daerah tersebut rentan terhadap ancaman yang telah diidentifikasi. Kerentanan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, kualitas bangunan, dan tata letak geografis.

Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah, dan upaya kesiapsiagaan. Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui tindakan/kegiatan dan mekanisme generik.

Proses perumusan prioritas risiko bencana:

1. Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB),
2. Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan/atau menggunakan data dalam DIBI BNPB

Tabel 2.50 Rekapitulasi Tingkat Risiko Bencana Prioritas di Kabupaten Tapin

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Banjir	54.765,87	93.014,37	500,40	148.280,64	Sedang
2	Banjir Bandang	4.169,60	1.237,15	63,72	5.470,47	Sedang
3	Cuaca Ekstrem	56.080,37	116.198,23	13.281,69	185.560,29	Tinggi
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	9.421,12	1.381,47	198.742,26	209.544,84	Tinggi
5	Kekeringan	14.635,68	200.254,98	1.262,17	216.152,83	Sedang

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Kecamatan	Bahaya				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
6	Tanah Longsor	5.318,80	14.120,28	47,63	19.486,71	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana dalam 10 tahun terakhir, maka dapat dianalisis prioritas penanganan risiko bencana yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapin. Prioritas penanganan risiko bencana dibagi dalam 3 (tiga) prioritas yaitu prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Prioritas pertama adalah penanganan risiko bencana (dampak dari bencana) untuk jenis bencana dengan kelas risiko Sedang atau Tinggi dan kecenderungan kejadian bencana Meningkat atau Tetap. Prioritas kedua adalah penanganan risiko bencana (dampak dari bencana) untuk jenis bencana dengan kelas risiko Rendah, Sedang, ataupun Tinggi dan kecenderungan kejadian bencana Menurun, Tetap, ataupun Meningkat. Sementara yang dimaksud prioritas ketiga adalah penanganan risiko bencana (dampak dari bencana) untuk jenis bencana dengan kelas risiko Rendah atau Sedang dan kecenderungan kejadian bencana Menurun atau Tetap. Hasil analisis ketiga prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Risiko Bencana Prioritas		Tingkat Resiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan	Meningkat		Banjir, Banjir Bandang	
	Tetap		Kekeringan, Tanah Longsor	Cuaca Ekstrem, Kebakaran Hutan Dan Lahan
	Menurun			

Gambar 2.27. Grafik penentuan prioritas penanganan risiko bencana di Kabupaten Tapin

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Tapin, 2023

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat 4 jenis bencana yang menjadi prioritas pertama untuk ditangani yaitu: 1) Cuaca Ekstrem, 2) Kebakaran Hutan dan Lahan, 3) Banjir dan 4) Banjir Bandang. Sedangkan prioritas kedua untuk ditangani terdapat 2 jenis bencana yaitu: 1) Kekeringan dan 2) Tanah Longsor. Kemudian, tidak ada bencana yang termasuk prioritas ketiga dalam penanganannya. Untuk bencana gempa bumi yang pada tahun 2024 ini sudah mulai terjadi di Kabupaten Tapin, perlu dilakukan kajian mendalam dan komprehensif untuk mulai mendapatkan penanganan,

2.4 MASALAH POKOK (ANALISIS AKAR MASALAH)

Rumusan-rumusan masalah utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tapin yang merujuk pada prioritas risiko bencana yang ditangani untuk dikelola dan diselesaikan (banjir bandang, banjir dan tanah longsor), sebelumnya akan diuraikan berdasarkan 3 komponen, yaitu; (1) faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana yang menjadi prioritas; (2) kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; dan (3) kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi/misi kepala daerah.

Di setiap komponen tersebut dirumuskan dan diuraikan menjadi 3 masalah pokok hingga mendapatkan akar masalahnya dengan analisis pohon masalah. Masalah dan akar masalah yang ditemukan berdasarkan analisis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.51 Rumusan Masalah dan Akar Masalah Kebencanaan di Kabupaten Tapin

No.	Komponen	Masalah	Akar Masalah
1	Keterpaparan dan Kerentanan	Banyak alih fungsi lahan menjadi perumahan	Berkurangnya area resapan air sehingga menyebabkan banjir dan juga bencana kekeringan
2		Tingkat kesadaran warga masyarakat dalam mengurangi risiko bencana masih rendah	Kurangnya keterlibatan komunitas lokal dalam program mitigasi.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Komponen	Masalah	Akar Masalah
3		Topografi dan kondisi lingkungan di Kabupaten Tapin dengan sungai dan alur yang sempit, terutama di daerah hulu yang rawan banjir bandang serta tanah longsor	• Terjadi sedimentasi pada sungai dan minimnya vegetasi penahan air. • Minimnya tenaga ahli lokal yang memiliki pemahaman tentang konstruksi tahan bencana.
4	Kesenjangan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Keterbatasan sistem drainase dan irigasi	Drainase yang belum merata di seluruh kecamatan dan irigasi yang rusak menyebabkan kapasitas untuk menangani debit air saat curah hujan tinggi menjadi sangat terbatas.
5		Keterbatasan regulasi dan kebijakan	• Kabupaten Tapin belum memiliki peraturan daerah yang memadai mengenai pengelolaan sampah dan penggunaan lahan secara berkelanjutan. • Pengawasan implementasi standar bangunan resilience terhadap bencana masih lemah
6		Kurangnya infrastruktur mitigasi bencana	Minimnya fasilitas seperti waduk dan embung untuk menahan laju air dari hulu memperburuk dampak banjir bandang, sementara cadangan air di embung yang tersedia masih terbatas dalam menghadapi kekeringan.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Komponen	Masalah	Akar Masalah
7	Kesenjangan Terhadap Pencapaian Visi/Misi Strategis Daerah	Tidak tercapainya standar bangunan ramah bencana	Pembangunan permukiman sering kali tidak sesuai dengan standar konstruksi yang tahan terhadap bencana longsor dan banjir bandang, sehingga memperbesar dampak kerusakan saat terjadi bencana
8		Kurangnya kolaborasi lintas sektor	• Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dalam mitigasi banjir bandang masih kurang, padahal banyak peristiwa bencana yang membutuhkan koordinasi lintas wilayah • Tidak ada forum regular untuk membahas masalah mitigasi bencana lintas sektor • Pembagian tanggungjawab keuangan antar Lembaga belum jelas.
9		Keterbatasan kapasitas lembaga penanggulangan bencana	• Kurangnya personil yang terlatih dan berpengalaman dalam mitigasi dan penanganan bencana. • Minimnya pelatihan rutin untuk meningkatkan kapasitas personil BPBD. • Fasilitas pendukung koordinasi dan komando

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Komponen	Masalah	Akar Masalah
			antar OPD, warga dan swasta masih terbatas.

2.5 RUMUSAN ISU STRATEGIS

Berikut adalah 5 pernyataan isu strategis utama yang menjadi prioritas penyelesaian dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin untuk lima tahun ke depan:

1. Pengelolaan Tata Guna Lahan untuk Mengurangi Risiko Banjir dan Kekeringan

Kabupaten Tapin menghadapi alih fungsi lahan yang pesat menjadi kawasan perumahan dan komersial. Hal ini mengakibatkan berkurangnya area resapan air, yang memperbesar risiko banjir dan kekeringan. RPB perlu mengintegrasikan kebijakan tata guna lahan yang ketat dan berkelanjutan, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pemanfaatan lahan agar dapat meminimalisir dampak bencana alam.

2. Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana masih rendah, dengan kurangnya keterlibatan aktif komunitas lokal dalam program mitigasi. Penting untuk menjadikan edukasi dan pelibatan masyarakat sebagai prioritas strategis RPB, melalui program yang berkelanjutan dan berbasis komunitas untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mitigasi risiko bencana.

3. Peningkatan Infrastruktur Drainase dan Irigasi untuk Menghadapi Curah Hujan Ekstrem

Infrastruktur drainase dan irigasi yang terbatas dan tidak merata di seluruh kecamatan menyebabkan daerah rentan terhadap banjir saat curah hujan tinggi. RPB perlu fokus pada peningkatan sistem drainase dan rehabilitasi jaringan irigasi di seluruh kecamatan, dengan mengadopsi pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi topografi wilayah untuk memastikan kemampuan daerah dalam mengelola debit air secara efektif.

4. Pengembangan Infrastruktur Mitigasi Bencana dan Fasilitas Penampungan Air

Minimnya waduk, embung, dan fasilitas penampungan air di Kabupaten Tapin memperburuk dampak banjir bandang dan menghambat cadangan air saat kekeringan. Penyediaan infrastruktur penampungan air dan waduk di lokasi strategis perlu menjadi prioritas dalam lima tahun mendatang, untuk mendukung ketahanan daerah terhadap bencana banjir dan kekeringan.

5. Penguatan Regulasi dan Koordinasi Lintas Sektor untuk Penanggulangan Bencana yang Efektif

Kesenjangan dalam regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan risiko bencana serta lemahnya kolaborasi lintas sektor memperbesar dampak bencana di Kabupaten Tapin. Diperlukan regulasi yang jelas, pengawasan implementasi standar bangunan tahan bencana, dan pembentukan forum kolaborasi lintas sektor. RPB harus mendorong sinergi antar instansi, daerah, dan pihak swasta untuk memastikan koordinasi yang lebih baik dalam mitigasi dan respons bencana.

Kelima isu strategis ini memerlukan penanganan segera dalam rangka memperkuat kapasitas Kabupaten Tapin dalam menghadapi ancaman bencana selama lima tahun ke depan.

BAB PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA



3.1 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.1.1 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL

Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Dalam penyusunan kebijakan skala nasional, pemerintah pusat menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung-jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana untuk menjadikan **“Bangsa yang Tangguh Menghadapi Bencana”**. Bangsa yang tangguh bencana adalah bangsa yang mempunyai kemampuan dalam mengatasi bencana melalui adaptasi dalam membangun kembali kehidupan dengan cara yang lebih baik.

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama melalui UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan presiden turunan dari UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Didalam Rancangan RPJMN Tahun 2020 – 2024, dibahas tentang penanggulangan bencana yaitu **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**.

Arah kebijakan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui integrasi upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup. Secara lebih spesifik, strategi untuk mewujudkan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup pada RPJMN 2020-2024 Program Prioritas 1 meliputi:

- a. Kegiatan Prioritas 1: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:
 - Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim;
 - Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan;

- Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup;
- Pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar DAS
- b. Kegiatan Prioritas 2: Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan Penanganan Pencemaran dan Kerusakan di Pesisir dan Laut;
- c. Kegiatan Prioritas 3: Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:
 - Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut;
 - Reforestasi Kawasan Hutan;
 - Restorasi Lahan Bekas Tambang; dan
 - Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut.
- d. Kegiatan Prioritas 4: Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:
 - Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah;
 - Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Arah kebijakan meningkatkan ketahanan bencana dan iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Secara lebih spesifik, strategi untuk mewujudkan arah kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 Program Prioritas 2 dijabarkan dalam Kegiatan Prioritas 1 Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan:

1. Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana;
2. Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana;
3. Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan;
4. Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana;
5. Penguatan Penanganan Darurat Bencana;
6. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan
7. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

1) Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044

Ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat dicapai melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang bersifat jangka panjang, komprehensif, dan terintegrasi. Untuk mendukung hal ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB), yang berfungsi sebagai panduan untuk menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun ke depan. RIPB menjadi pedoman nasional yang dapat dijadikan acuan oleh kementerian/lembaga,

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan penanggulangan bencana. Selain itu, RPB juga menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah.

RIPB Tahun 2020-2044 ditetapkan berdasarkan periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yaitu RPJPN pertama yang berakhir pada 2025, dan RPJPN kedua dari 2025 hingga 2045. RPB ini juga mengacu pada Persetujuan Paris tentang perubahan iklim, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR) 2015-2030.

RIPB memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, serta kebijakan, strategi, dan peta jalan pelaksanaannya. Tujuan penanggulangan bencana untuk periode 2020-2044 adalah "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan." Visi ini dicapai melalui tiga misi:

- (1) mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan;
- (2) mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif; dan
- (3) mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Untuk merealisasikan visi tersebut, ditetapkan tujuan, kebijakan, strategi, dan fokus capaian lima tahunan, yang dituangkan dalam Peta Jalan Pelaksanaan RPB Tahun 2020-2044.

Tabel 3. 1 Fokus Capaian RPB Tahun 2020-2044

Kebijakan	Strategi	Fokus capaian Tahun 2020-2024
Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	• Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam PB yang adaptif dan berkelanjutan • Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria Penanggulangan Bencana.	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga. pemerintah daerah, TNI,	Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Kebijakan	Strategi	Fokus capaian Tahun 2020-2024
pemangku kepentingan dalam PB	Polri, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media dan pemangku kepentingan lainnya dalam PB	
	Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu serta berkesinambungan berdasarkan prinsip - prinsip kebijakan satu peta dan satu data	Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana
Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	- Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan. - Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk PB - Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk PB	Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan
Penguatan tata kelola PB yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku PB - Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal	Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Kebijakan	Strategi	Fokus capaian Tahun 2020-2024
	Penanggulangan Bencana	penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
	Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam PB	Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu
	- Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola PB untuk meningkatkan akuntabilitas. - Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana - mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana - meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan PB kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana - Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standardisasi kompetensi bidang kebencanaan.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Kebijakan	Strategi	Fokus capaian Tahun 2020-2024
	penanganan darurat bencana - Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana - Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital	
Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	- mengoptimalkan perencanaan rehab-rekon pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana - meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik	Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.
	mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

Sumber : RIPB 2020-2024

Fokus capaian RIPB dibagi menjadi 5 Periode yaitu Periode I tahun 2020-2024, Periode II tahun 2025-2029, Periode III tahun 2030-2034, Periode IV tahun 2035-2039, dan Periode V tahun 2040-2044. Saat ini memasuki periode II untuk tahun 2025-2024 dengan fokus capaian sebagai berikut :

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB.
2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan.
3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.
6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.
8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana.
10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.
11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.
12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.

2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) adalah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu lima tahun dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden. Dalam hal ini penanggulangan bencana ditempatkan dalam satu tema besar sebagai satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024 yaitu mengenai upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Keseriusan pemerintah dalam penanggulangan bencana ini tertuang dalam RPJMN 2020-2024 khususnya arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, point (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim menyatakan bahwa Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Upaya penanggulangan bencana di tingkat nasional banyak diarahkan pada peningkatan ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim melalui pengurangan rasio kerugian ekonomi akibat bencana yang ditargetkan sebesar 0,21% dari PDB di tahun 2024. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut khusus dalam penanggulangan bencana akan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Penguatan data, informasi, dan literasi bencana.
- b. Penguatan sistem, regulasi, dan tata kelola bencana.

- c. Penguatan rencana pengurangan risiko bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana mitigasi serta penanggulangan bencana.
- e. Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana, serta implementasi penanggulangan bencana.
- f. Penguatan penanganan darurat bencana.
- g. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.
- h. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan MHEWS.
- i. Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui social re-engineering ketahanan bencana multilevel, khususnya di tingkat keluarga, komunitas, dan desa.
- j. Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.

3) UU Nomor 59 tahun 2024 Tentang RPJPN 2025-2045

Penanggulangan bencana adalah salah satu prioritas utama dalam RPJPN 2025-2045, di mana pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas penanggulangan bencana di seluruh Indonesia. Hal ini mencakup pengembangan sistem peringatan dini, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Penguatan kelembagaan menjadi fokus utama, dengan upaya memperkuat kapasitas lembaga penanggulangan bencana di tingkat pusat maupun daerah agar dapat merespons bencana secara lebih efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat juga didorong melalui program edukasi dan pelatihan, di mana masyarakat diajak untuk aktif dalam menghadapi bencana, mulai dari peringatan dini hingga tindakan evakuasi dan penyelamatan korban.

Sesuai dengan UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045, terdapat delapan misi utama, salah satunya adalah agenda nomor 5 yang berfokus pada Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Agenda ini bertujuan memastikan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketahanan sosial budaya dan ekologi diwujudkan melalui interaksi yang sinergis dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan ini mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan pelestarian lingkungan demi generasi mendatang.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang tim nasional persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan dan Visi Indonesia Emas 2045 menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat integrasi Indonesia dalam ekonomi global dan membangun fondasi menuju negara maju pada

2045. Keputusan ini membentuk Tim Nasional untuk mempersiapkan keanggotaan Indonesia di OECD, guna mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas.

Sebagai bagian dari arahan kebijakan, pemerintah menekankan penguatan sarana dan prasarana yang tangguh bencana. Hal ini diwujudkan melalui Building Rating untuk menilai ketahanan bencana bangunan, pengintegrasian multifungsi infrastruktur seperti bangunan umum sebagai tempat evakuasi, serta pemberian insentif penanggulangan bencana di kawasan berisiko tinggi. Dengan meningkatnya ancaman bencana dan perubahan lingkungan, langkah-langkah seperti literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan keterlibatan semua pihak dalam mitigasi bencana menjadi prioritas. Upaya ini dilengkapi dengan regulasi yang kuat, tata kelola kelembagaan yang baik, sinergi pembiayaan, serta integrasi program berbasis teknologi.

Kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah kota. Indikator Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah jumlah total kerugian yang didapatkan setelah adanya bencana dibandingkan total pendapatan domestik bruto (PDB). Memonitor kerugian langsung akibat bencana sebagai salah satu landasan penilaian kebutuhan pasca bencana, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada sebuah kota. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

Cara perhitungan: Jumlah kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-1 ditambah dengan jumlah kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-2 hingga Kota ke-n dibagi PDB tahun yang sama dikali dengan seratus, yang dinyatakan dengan persen (%). Dengan rumus sebagai berikut :

$$PKE = \left(\frac{KEK_1 + KEK_2 + \dots + KEK_n}{PDB} \right) \times 100$$

Keterangan:

PKE : Proporsi kerugian ekonomi langsung terhadap PDB

KEK1 : Jumlah kerugian ekonomi langsung pada Kota 1

KEK2 : Jumlah kerugian ekonomi langsung pada Kota 2

KEKn : Jumlah kerugian ekonomi langsung pada Kota n

PDB : Pendapatan domestik bruto tahun yang sama dengan tahun terjadinya bencana

Dokumen RPB menjadi instrumen penting untuk merealisasikan misi agenda nomor 5. Dokumen ini menyediakan panduan terintegrasi untuk mengelola risiko bencana, termasuk langkah mitigasi, kesiapsiagaan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Melalui RPB, strategi kolaborasi multi-pihak, penguatan infrastruktur berketahanan, serta edukasi kebencanaan dapat terarah dengan baik. Selain itu, RPB memastikan bahwa kebijakan, regulasi, dan tata

kelola bencana mendukung pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara perlindungan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

4) Rancangan Teknokratis RPJMN 2025-2029

Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 mencakup berbagai elemen penting dalam penanggulangan bencana, selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana. RPJMN ini menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan kebijakan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif, sehingga aspek kebencanaan menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan berkelanjutan, bukan hanya respons darurat. Fokus utama RPJMN 2025-2029 mencakup peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini yang lebih efisien, serta pelatihan dan edukasi masyarakat terkait kesiapsiagaan. Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah berupaya mengidentifikasi wilayah paling rentan bencana dan menyusun rencana aksi yang tepat untuk mengurangi dampak serta mempercepat pemulihan. RPJMN juga mendorong sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dengan masukan dari konsultasi publik Bappenas diakomodasi untuk strategi yang lebih efektif. Rancangan ini berperan sebagai landasan strategis dalam membangun ketahanan nasional, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, dengan pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif demi menghadapi tantangan bencana secara lebih baik dan mencapai pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

5) Rancangan Renas PB 2025-2029

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) merupakan penjabaran operasional dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV. Sebagai turunan dari Kebijakan dan Strategi Nasional, Renas PB mencakup isu-isu strategis dan sasaran yang mendukung aksi penanggulangan bencana. Dokumen ini menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, termasuk kementerian dan lembaga, dalam pelaksanaan aksi, alokasi anggaran, serta penyusunan kerangka masterplan pengelolaan risiko bencana di Indonesia. Renas PB disusun berdasarkan kebijakan dan strategi yang merespons isu strategis terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana, bertujuan untuk mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, rencana aksi yang diusulkan memperhatikan isu-isu strategis dalam RPJMN, fokus capaian RIPB, serta hasil identifikasi masalah kebencanaan, yang menjadi prioritas utama dalam mendukung Rencana Penanggulangan Bencana secara menyeluruh.

Tabel 3. 2 Focus Prioritas Renas PB

Fokus Prioritas	Aksi	Indikator
Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana	Sinkronisasi dan harmonisasi Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana	- Adanya perkuatan terhadap posisi strategis kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan daerah
		- Adanya regulasi standar data dan kesamaan variabel dalam rangka penguatan data, informasi, dan literasi bencana
		- Adanya aturan dan mekanisme pengamanan/pemeliharaan infrastruktur vital kebencanaan terutama untuk peralatan peringatan dini
		- Tersusunnya regulasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana
		- Adanya dukungan teknis pengembangan sistem penanggulangan bencana
		- Adanya sistem pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pascabencana
Integrasi pengurangan risiko ke dalam kebijakan penataan ruang	Tersusunnya RPB dan master plan kawasan rawan bencana	- Adanya pemetaan dan analisis risiko bencana
Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	Peningkatan jangkauan akses penyebaran informasi bencana melalui perlengkapan, pemutakhiran, dan standardisasi Data dan Informasi Bencana	- Adanya penguatan data dan peta risiko bencana pada kawasan strategis nasional, industri, dan pariwisata prioritas dengan pendekatan mikrozonasi
		- Terlaksananya dukungan bimtek, pendidikan/pelatihan teknis, dan simulasi PB daerah

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Fokus Prioritas	Aksi	Indikator
	Integrasi pengurangan risiko ke dalam rencana jangka panjang dan menengah nasional dan daerah	- Adanya kebijakan PRB dalam prioritas pembangunan di daerah
		- Meningkatnya alokasi anggaran dan kualitas program kegiatan PB daerah
	Penerapan SPM Sub Urusan Bencana	- Diterapkannya SPM Sub Urusan Bencana oleh pemerintah daerah
		- Diberikannya Bimbingan Teknis pengintegrasian dokumen terkait PB ke dalam dokumen perencanaan dan pembangunan daerah
		- Sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan SPM Sub-Urusan Bencana
Penguatan sarana prasarana pelatihan dan standardisasi kompetensi bidang kebencanaan	Penguatan sarana prasarana pelatihan kebencanaan	- Adanya sarana prasarana pelatihan kebencanaan
		- Adanya standardisasi kompetensi bidang kebencanaan
Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana	Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana	- Adanya peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana
		- Adanya rencana pengelolaan terpadu kawasan pesisir
		- Meningkatnya fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Fokus Prioritas	Aksi	Indikator
		- Integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam RDTR
		- Persyaratan Analisis risiko bencana untuk pembangunan besar
	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana	- Dibangun dan optimalnya ketahanan infrastruktur vital terhadap risiko bencana
		- Terlaksananya normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai
		- Terbangunnya rencana dan pengelolaan risiko bencana pada Destinasi Wisata Prioritas
		- Terbangunnya infrastruktur sistem drainase utama perkotaan (kanal banjir, polder, pompa, dsb)
Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana	Perkuatan sistem peringatan dini terpadu dan tanggap darurat bencana yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat	- Adanya sistem peringatan dini terpadu Multi Ancaman dan data center hidrometeorologi, khususnya banjir, longsor, dan kekeringan
		- Meningkatnya ketangguhan sistem peringatan dini bencana geologi
		- Adanya radio tanggap darurat bencana
		- Adanya sekolah lapangan untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang peringatan dini bencana
Peningkatan Sarana Prasarana Logistik Kebencanaan	Terpenuhinya dan terdistribusinya peralatan PB secara optimal	- Terpenuhinya sarana prasarana penanganan darurat dan pemulihan sosial korban bencana
		- Adanya pembentukan dan pembinaan klaster logistik tingkat daerah

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Fokus Prioritas	Aksi	Indikator
Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Perkuatan ketangguhan bencana berbasis komunitas	- Optimalisasi penerapan Desa Tangguh Bencana dan Keluarga Tangguh Bencana
		- Optimalisasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana - Satuan Pendidikan Aman Bencana

Berdasarkan hal tersebut tentunya arah kebijakan dari RENAS PB 2020-2024 juga merupakan bagian dari terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu “Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”.

3.1.2 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Upaya penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Selatan dipandang perlu untuk lebih diefektifkan lagi, terutama pada tahap pencegahan dengan melibatkan peran serta semua pihak dalam rangka mengurangi resiko bencana, baik jumlah korban jiwa maupun harta benda. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan.

a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan visi yang terkait dengan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan

Visi	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketahanan Bencana	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Pemberdayaan masyarakat tanggap bencana	• Penyediaan dan penyebaran informasi kebencanaan • Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana • Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Visi	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				• Peningkatan kapasitas kelembagaan bencana (Tagana) dalam menghadapi bencana • Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara upaya menjaga keberlanjutan lingkungan demi • Melatih masyarakat dalam mengenali tanda-tanda bahaya hidro-meteorologis dan geofisika sehingga dapat segera memunculkan respons
			Peningkatan kemampuan mitigasi penanggulangan dan penanganan bencana	• Meningkatkan sarana prasarana mitigasi dan pengurangan risiko bencana • Meningkatkan sinergi antar OPD/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana • Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal • Mempercepat pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik

Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan

b) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 6 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan

Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan bencana meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menetapkan daerah rawan bencana sebagai daerah terlarang untuk pemukiman. Selain itu, Pemerintah Daerah juga berwenang mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana, disusunlah rencana aksi pengurangan risiko bencana. Rencana ini berbentuk Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang disusun secara menyeluruh dan terpadu melalui sebuah forum yang mencakup unsur-unsur dari Pemerintah Daerah, pengusaha di daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, akademisi, dan media massa. Rencana Aksi Daerah tersebut kemudian ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana. Rencana ini ditetapkan untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan forum tersebut diatur melalui keputusan gubernur.

3.1.3 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TAPIN

Kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana Kabupaten Tapin yang juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar penanggulangan bencana di tingkat Nasional, yaitu :

- a. pengurangan risiko;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdayaguna dan berhasil guna
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;

- h. pemberdayaan;
- i. nondiskriminatif;
- j. nonproletisi;
- k. kemandirian;
- l. kearifan lokal;
- m. membangun kembali kearah yang lebih baik;
- n. berkelanjutan.

Dan kebijakan-kebijakan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Tapin di regulasikan dalam beberapa peraturan daerah yang ada kaitannya dengan penanggulangan bencana, diantaranya adalah:

a) Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin tahun 2024-2026

Kebijakan program penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan mencakup beberapa aspek penting, seperti ketersediaan data dan informasi terkait jenis serta risiko bencana dalam dokumen sah/legal, edukasi masyarakat mengenai bencana, hingga layanan penanganan darurat. Dalam periode 2019 hingga 2022, beberapa indikator menunjukkan pencapaian maksimal sebesar 100%, seperti penerapan layanan Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana) yang berjalan optimal. Beberapa capaian juga menggambarkan kesiapsiagaan masyarakat dan petugas yang dilatih untuk menghadapi ancaman bencana. Sementara itu, indikator lain seperti penyediaan data informasi menghadapi beberapa penurunan persentase di tahun-tahun tertentu.

Target kebijakan program penanggulangan bencana di masa mendatang (2024-2026) menitikberatkan pada peningkatan efektivitas serta perluasan layanan dan pelatihan. Fokus utama adalah memastikan 100% desa dan kelurahan memiliki sistem mitigasi, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat serta aparatur, dan peningkatan respon cepat terhadap bencana. Selain itu, target anggaran juga direncanakan untuk mendukung berbagai program ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai upaya tersebut, dengan alokasi dana yang signifikan dan penyediaan sarana serta prasarana untuk memastikan kesiapan penanganan bencana yang lebih baik di masa depan.

b) Peraturan daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034

Peraturan daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034 disusun berdasarkan perkembangan pemanfaatan ruang dewasa ini dan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara

berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah yang berkelanjutan.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin dimuat beberapa hal mendasar yang mencakup arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; pengembangan kawasan budidaya, sistem pusat-pusat permukiman, sistem sarana dan prasarana wilayah dan kawasan yang perlu diprioritaskan; kebijakan tata guna tanah, tata guna air, tata guna pesisir, tata guna laut, tata guna udara, tata guna hutan dan tata guna sumber daya alam lainnya serta kebijakan penunjang penataan ruang yang direncanakan yang menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Kesemuanya itu sebagai bagian dari upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Tapin.

3.2 KERANGKA KERJA PENANGGULANGAN BENCANA

3.2.1 PRA BENCANA

Prinsip penyelenggaraan pada tahap pra bencana diantaranya:

1. Partisipasi multipihak;
2. Keadilan;
3. Kesetaraan;
4. Profesionalisme;
5. Kemandirian;
6. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya;
7. Tepat sasaran/efektif;
8. Berinvestasi dalam upaya pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan daerah.

Terdapat 4 (empat) pilihan tindakan dalam tahapan pra bencana, diantaranya:

1. Pencegahan Pencegahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana. Dalam konteks pencegahan, upaya menghilangkan atau mengurangi risiko bencana difokuskan kepada pengelolaan sumber bencana sehingga tidak menimbulkan risiko.
2. Mitigasi Mitigasi adalah serangkaian upaya melalui pembangunan buffer (penghalang) struktur maupun non-struktur sehingga dapat mengurangi risiko bencana karena paparan kejadian bencana tidak sampai ke kerentanan dan kapasitas.
3. Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Oleh karena itu, upaya kesiapsiagaan difokuskan kepada upaya penyelamatan diri atau evakuasi (kepada komunitas) saat terjadi potensi bencana.

4. Pengalihan risiko Pengalihan risiko adalah serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu.

3.2.2 SAAT BENCANA

Berdasarkan Pasal 2 Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Pengutamaan peran aktif pemerintah daerah; dan
2. Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan kabupaten/kota.

Tindakan penanganan darurat bencana meliputi:

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, mencakup kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
2. Penentuan status keadaan darurat bencana;
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;
4. Pemenuhan kebutuhan dasar korban;
5. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
7. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
8. Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana; dan
9. Penetapan struktur organisasi pos komando penanganan darurat bencana.

3.2.3 PASCA BENCANA

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:

1. Membangun partisipasi;
2. Mengedepankan koordinasi;
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Menjaga kesinambungan;
5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan resiko bencana;
7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
8. Mengarusutamakan kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Tindakan pemulihan pasca bencana meliputi:

1. Pengkajian kebutuhan pascabencana;
2. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Pengalokasian sumber daya dan dana;
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Tabel 3. 4 Mandat BPBD Kabupaten Tapin saat Pra Bencana

No	PERAN	MANDAT
1.	KOMANDO	1. pelatihan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan 2. pelatihan mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando. 3. Pelaihtan dalam memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi: a. penyelamatan; b. pengerahan sumber daya manusia; c. pengerahan peralatan; dan d. pengerahan logistik. 4. mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.
2.	KOORDINASI	1. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 2. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana; 3. pengurangan risiko bencana; 4. pembuatan peta rawan bencana; 5. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan geladi/simulasi penanggulangan bencana. 6. Penyusunan Rencana penanggulangan kedaruratan bencana, dan dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi.
3.	IMPLEMENTASI	1. Pelaksanaan kegiatan mitigasi, yaitu: b. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana; c. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan d. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern. 2. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu: a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; e. penyiapan lokasi evakuasi; f. penyusunan data akurat,Sumber : Lokakarya, 2024.

Sumber : Lokakarya, 2024.

Tabel 3. 5 Peran dan Mandat Urusan Penanggulangan Bencana fase Saat bencana /Tanggap darurat

No.	PERAN	MANDAT
1.	KOMANDO	1. mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando. 2. memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi: a. penyelamatan; b. pengerahan sumber daya manusia; c. pengerahan peralatan; dan d. pengerahan logistik. 3. mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.
2.	KOORDINASI	1. penentuan standar kebutuhan minimum; 2. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 3. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana; 4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; 6. mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat menyelamatkan dan melindungi masyarakat.
3.	IMPLEMENTASI	a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya; b. penentuan status keadaan darurat bencana; c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d. pemenuhan kebutuhan dasar; e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Sumber : Lokakarya, 2024.

Tabel 3. 6 Peran dan Mandat Urusan Penanggulangan Fase pasca Bencana

No.	PERAN	MANDAT
1.	KOMANDO	1. Mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk pengalokasian sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang dibutuhkan. 2. Mengaktifkan dan mengelola Pos Komando sebagai pusat koordinasi utama untuk kegiatan pemulihan, memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan rencana pemulihan bencana. 3. Mengawasi dan memonitor jalannya proses pemulihan, termasuk memimpin pengumpulan data dan melakukan evaluasi efektivitas pemulihan yang telah dilakukan. 4. Mengawasi pengembangan sistem kesiapsiagaan dan peringatan dini yang lebih baik, berdasarkan evaluasi dari bencana yang terjadi, untuk meminimalisir risiko di masa mendatang. 5. Memimpin penyusunan laporan resmi terkait kegiatan pemulihan, analisis dampak, dan rekomendasi untuk perbaikan strategi penanggulangan bencana di masa depan.
2.	KOORDINASI	1. Koordinasi pelaksanaan pemulihan pascabencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi), meliputi: 2. Pemulihan pemukiman, pemulihan fisik dan infrastruktur, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial dan budaya, dan 3. pemulihan lintas sektor.
3.	IMPLEMENTASI	1. Penyusunan Kajian kebutuhan pascabencana 2. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 3. pengurangan risiko bencana; 4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; 6. Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. 7. Pelaksana kegiatan pemulihan pasca bencana, pada pemulihan lintas sektor.

Sumber : Lokakarya, 2024.

Tabel 3. 7 Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana Kabupaten Tapin

No.	Perangkat Daerah/Instansi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
1.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin	1. Monitoring Banjir dan Kekeringan Provinsi Kalimantan Selatan	1. Operasional Posko Banjir Provinsi Kalimantan Selatan 2. Tanggap Darurat Bencana Provinsi Kalimantan Selatan	1. Pemeliharaan Rutin Bendungan Tapin
2.	TNI	1. Melakukan patroli dan sosialisasi mengenai area rawan bencana serta langkah-langkah evakuasi kepada masyarakat. 2. Berkoordinasi dengan BPBD untuk mendukung kegiatan latihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana.	1. Mengamankan lokasi bencana dengan mendirikan posko pengamanan untuk mencegah tindakan kriminal atau gangguan keamanan. 2. Mengatur lalu lintas untuk memastikan kelancaran evakuasi dan pengiriman bantuan ke lokasi terdampak. 3. Membantu dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) dan mendukung pengkoordinasian upaya tanggap darurat bencana.	1. Melanjutkan pengamanan di area terdampak untuk mencegah tindak kejahatan seperti pencurian atau penjarahan. 2. Bekerja sama dengan TNI dan dinas terkait dalam memfasilitasi kembalinya masyarakat ke area yang aman dan memantau situasi keamanan secara keseluruhan.
3.	Polres	1. Tetap melaksanakan kegiatan monitoring dan sambang di tengah-tengah masyarakat, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait.	1. Melakukan pengamanan di lokasi bencana, mendirikan posko pengamanan, dan menjaga ketertiban di area pengungsian.	1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPBD, BMKG, dan Dinas Kesehatan untuk evakuasi korban dan mengantisipasi

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Perangkat Daerah/Instansi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
		2. Menghadiri rapat koordinasi untuk perencanaan dan persiapan tanggap bencana. 3. Memberikan informasi awal dan penyuluhan mengenai tindakan segera dalam menghadapi bencana alam melalui Bhabinkamtibmas. 4. Melaksanakan kegiatan deteksi dini dan sambang masyarakat untuk meminimalisir potensi korban bencana. 5. Menghimbau masyarakat, serta memberikan penyuluhan kepada jajarannya dan Bhabinkamtibmas terkait pernyataan kesiapsiagaan dan informasi untuk meningkatkan kewaspadaan. 3. Memastikan kesiapan tempat evakuasi, serta menyiapkan peralatan dan sarana prasarana yang dimiliki untuk keadaan darurat.	2. Mengatur lalu lintas untuk mempermudah evakuasi serta pengiriman bantuan ke area terdampak. 3. Berkoordinasi dengan tim SAR dan BPBD untuk mendukung proses evakuasi dan penyelamatan korban. 4.	kemungkinan bencana susulan. 2. Menyediakan penanganan korban bencana serta memberikan penyuluhan psikologi kepada korban yang membutuhkan. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong untuk membersihkan dan membenahi lokasi terdampak bencana. 3. Melanjutkan penyuluhan dan memberikan dukungan untuk pemulihan kondisi masyarakat serta lingkungan.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Perangkat Daerah/Instansi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana 2. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan simulasi tentang tanggap darurat bencana 3. Penyusunan KRB kab/kota dan RPB 4. Fasilitasi pembaharuan Forum PRB provinsi dan kabupaten/kota 5. Pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi personil BPBD dan masyarakat luas 6. Penyiagaan peralatan tanggap darurat sesuai dengan jenis bencana dominan 7. Pendampingan kab/kota untuk perencanaan penanggulangan bencana prioritas 8. Pembuatan SOP sistem peringatan dini bencana pada kawasan rawan bencana	1. Mengaktifkan Tim Tanggap Darurat untuk koordinasi cepat dalam penanganan bencana, dengan mengacu pada SOP yang sudah disusun. 2. Menyebarkan informasi darurat secara real-time kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap situasi bencana. 3. Bekerja sama dengan TNI, Polres, dan tim SAR untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan korban di area terdampak. Memastikan jalur evakuasi aman dan memadai. 4. Mengkoordinasikan dan mengawasi pendistribusian bantuan seperti logistik, makanan, air bersih, dan kebutuhan darurat lainnya untuk masyarakat terdampak di titik pengungsian. 5. Menyediakan tempat pengungsian yang aman serta	2. Perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana; 3. Pelaksanaan analisa dan study kelayakan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana pada pascabencana; 4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana; 5. Penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana pada pascabencana;

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Perangkat Daerah/Instansi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
			memastikan ketersediaan kebutuhan dasar di tempat pengungsian seperti tempat tidur, sanitasi, dan fasilitas kesehatan.	6. Melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin	1. Pengintegrasian pengurangan bencana risiko dalam perencanaan pembangunan 2. Koordinasi OPD antar dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan bencana 3. Asistensi risiko RPJMD kabupaten/kota untuk integrasi pengurangan risiko bencana rencana pembangunan kab/kota	1. Menyediakan data dan informasi untuk mendukung keputusan cepat dan tepat dalam penanggulangan bencana. 2. Bekerja sama dengan instansi lain untuk mengoordinasikan kebutuhan logistik dan sumber daya. 3. Mensuport dan Mensinkronisasi mengupayakan kebutuhan program Siaga darurat Bencana disesuaikan dengan Prioritas dan kemampuan anggaran darah	Mensuport dan Mensinkronisasi mengupayakan kebutuhan program pascabencana disesuaikan dengan Prioritas dan kemampuan anggaran darah
6.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin	Menganggarkan Dana Penanggulangan bencana Menyiapkan Anggaran Belanja	1. Mengalokasikan dana darurat secara cepat untuk keperluan tanggap bencana.	1. Menghitung kerugian dan mengelola aset daerah yang rusak untuk

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Perangkat Daerah/Instansi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
		Tidak Terduga Asistensi Penyusunan Anggaran terkait Kebencanaan	2. Melacak dan mencatat penggunaan aset dan anggaran untuk keperluan laporan dan pertanggungjawaban.	proses perbaikan dan pemulihan. 2. Melakukan audit keuangan terkait penggunaan dana bencana dan menyusun laporan keuangan. 3. SOP penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana) 4. Rekonsiliasi data/laporan Penggunaan Anggaran Belanja (realisasi fisik dan keuangan) 5. SOP penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana) 6. Rekonsiliasi data/laporan Penggunaan Anggaran Belanja (realisasi fisik dan keuangan)
7.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin	1. Memastikan kebijakan perpajakan memberikan insentif untuk investasi pada langkah-langkah mitigasi bencana.	1. Menyusun kebijakan keringanan pajak bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.	1. Mengkaji potensi penurunan pendapatan daerah akibat bencana dan menyiapkan

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Perangkat Daerah/Instansi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
		2. Mengidentifikasi sumber pendapatan yang rentan terhadap gangguan akibat bencana.	2. Mendukung penanganan bencana melalui pendataan dan pengelolaan data pendapatan daerah.	alternatif solusi pendanaan. 2. Meninjau ulang dan menyesuaikan target pendapatan daerah sesuai dengan situasi pasca bencana.
8.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin	1. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi ASN terkait penanggulangan bencana. 2. Menyusun prosedur darurat untuk pengamanan dan evakuasi pegawai.	1. Mengoordinasikan tenaga kerja ASN yang dilibatkan dalam tanggap darurat bencana. 2. Menyediakan bantuan dan dukungan moral bagi pegawai yang terdampak bencana.	1. Mengidentifikasi kebutuhan SDM untuk pemulihan dan mempercepat proses rekrutmen bila diperlukan. 2. Melakukan evaluasi dan revisi pelatihan untuk meningkatkan respons ASN terhadap bencana.
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin	1. Menggalang dukungan dari organisasi masyarakat dan politik dalam kegiatan mitigasi bencana. 2. Menyusun kebijakan untuk memperkuat kohesi sosial dalam menghadapi ancaman bencana.	1. Mengoordinasikan informasi dengan pemangku kepentingan dan organisasi masyarakat untuk mendukung respons bencana. 2. Menyediakan dukungan psikososial dan mediasi bagi masyarakat terdampak.	1. Membangun kembali harmoni sosial dan mendukung proses rekonsiliasi ekses konflik pasca bencana. 2. Mengawasi distribusi bantuan dari kelompok masyarakat agar tepat sasaran.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Perangkat Daerah/Instansi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
10.	Dinas Perikanan Kabupaten Tapin	- Memberikan pelatihan mitigasi risiko bencana untuk komunitas pelaku usaha perikanan. - Menyusun rencana evakuasi untuk area perikanan.	Mendukung evakuasi pelaku usaha perikanan dan pemindahan sarana dan prasarana perikanan	Membantu pemulihan usaha perikanan yang terdampak., dan Menyediakan bantuan peralatan perikanan bagi pelaku usaha perikanan terdampak.
11.	Dinas Ketahanan dan Pangan Kabupaten Tapin	Mendukung ketersediaan pangan unggulan melalui peningkatan produksi dan produktivitas	Menyediakan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak.	Mendukung ketersediaan pangan unggulan melalui peningkatan produksi dan produktivitas
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Penguatan Literasi perpustakaan tentang kebencanaan berupa elektronik/manual - Melakukan digitalisasi arsip penting untuk perlindungan data. - Menyusun SOP penyelamatan arsip saat bencana.	Melindungi dan menyelamatkan arsip dan dokumen penting.	- Melakukan pemulihan arsip dan dokumen yang rusak. - Mendistribusikan informasi pemulihan pasca bencana melalui perpustakaan baik secara elektronik maupun manual
13.	Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin	- Menjamin ketersediaan alternatif transportasi dan pengaturan lalu lintas - Perencanaan manajemen kelancaran arus lalu lintas,	Mengelola lalu lintas dan menyediakan transportasi darurat.	Mengatur kelancaran arus lalu lintas, dan menyiapkan sarana transportasi darat/laut/udara sebagai alternatif peralihan untuk

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Perangkat Daerah/Instansi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
		dan menyiapkan sarana transportasi merupakan alternatif solusi dalam penanganan bencana darat/laut/udara sebagai alternatif peralihan untuk distribusi logistik		distribusi logistik merupakan alternatif solusi
14.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1. Membantu memberikan bimbingan, koordinasi dan sosialisasi daerah rawan bencana serta pemberian sosialisasi penanggulangan dan penanganan terhadap bencana 2. Membantu merencanakan, mempersiapkan dan mengembangkan pilot proyek pengamanan kesiagaan menghadapi bencana di daerah rawan bencana	1. Mengatur dan mengamankan area terdampak untuk mencegah akses yang tidak perlu, sehingga operasi penyelamatan dapat berlangsung dengan lancar. 2. Menjaga ketertiban di sekitar lokasi bencana agar tidak terjadi kerumunan yang menghalangi akses tim penyelamat.	Membantu pemantauan, pengawasan dan pengecekan kondisi daerah terdampak bencana aman terkendali
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memfasilitasi perencanaan dan penganggaran Mitigasi penanggulangan bencana pada pemerintah desa,	Mendukung evakuasi dan penyaluran bantuan kepada masyarakat desa.	1. Membantu pemulihan sarana prasarana desa yang terdampak. 2. Melakukan pemberdayaan

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Perangkat Daerah/Instansi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
		terutama Desa-desa rawan bencana		masyarakat untuk kesiapan menghadapi bencana.
16.	Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin	1. Menerapkan edukasi tentang bencana di sekolah. 2. Melakukan simulasi bencana untuk siswa dan staf sekolah. 3. Menyediakan tenaga pengajar pada daerah yang terdampak bencana	Mengatur evakuasi siswa dan menyediakan perlindungan di sekolah.	1. Memulihkan kegiatan belajar mengajar dan menyediakan bantuan psikososial. 2. Mengupayakan rehabilitasi gedung sekolah yang terdampak.
17.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin	Menyusun rencana kontinjensi dalam rangka kesiapsiagaan bencana, kegiatannya diantaranya membentuk tim kluster kesehatan dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan, masing-masing tim menyusun rencana kerja, melakukan inventarisasi sumber daya sesuai dengan potensi bahaya yang mungkin terjadi Mensiapsiagakan tim reaksi cepat penanganan bencana, mensiagakan dan menyiapkan logistik yang diperlukan	Berkoordinasi dengan satlak penanggulangan bencana di daerah, menyiapkan tenaga kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan untuk diperbantukan ke lokasi bencana Menghubungi puskesmas di sekitar lokasi bencana untuk mengirimkan tenaga kesehatan yang diperlukan dan ambulans ke lokasi bencana dan RS di Kabupaten untuk menyiapkan penerimaan penderita yang dirujuk dari lokasi bencana, memobilisasi tenaga kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan untuk diperbantukan	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesiapsiagaan bencana, melakukan evaluasi dan analisa dampak bencana terhadap kesehatan lingkungan/KLB, menentukan strategi intervensi berdasar analisis status gizi setelah rapid assesment dilakukan, menyediakan pelayanan kesehatan, pengawasan kualitas air bersih dan sanitasi lingkungan bagi

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Perangkat Daerah/Instansi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
			ke lokasi bencana, melakukan penanggulangan gizi darurat	penduduk di penampungan sementara
18.	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tapin	1. Mengadakan kegiatan pelatihan penanggulangan bencana bagi pemuda. 2. Mendorong partisipasi pemuda dalam simulasi bencana.	Mengorganisir pemuda untuk membantu dalam tanggap darurat.	1. Mengadakan kegiatan pemulihan sosial dan mental untuk pemuda. 2. Mengajak pemuda berpartisipasi dalam pemulihan fasilitas olahraga.
19.	Dinas Sosial Kabupaten Tapin	1. Memberikan informasi dan edukasi potensi dan kesiapsiagaan bencana 2. Berkolaborasi melakukan pemetaan kondisi di lapangan 3. Edukasi evakuasi	Menyalurkan bantuan sosial dan menyediakan tempat penampungan sementara.	Memberikan layanan manajemen psikososial
20.	Dinas Pertanian Kabupaten Tapin	1. Menyusun rencana mitigasi untuk sektor pertanian. 2. Memberikan pelatihan kepada petani tentang tindakan pencegahan.	Mendukung evakuasi ternak dan membantu pemindahan alat pertanian.	1. Membantu pemulihan lahan dan produksi pertanian. 2. Menyediakan bantuan benih dan pupuk bagi petani terdampak.
21.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin	1. Mengidentifikasi situs pariwisata dan budaya yang rawan bencana.	Mendukung evakuasi dan melindungi aset budaya dan pariwisata.	1. Memulihkan dan mempromosikan kembali pariwisata.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Perangkat Daerah/Instansi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
		2. Mengadakan simulasi evakuasi di lokasi wisata dan budaya.		2. Melakukan restorasi pada situs budaya yang terdampak.
22.	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	1. Melakukan normalisasi/restorasi sungai, membangun tanggul sungai/drainase dengan, membangun screen barrier untuk mencegah membuang sampah, melakukan penanaman reboisasi 2. Menyiapkan alat berat eskavator untuk mengevakuasi pohon tumbang/barang lainnya yang mengganggu aliran air banjir	Mendukung perbaikan infrastruktur yang rusak.	Melakukan normalisasi sungai, menyediakan bronjong untuk tanggul sungai
23.	Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertahanan	1. Menyusun kebijakan pemukiman aman bencana. 2. Melakukan pemetaan risiko pada wilayah perumahan.	Mengatur lokasi pengungsian dan menyediakan fasilitas sementara.	1. Mengelola pemulihan perumahan dan membantu rekonstruksi. 2. Memastikan akses perumahan layak bagi korban bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Perangkat Daerah/Instansi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
24.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapin	1. Memberikan edukasi tanggap bencana kepada perempuan dan anak. 2. Melakukan advokasi terkait keamanan perempuan dan anak.	Menyediakan perlindungan dan layanan darurat bagi perempuan dan anak.	1. Menyediakan dukungan psikososial bagi perempuan dan anak. 2. Mendorong partisipasi perempuan dalam proses pemulihan.
25.	Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin	1. Melakukan pemetaan industri yang rentan terhadap bencana. 2. Menyusun kebijakan mitigasi risiko bagi sektor industri.	Mengatur dan mengkoordinasikan keamanan industri.	1. Membantu pemulihan dan pemulihan industri yang terdampak. 2. Mempromosikan produksi berkelanjutan dalam pemulihan.
26.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	1. Perumusan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup 2. Melaksanakan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup;	1. Melakukan penilaian cepat terkait dampak bencana terhadap lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, atau udara akibat tumpahan bahan berbahaya, banjir, atau kebakaran. 2. Mengidentifikasi potensi risiko lingkungan yang memerlukan tindakan segera untuk mengurangi dampak negatif.	Melaksanakan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup;
27.	Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin	Memastikan kesiapan logistik bahan pangan dan kebutuhan	Mengatur distribusi bahan pangan dan kebutuhan pokok bagi warga terdampak	Memfasilitasi pemulihan akses pasar dan distribusi

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Perangkat Daerah/Instansi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
		pokok di daerah rawan bencana		logistik untuk pemulihan ekonomi.
28.	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Tapin	Menyediakan insentif bagi usaha yang berinvestasi dalam teknologi mitigasi bencana.	Menyediakan layanan perizinan darurat bagi kegiatan penanggulangan bencana.	Mendukung investasi dalam pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana.
29.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin	1. Membantu penyebarluasan Informasi mengenai edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan bencana untuk mengurangi dampak risiko pada saat terjadinya bencana (Mitigasi Bencana). Misalnya bencana banjir yaitu sosialisasi mengenai pembersihan sungai, penyediaan perahu dan pembuatan siring. 2. Membantu Penyebarluasan informasi Apel kesiapsiagaan bencana. 3. Membantu penyebarluasan informasi kegiatan Rapat Koordinasi perubahan musim dan dampak bencananya, misalnya pada	1. Membantu penyebarluasan Informasi kepada masyarakat perihal kondisi saat terjadinya bencana. 2. Penyediaan jaringan penguat sinyal dilokasi terdampak bencana (Khusus Diskominfo Kab. Tapin sudah mempunyai jaringan internet starlink/Vsat).	1. Membantu penyebarluasan informasi kepada masyarakat dari pihak berwenang seperti BPBD atau Basarnas mengenai kondisi pada saat sesudah terjadinya bencana, misalnya informasi perihal penyediaan tempat pengungsian, dapur umum, data korban bencana baik harta maupun jiwa. 2. Penyediaan jaringan penguat sinyal dilokasi terdampak bencana

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

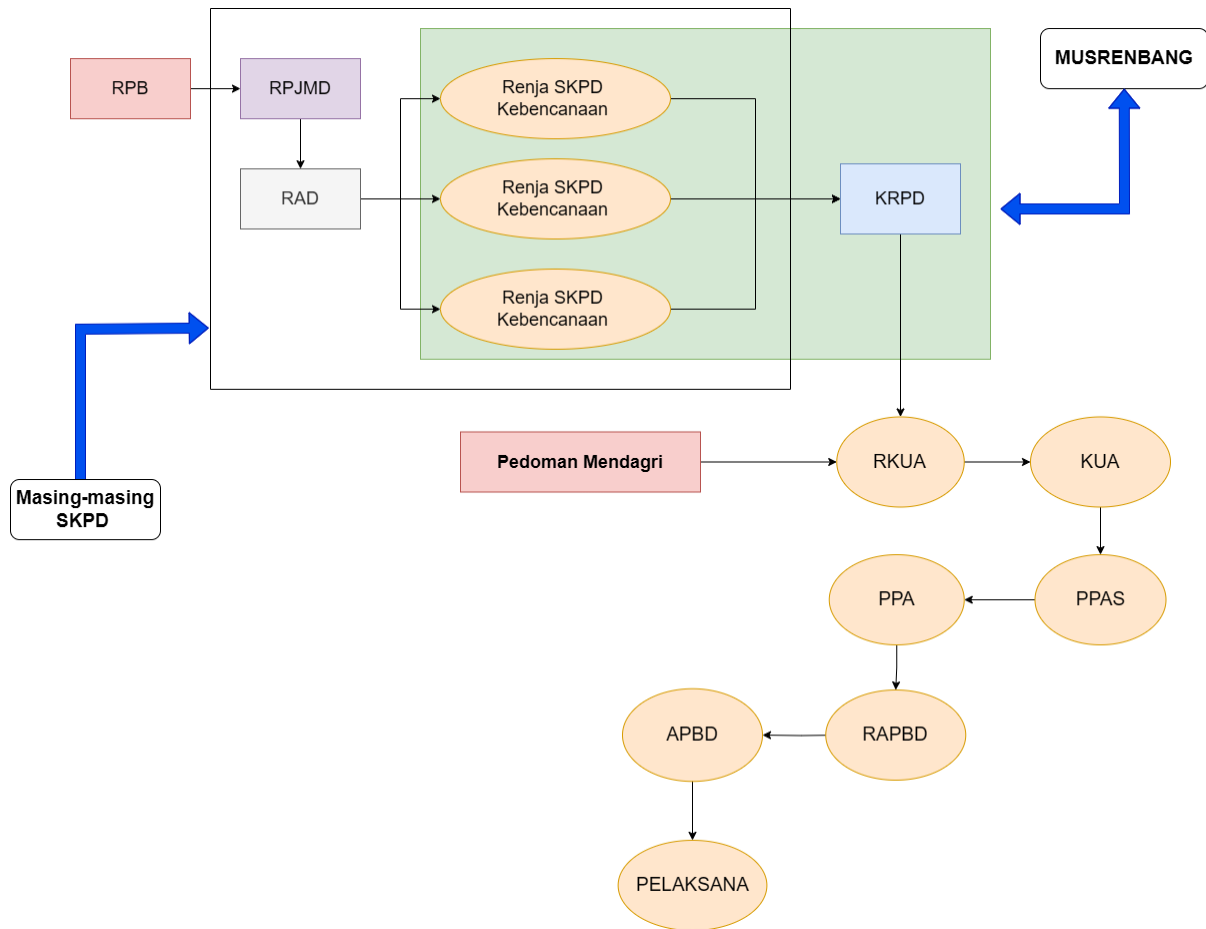
No.	Perangkat Daerah/Instansi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
		saat musim hujan kemungkinan bencana yang terjadi adalah tanah longsor dan banjir, dan pada saat musim kemarau kemungkinan bencana yang terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan.		
30.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin	Menyusun pelatihan untuk tenaga kerja terkait keselamatan kerja dalam kondisi darurat.	Menyediakan tenaga kerja sukarela untuk membantu upaya tanggap darurat.	Memfasilitasi program pemulihan ekonomi untuk pekerja yang terdampak.
31.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Pelaksana tugas tambahan pemetaan daerah daerah rawan dan berisiko bencana dengan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) 2. Menyiapkan infrastruktur dan personil untuk penyediaan layanan pencetakan ulang dokumen adminduk bagi korban bencana	Menyiagakan infrastruktur dan personil untuk penyediaan layanan pencetakan ulang dokumen adminduk bagi korban bencana	Melaksanakan layanan pencetakan ulang dokumen adminduk bagi korban bencana

Sumber : Lokakarya, 2024.

3.3 PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Mekanisme pengajuan anggaran kegiatan kebencanaan di SKPD mengikuti ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan prosedur sebagai berikut:

- a) BPBD menyusun RPB (lima tahunan)
- b) Program dan Pilihan Tindakan dalam RPB dituangkan ke dalam bentuk Kegiatan Sektoral pada RAD (tiga tahunan)
- c) Dikoordinir oleh BPBD, SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) Kebencanaan SKPD yang merupakan penjabaran dari kegiatan yang tercantum dalam RAD yang dipilih (dari rencana kegiatan tiga tahunan) berdasar pertimbangan:
 - 1) Tingkat urgensi dari kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran bersangkutan.
 - 2) Merupakan kegiatan yang bersifat sekuensial terhadap kegiatan berikutnya
 - 3) Ketersediaan dana
 - 4) Renja SKPD memuat Kegiatan Kebencanaan dari SKPD bersangkutan (selain kegiatan utamanya)
- d) Renja SKPD dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi (Musrenbang)
- e) Musrenbang Tingkat Provinsi menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (yang di dalamnya memuat Kegiatan Kebencanaan SKPD)
- f) Berdasar RKPD, Pemda kemudian menyusun Rencana Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) yang kemudian dibahas di DPRD dan disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
- g) Berdasar KUA yang telah disepakati DPRD, disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang setelah dibahas di DPRD dan disepakati maka disahkan menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
- h) Berdasar PPA, masing-masing SKPD menyusun ulang kegiatan-kegiatan (termasuk kegiatan kebencanaan) untuk digabung bersama SKPD lainnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
- i) RAPBD dibahas di Panitia Anggaran DPRD dan setelah disetujui, kemudian disahkan sebagai APBD tahun bersangkutan
- j) Berdasar APBD, SKPD membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
- k) Berdasar DPA, SKPD melaksanakan kegiatan menggunakan dana yang tersedia dalam APBD dengan mengikuti prosedur administrasi keuangan daerah yang berlaku.



Gambar 3. 1 Bagan Alir APBD Kebencanaan

1) Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pascabencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah. dicatat dalam

APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

2) Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BPNB dan/atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

a. Penggunaan Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Ketentuanyang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi (1) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana, (2) program pengurangan risiko bencana, (3) program pencegahan bencana, (4) penyusunan analisis risiko bencana, (5) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang, (6) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan, (7) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- b. Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi: (1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain, (2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan, (3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan,

pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

b. Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi: (1) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; (2) dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan (3) dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan. Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi: (1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; (2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; (3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana; (4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan (5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk (1) pencarian dan penyelamatan korban bencana; (2) pertolongan darurat; (3) evakuasi korban bencana; (4) kebutuhan air bersih dan sanitasi; (5) pangan; (6) sandang; (7) pelayanan kesehatan; dan (8) penampungan serta tempat hunian sementara. Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP).

Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

c. Penggunaan Dana Pascabencana

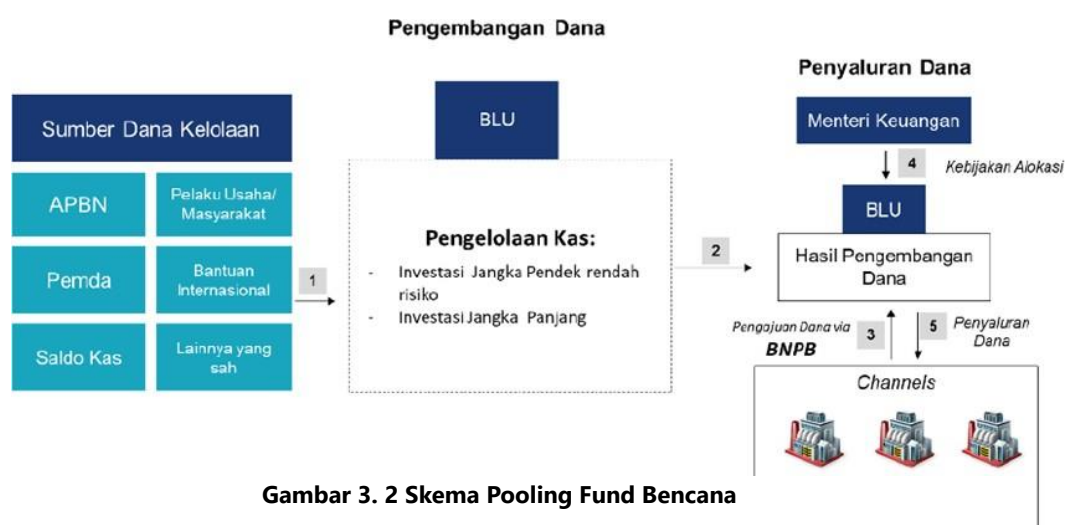
Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

1. Kegiatan Rehabilitasi, meliputi: (1) perbaikan lingkungan daerah bencana; (2) perbaikan prasarana dan sarana umum; (3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; (4) pemulihan sosial psikologis; (5) pelayanan kesehatan; (6) rekonsiliasi dan resolusi konflik; (7) pemulihan sosial ekonomi budaya; (8)

- pemulihan keamanan dan ketertiban; (9) pemulihan fungsi pemerintahan; atau (10) pemulihan fungsi pelayanan publik.
2. Kegiatan rekonstruksi, meliputi: (1) pembangunan kembali prasarana dan sarana; (2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; (3) membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; (4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; (4) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat; (5) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; (6) peningkatan fungsi pelayanan public; atau (7) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
 3. Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.
 4. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

Selain itu Pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD untuk tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan c.q Badan Kebijakan Fiskal telah menyusun Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB). Strategi ini merupakan kombinasi dari instrumen-instrumen keuangan untuk mendapatkan skema pendanaan risiko bencana yang memadai, tepat waktu dan sasaran, efektif, berkelanjutan, dan transparan.

Adapun salah satu instrumen utama dalam Strategi PARB adalah skema Pooling Fund Bencana, yakni sebuah skema mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus



Gambar 3. 2 Skema Pooling Fund Bencana

bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana. Berikut ini merupakan skema Pooling Fund Bencana:

Berdasarkan fase bencana, sumber pendanaan dapat dialokasikan sebagai berikut:

1) Sumber Pendanaan Fase Pra Bencana

Pada tahap pra bencana, pemerintah pusat menyediakan dana kontinjensi sebagai cadangan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu. Selain itu, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022, Dana Desa dapat dialokasikan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Desa.

2) Sumber Pendanaan Fase Tanggap Darurat

Pemerintah pusat dan daerah melalui anggaran BNPB dan BPBD menyiapkan dana siap pakai dan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat.

3) Sumber Pendanaan Pascabencana

Pemerintah pusat dan daerah, melalui anggaran BNPB dan BPBD, menyiapkan dana siap pakai dan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat. Sumber pendanaan ini diatur dalam Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2020, yang menetapkan bahwa pemberian bantuan dana siap pakai dalam negeri didasarkan pada:

- Penetapan status keadaan darurat bencana oleh bupati/walikota, gubernur, atau presiden.
- Penetapan status keadaan tertentu.
- Pertimbangan risiko bencana dengan dampak yang luas, ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Kepala Daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, non-alam, bencana sosial, termasuk konflik sosial atau kejadian luar biasa, sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan penetapan status Kepala Daerah dan/atau dokumen lain yang sesuai dengan ketentuan, Kepala SKPD yang memerlukan dana sesuai tugas dan fungsinya mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
3. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan, paling lambat 1 hari kerja setelah menerima rencana kebutuhan belanja.

Kemudian, bantuan sosial pada fase pascabencana merupakan bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Prosedur pengajuan bantuan sosial oleh pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dengan kategori pengajuan bantuan sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan. Untuk pengajuan bantuan sosial yang tidak direncanakan, dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Disamping anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari anggaran pemerintah (APBN/APBD), penanggulangan bencana daerah ini juga dapat dihimpun melalui hibah, donasi, Corporate Social Responsibility (CRS) maupun dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat seperti pooling fund bencana.

Optimalisasi penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024. Klasifikasi belanja dalam Dana Desa terdiri atas lima hal, salah satunya adalah **Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa**. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel. Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Prosedur penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah Musyawarah Desa, di mana penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dianggap sebagai hal strategis yang harus dibahas dan disepakati. Musyawarah Desa mencakup pencermatan ulang RPJMDes, evaluasi RKPDes tahun sebelumnya, penyusunan prioritas tahun berikutnya, dan pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. Hasil kesepakatan musyawarah ini dituangkan dalam berita acara yang menjadi pedoman penyusunan RKP Desa.
2. Tahap kedua adalah persiapan penyusunan rancangan RKP Desa, di mana Kepala Desa mempedomani hasil musyawarah Desa untuk memastikan bahwa kegiatan yang dibiayai Dana Desa dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa, program yang dibiayai APBD dan APBN, serta data tipologi Desa. Tim Penyusun RKP Desa mendalami berita acara musyawarah, pagu indikatif, program pembangunan,

data tipologi Desa, dan tata cara penetapan prioritas yang terpadu dengan program-program tersebut.

3. Tahap selanjutnya adalah penyusunan rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam rancangan RKP Desa. Berdasarkan hasil musyawarah dan data yang telah dikumpulkan, Kepala Desa dan Tim Penyusun RKP Desa menyusun prioritas kegiatan. Kegiatan ini dinilai berdasarkan kemanfaatan, partisipasi masyarakat, swakelola dan penggunaan sumber daya Desa, keberlanjutan, prakarsa inovasi Desa, serta pengawasan yang transparan dan akuntabel.
4. Tahap keempat adalah penetapan rencana prioritas penggunaan Dana Desa. Kepala Desa, dengan Tim Penyusun RKP Desa, menyusun daftar prioritas kegiatan dan rencana anggaran biaya. Daftar ini disosialisasikan kepada masyarakat dan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Hasil musyawarah tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa, yang harus dipatuhi oleh Kepala Desa dan BPD saat menyusun APB Desa.
5. Tahap kelima adalah penyusunan rancangan APB Desa. Kepala Desa menyusun pembiayaan kegiatan sesuai RKP Desa dan dilarang mengubah daftar kegiatan secara sepihak. Rancangan APB Desa harus disosialisasikan kepada masyarakat, dan masyarakat berhak mengajukan keberatan jika rancangan penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa. Jika terjadi perubahan, BPD harus menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mencapai kesepakatan.
6. Tahap terakhir adalah proses penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ke Bupati/Wali Kota. Kepala Desa harus memastikan bahwa rancangan tersebut diterima oleh masyarakat Desa, dengan melibatkan musyawarah dan diskusi yang transparan untuk mencapai kesepakatan bersama.

BAB TUJUAN, SASARAN, STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM



Kabupaten Tapin berada pada kawasan rawan bencana, memerlukan implementasi kebijakan pembangunan penanggulangan bencana. Pelaksanaan kebijakan ini berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMD Kabupaten Tapin. Kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana Kabupaten Tapin yang juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan mempermudah kabupaten Tapin untuk mendapatkan akses bantuan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional.

Penyelarasan program perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui 7 (tujuh) Kegiatan Penanggulangan Bencana yaitu (1) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan; (2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu; (3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik; (a) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; (5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; (6) Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan (7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Isu Strategis sebagaimana yang telah dirumuskan pada Bab sebelumnya, selanjutnya perlu dirumuskan Tujuan, Sasaran (Outcome) dan Indikator Sasaran berikut akan menjelaskan Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 Kabupaten Tapin:

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tapin

No	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)
1	Pengelolaan Tata Guna Lahan untuk Mengurangi Risiko Banjir dan Kekeringan	Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Tapin Berbasis Pengurangan Risiko Bencana	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Tapin	Terlaksananya pengelolaan lahan yang sesuai dengan perencanaan bencana	- Persentase penurunan risiko banjir dan kekeringan di area rawan - Jumlah program mitigasi berbasis tata guna lahan yang diimplementasikan
2	Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana			Terwujudnya masyarakat yang tanggap dan siap menghadapi bencana	- Jumlah pelatihan kesiapsiagaan bencana yang diadakan - Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam simulasi bencana
3	Peningkatan Infrastruktur Drainase dan Irigasi untuk Menghadapi Curah Hujan Ekstrem			Terbangunnya sistem drainase dan irigasi yang mampu menampung curah hujan tinggi	- Jumlah proyek drainase dan irigasi baru yang dibangun - Penurunan frekuensi banjir di area terdampak setelah peningkatan infrastruktur
4	Pengembangan Infrastruktur Mitigasi Bencana			Terwujudnya infrastruktur mitigasi bencana	- Jumlah embung dan fasilitas penampungan air yang dibangun per tahun - Kapasitas penampungan air yang meningkat (m³)
5	Penguatan Regulasi dan Koordinasi Lintas Sektor untuk Penanggulangan Bencana yang Efektif			Terjalinnnya koordinasi lintas sektor yang efektif dan kebijakan yang kuat	- Jumlah kebijakan baru yang diterbitkan terkait penanggulangan bencana - Frekuensi pertemuan koordinasi lintas sektor - Peningkatan IKD

Tujuan utama " **Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Tapin Berbasis Pengurangan Risiko Bencana** " mencerminkan visi untuk menciptakan masyarakat yang kuat, mandiri, dan siap menghadapi berbagai risiko bencana. Hal ini diwujudkan melalui pengelolaan risiko bencana yang terintegrasi, dengan pendekatan strategis terhadap lima isu utama: tata guna lahan, penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan infrastruktur, pengembangan fasilitas mitigasi, dan penguatan regulasi lintas sektor.

Keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator utama berupa peningkatan **Indikator Ketahanan Daerah (IKD)**, yang menjadi salah satu Key Performance Indicator (KPI) Kepala Daerah. Peningkatan IKD mencerminkan keberhasilan upaya mitigasi bencana di Kabupaten Tapin. Untuk memastikan keberlanjutan pencapaian ini, target peningkatan IKD akan dirancang secara bertahap setiap tahun, sehingga implementasi strategi dapat terukur dan terarah sesuai prioritas pembangunan. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh upaya mitigasi bencana di Kabupaten Tapin tidak hanya memperkuat kesiapan masyarakat, tetapi juga mendukung tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh upaya mitigasi bencana di Kabupaten Tapin tidak hanya memperkuat kesiapan masyarakat, tetapi juga mendukung tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan dan terintegrasi. Untuk tujuan 5 diukur berdasarkan capaian Indikator Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Tapin untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Proyeksi Capaian IKD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

BASELINE IKD		PROYEKSI CAPAIAN IKD				
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0,56	0,58	0,60	0,63	0,66	0,70	0,74

Sumber: Hasil Rencana,2024

Tabel tersebut menggambarkan peningkatan **Indikator Ketahanan Daerah (IKD)** dari tahun 2023 hingga 2029. Peningkatan nilai IKD ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons bencana di daerah semakin efektif. Semakin tinggi nilai IKD, berarti **kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat, serta memulihkan kondisi pasca-bencana semakin kuat**. Hal ini menjadi indikator penting dalam memastikan bahwa strategi pengurangan risiko bencana berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

4.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Potensi bencana yang tinggi pada dasarnya tidak hanya sekedar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas untuk suatu wilayah, namun merupakan kontribusi beberapa permasalahan lain sehingga meningkatkan kerentanan. Sebelum melakukan analisa risiko dan menentukan metode dan teknik yang akan digunakan dalam pengurangan risiko bencana, perlu dibangun kriteria dan kondisi sebagai berikut:

1. Adanya komitmen politik untuk melakukan tindakan pengurangan risiko bencana sebagai suatu keharusan.
2. Harus ada peluang realistis bahwa hasil dari analisis risiko dapat diimplementasikan dan diterapkan, dengan sumber daya yang tersedia atau mampu dimobilisasi. Hasil analisis risiko harus dipertimbangkan kesesuaiannya dengan rencana kebijakan lain, seperti rencana tata ruang.
3. Kontribusi terhadap kepemilikan bersama dan inisiatif personal atas proses, hasil, serta penggunaannya.
4. Analisis risiko dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dan dalam konteks berbeda. Harus ada kejelasan sasaran produk tersebut, apakah untuk masyarakat, lembaga teknis, lembaga keuangan, atau pengambil kebijakan.
5. Adanya perhatian dan kejelian dalam mengumpulkan data, sehingga data yang ada berkontribusi pada tujuan penyelenggaraan analisis risiko yang dimaksudkan. Aspek kajian risiko suatu wilayah sangat diperlukan sebagai landasan penyusunan strategi pengurangan risiko bencana, meliputi:
 - a. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi: Pengelolaan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan stakeholders di semua sektor secara terpadu. Kerjasama ini memastikan penanganan terintegrasi sesuai rencana. Pemerintah dan lembaga donor non-pemerintah juga dituntut untuk mewujudkan sinkronisasi, dengan prioritas pada kegiatan penyelamatan jiwa.
 - b. Transparansi dan Akuntabilitas: Semua kegiatan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum, sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
 - c. Berdayaguna dan Berhasil Guna: Kegiatan penanggulangan bencana harus berdaya guna dan berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
 - d. Kemitraan dan Pemberdayaan: Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberdayakan struktur pemerintahan yang ada secara optimal, mulai dari tingkat kecamatan, desa/kelurahan/dusun/RW-RT, hingga kelompok-kelompok masyarakat (termasuk organisasi profesi). Kemitraan juga dilakukan dengan Lembaga Non-Pemerintah dan Perguruan Tinggi.
 - e. Nondiskriminatif dan Nonproselitisme: Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah harus memastikan bahwa penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, atau aliran politik. Selain itu, dilarang menyebarkan agama atau keyakinan saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat.

Berikut tabel yang menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tapin 2025 – 2029:

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Tabel 4. 3 Strategi arah kebijakan

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran (dampak)	Arah Kebijakan
1	Pengelolaan Tata Guna Lahan untuk Mengurangi Risiko Banjir dan Kekeringan	Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Tapin Berbasis Pengurangan Risiko Bencana	Terlaksananya pengelolaan lahan yang sesuai dengan perencanaan bencana	• Implementasi zonasi berbasis risiko bencana	• Persentase penurunan risiko banjir dan kekeringan di area rawan	• Penerapan kebijakan penggunaan lahan yang berkelanjutan
				• Rehabilitasi lahan kritis	• Jumlah program mitigasi berbasis tata guna lahan yang diimplementasikan	• Penegakan regulasi tata guna lahan
2	Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana		Terwujudnya masyarakat yang tanggap dan siap menghadapi bencana	• Peningkatan frekuensi pelatihan dan simulasi bencana	• Jumlah pelatihan kesiapsiagaan bencana yang diadakan	• Penyusunan modul pelatihan yang komprehensif
				• Program edukasi dan sosialisasi	• Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam simulasi bencana	• Kerja sama dengan organisasi lokal untuk pelatihan

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran (dampak)	Arah Kebijakan
3	Peningkatan Infrastruktur Drainase dan Irigasi untuk Menghadapi Curah Hujan Ekstrem		Terbangunnya sistem drainase dan irigasi yang mampu menampung curah hujan tinggi	• Perluasan jaringan drainase dan perbaikan saluran irigasi	• Jumlah proyek drainase dan irigasi baru yang dibangun	• Optimalisasi anggaran pembangunan infrastruktur
				• Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam konstruksi	• Penurunan frekuensi banjir di area terdampak setelah peningkatan infrastruktur	• Integrasi teknologi dalam pembangunan sistem drainase
4	Terwujudnya infrastruktur mitigasi bencana		Terwujudnya infrastruktur mitigasi bencana	• Pembangunan embung dan bendungan skala kecil	• Jumlah embung dan fasilitas penampungan air yang dibangun per tahun	• Pembangunan fasilitas air yang terintegrasi
				• Pengelolaan air hujan melalui teknologi penampungan	• Kapasitas penampungan air yang meningkat (m³)	• Pemeliharaan rutin infrastruktur penyimpanan air

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran (dampak)	Arah Kebijakan
5	Penguatan Regulasi dan Koordinasi Lintas Sektor untuk Penanggulangan Bencana yang Efektif		Terjalannya koordinasi lintas sektor yang efektif dan kebijakan yang kuat	• Penyusunan regulasi baru berbasis kolaborasi antar sektor	• Jumlah kebijakan baru yang diterbitkan terkait penanggulangan bencana	• Penyelarasan peraturan dengan standar internasional
				• Pembentukan forum komunikasi reguler antar instansi	• Frekuensi pertemuan koordinasi lintas sektor	• Memperkuat hubungan antar lembaga terkait
				• Penyusunan pedoman dan pelatihan untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) berbasis kolaborasi antar sektor secara terintegrasi	• Peningkatan IKD	• Mendorong optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kapasitas SDM lintas sektor untuk mendukung IKD

4.3. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Selatan menjadi landasan bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil tindakan untuk mengurangi risiko bencana di Kabupaten Tapin. Fokus kegiatan dirancang berdasarkan KRB wilayah, tingkat ketahanan daerah, dan pelajaran dari pengalaman daerah lain, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Tapin. Penyusunan program RPB Kabupaten Tapin juga harus selaras dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB). Sinkronisasi ini bertujuan untuk mengevaluasi ketercapaian program nasional dan mempermudah Kabupaten Tapin dalam memperoleh akses bantuan guna mendukung pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional.

Seluruh program yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana berpedoman pada komponen-komponen pengelolaan bencana, yang mencakup antara lain:

1. Kesiapsiagaan

Program kesiapsiagaan dimaksudkan untuk mengkaji risiko terhadap suatu bencana, perencanaan dalam menghadapi bencana, penataan dalam pengelolaan bencana serta pelatihan untuk peningkatan kapasitas masyarakat rentan dan pengampu kebencanaan. Program yang terkait dengan kesiapsiagaan adalah:

- a. Perluasan dan Peningkatan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan.
- b. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- c. Pendidikan Menengah.
- d. Manajemen Pelayanan Pendidikan.
- e. Upaya Pelayanan Kesehatan.
- f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
- g. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
- h. Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan.
- i. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
- j. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- k. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.
- l. Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

2. Pencegahan-mitigasi

Program pencegahan-mitigasi dilakukan ketika kondisi normal dan dimaksudkan untuk engurangan risiko, kerentanan dan ancaman. Programprogram yang termasuk dalam mitigasi adalah:

- a. Peningkatan Perencanaan Tata Ruang.
- b. Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pelayanan dalam Penataan Ruang.
- c. Pengelolaan Lingkungan.
- d. Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Penguatan dan Dukungan Penanganan Permasalahan Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- f. Fasilitasi Pengembangan Masyarakat.

- g. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
 - h. Pengendalian Banjir.
 - i. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
 - j. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - k. Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan
 - l. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya.
 - m. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.
 - n. Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan.
 - o. Perbaikan Gizi Masyarakat.
 - p. Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya
- 3. Penanganan tanggap darurat Program tanggap darurat merupakan rangkaian tindakan pasca bencana yang berkaitan dengan penanganan/penyelamatan korban, penyelamatan aset, penyediaan kebutuhan dasar dan pencegahan dampak yang lebih luas. Program-program tersebut adalah:**
- a. Penanggulangan Bencana.
 - b. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
 - c. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
 - d. Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - e. Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan.
- 4. Rehabilitasi Program dalam rehabilitasi dimaksudkan untuk pemulihan kondisi korban dari trauma, pemulihan sarana/ prasarana kehidupan hingga keadaan berangsur kembali ke keadaan normal. Program-program yang termasuk dalam rehabilitasi adalah:**
- a. Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial.
 - b. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan.
 - c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan.
 - e. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
 - f. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.
 - g. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
 - h. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
 - i. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
 - j. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
 - k. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Pokok program dalam pengelolaan bencana tersebut, selain berpijak pada kemampuan pengampu dalam pengelolaan bencana juga dikembangkan pada arah penggunaan teknologi yang berguna untuk peringatan dini, pengurangan ancaman dan penyebaran informasi ketika terdapat ancaman bencana.

Keterpaduan antara kemampuan masyarakat dalam mengelola bencana dan pemanfaatan teknologi dalam pengurangan ancaman merupakan langkah yang efektif agar dampak bencana dapat dibatasi secara signifikan. Selain itu, program pembangunan yang berfokus pada peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat berdampak pada pengurangan kerentanan sekaligus peningkatan kapasitas. Masyarakat yang semakin berdaya dengan tingkat perekonomian yang memadai akan memiliki akses lebih luas dalam pengelolaan bencana sehingga akan menurunkan risiko bila terjadi bencana.

BAB RENCANA AKSI DAERAH



Rencana aksi merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah dirumuskan berdasarkan analisis permasalahan pokok penanggulangan bencana yang ada di daerah, baik permasalahan spesifik untuk tiap-tiap jenis bencana, maupun permasalahan generik berdasarkan indikator ketahanan daerah maupun analisis isu-isu strategis perencanaan pembangunan terkait penanggulangan bencana.

5.1. RUMUSAN RENCANA AKSI

Rumusan rencana aksi merupakan diturunkan berdasarkan permasalahan penanggulangan bencana daerah, isu strategis, tujuan, dan sasaran, penanggulangan bencana. Berdasarkan hal tersebut, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran:

1. Melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya; dan
2. Bersama dengan pemangku kepentingan berkolaborasi mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing.

Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan memperhatikan:

1. Karakteristik kebencanaan daerah.
2. Harmonisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, dan RPJMD Kabupaten Tapin.
3. Keterlibatan Institusi.
4. Penganggaran.

Risalah Rencana Aksi adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Tabel 5.1. Rencana Aksi PB Kabupaten Tapin 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis 1: Pengelolaan Tata Guna Lahan untuk Mengurangi Risiko Banjir dan Kekeringan																		
Program 1: Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berbasis mitigasi bencana																		
1. Penguatan penerapan dan pengawasan tata ruang berbasis kajian risiko bencana	Penertiban dan penegakan hukum bagi pelanggar tata ruang dan lingkungan	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang	1 03 12 2.04 0004	Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang	Dokumen	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Satpol PP, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 03 12 2.04 0006	Terlaksananya Audit Tata Ruang	Kasus	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Satpol PP, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 03 12 2.04 0007	Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Kasus	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Satpol PP, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 03 12 3.06 0001	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Satpol PP, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				1 03 09 2.01 0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan	Dokumen	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Satpol PP, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 05 02 2.02 0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Utama: Satpol PP Pendukung: Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 05 02 2.02 0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Utama: Satpol PP Pendukung: Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
		Pembuatan sistem dan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pelanggaran tata ruang dan lingkungan	Adanya sistem dan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terpadu yang melibatkan semua unsur di	1 03 09 2.01 0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			1	100								Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BAPPEDA, BPBD, Satpol PP, Kecamatan, Desa

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
			pemerintahan dan masyarakat	1 03 12 2.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang	Dokumen			1	100							Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BAPPEDA, BPBD, Satpol PP, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
		Pemberian PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) sesuai dengan rencana tata ruang yang mempertimbangkan risiko bencana	Adanya syarat-syarat pemberian PBG yang mempertimbangkan kajian risiko bencana dan kajian dampak lingkungan	1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
		1 03 08 2.01 0022 Pengawasan dan penindakan	Teridentifikasi bangunan gedung yang tidak memiliki PBG dan tidak	1 03 08 2.01 0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Orang	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, BPBD,	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
		bangunan yang tidak sesuai PBG dan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang)	sesuai dengan RRTR														Kecamatan, Desa	
				1 03 09 2.01 0007	Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 05 02 2.02 0004	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	Utama: Satpol PP Pendukung: Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 05 02 2.02 0007	Terlaksananya Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	Utama: Satpol PP Pendukung: Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
2. Penerapan dan peningkatan fungsi informasi penataan	Adanya sistem informasi penataan ruang yang dapat	Pembangunan media informasi penataan ruang yang dapat diakses	Tersedianya media informasi penataan ruang yang bisa di akses	1 03 12 2.01 0007	Tersampainya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Publikasi			1	150	1	150					Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Perkim, BPBD,	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
ruang daerah untuk pengurangan risiko bencana	dimanfaatkan dalam pengurangan risiko bencana	publik untuk pengurangan risiko bencana	oleh masyarakat untuk pemanfaatan pengurangan risiko bencana														Kecamatan, Desa	
				2 16 02 2.01 0006 Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Dokumen			1	150	1	150					Utama: Dinas Kominfo Pendukung: Bappeda, Dinas Perkim, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
3 Penataan dan pengendalian permukiman di sempadan dan bantaran sungai rawan bencana	Adanya penataan kawasan sungai dalam pengendalian risiko banjir dan banjir bandang	Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Terlaksananya peningkatan dan pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan dan pengurangan risiko bencana	1 03 12 2.01 0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Tersampainya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Orang			100	100							Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Perkim, BAPPEDA, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 03 12 2.02 0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	Dokumen			1	100							Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Perkim, BAPPEDA, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
		Penataan bangunan di wilayah rawan bencana yang tidak sesuai RRTR/RTRW serta tidak memiliki PBG	Terlaksananya penataan bangunan yang berada pada wilayah rawan bencana	1 03 09 2.01 0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Satpol PP, Dinas Kominfo, Dinas LH, Dinas Perkim, BAPPEDA, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 05 02 2.02 0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	Utama: Satpol PP Pendukung: Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 05 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	Utama: Satpol PP Pendukung: Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
		Koordinasi lintas sektor dalam penataan dan pengawasan permukiman di sempadan dan bantaran sungai	Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam penataan dan pengendalian permukiman yang rawan terdampak risiko bencana	1 03 09 2.01 0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Satpol PP, Dinas Kominfo, Dinas LH, Dinas Perkim, BAPPEDA, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
				1 03 12 2.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang	Dokume n	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Satpol PP, Dinas Kominfo, Dinas LH, Dinas Perkim, BAPPEDA, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
Isu Strategis 2: Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana																		
Program 2 : Peningkatan Pengelolaan Pencegahan dan Mitigasi Risiko Bencana																		

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
4.Penerapan Sumur Resapan dan Biopori	Terbangunnya a sumur resapan dan/atau biopori dalam mengurangi frekuensi dan dampak bencana banjir	Peningkatan pembangunan sumur resapan dan/atau biopori pada wilayah permukiman dan perkantoran berisiko banjir tinggi	Terlaksananya pembangunan sumur resapan dan/atau biopori pada wilayah permukiman dan perkantoran	1 03 02 2.01 0077 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen			1	100			1	100			Utama: Dinas PUPR Pendukung: BWS Provinsi, BKSDA Provinsi, Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Sungai Tapin Sungai Tapin Kecamatan Bungur: Desa Banua Padang, Banua Padang Hilir, Bungur, Bungur Baru, Hangui, Kalumpang, Linuh, Paring Guling, Rantau Bujur, Shabah, Timbun; Kecamatan Piani: Balawaian, Batu Ampar, Batung, Buniin Jaya,

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
																		Harakit, Miawa, Pipitak Jaya, Kecamat an Salam Babaris: Salam Babaris, Kecamat an Tapin Tengah: Manduri an, Tirik; Kecamat an Tapin Utara: Antasari Hilir, Kupang

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
5.Normalisasi/ Restorasi sungai	Pengembalian fungsi alami sungai dan peningkatan kapasitas sungai dalam mengurangi frekuensi dan luasan bencana banjir	Normalisasi/Restorasi sungai pada wilayah rawan banjir	Terlaksananya normalisasi/restorasi sungai dalam rangka mengurangi dampak banjir	1 03 02 2.01 0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	KM	5	5500	5	5500	5	5500	5	5500	5	5500	Utama: Dinas PUPR Pendukung: BWS, Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Sungai Tapin Kecamatan Bungur: Desa Banua Padang, Banua Padang Hilir, Bungur Baru, Hangui, Kalumpang, Linuh, Paring Guling, Rantau Bujur, Shabah, Timbun; Kecamatan Piani: Balawaian, Batu Ampar, Batung, Buniin Jaya, Harakit, Miawa,

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
																		Pipitak Jaya, Kecamat an Salam Babaris: Salam Babaris, Kecamat an Tapin Tengah: Manduri an, Tirik; Kecamat an Tapin Utara: Antasari Hilir, Kupang
		Pelaksanaan pengerukan/pe mber sihan sungai	Terlaksananya pembersihan dan pengerukan sungai di daerah rawan banjir	1 03 02 2.01 0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restoras i Sungai	KM			5	550 0			5	550 0			Utama: Dinas PUPR Pendukung: BWS, Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD,	Sungai Muning

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
																	Kecamatan, Desa	
6. Penguatan lereng pada kawasan rawan longsor	Berkurangnya frekuensi longsor di wilayah berisiko tinggi	Pembangunan talud/ tembok penahan tebing/ terasering pada daerah lereng berisiko longsor pada permukiman masyarakat dan jalur transportasi	Terbangunnya bangunan penahan tebing yang berisiko tinggi longsor	1 03 02 2.01 0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	KM	1	1000			1	1000			1	1000	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Kecamatan Piani: Belawaia n, Batu Ampar, Batung, Buniin Jaya, Harakit, Miawa, Pipitak Jaya Kecamatan an Bungur: Hangui, Linuh.
				1 03 02 2.01 0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	KM			1	500			1	500			Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	
				1 03 02 2.01 0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing	KM			1	500			1	500			Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
		Pembangunan turap dan drainase pada jalan baru yang berisiko tinggi longsor	Terlaksananya pembangunan turap dan drainase pada jalan baru yang berisiko tinggi longsor	1 03 02 2.01 0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	KM	1	1000			1	1000			1	1000	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Kecamatan Salam Babaris: Suato Lama Kecamatan Hatungun: Matang Batas Kecamatan Binuang: Gunung Batu, Binuang
				1 03 06 2.01 0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Meter			1	500			1	500			Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
7. Pengawasan dan penegakkan hukum bagi aktivitas penebangan pohon di hulu sungai	Terlaksananya pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas	Koordinasi dan pengawasan lintas lembaga terhadap aktivitas masyarakat di hulu sungai yang tidak mempertimban	Terlaksananya koordinasi lintas lembaga urusan perlindungan hutan dalam pencegahan dan mitigasi bencana	2 11 03 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, dan Udara	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara,	Kegiatan	2	20	2	20	2	20	2	20	2	20	Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Pertanian, Dinas PUPR, BKSDA Provinsi, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
yang berpotensi terjadi banjir bandang	masyarakat di hulu sungai terhadap risiko banjir bandang	gkan dampak risiko bencana	longsor dan banjir bandang pada daerah aliran sungai		dan Laut yang dilaksanakan													
				2 11 02 2.01 0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50							1	50	Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Pertanian, Dinas PUPR, BKSDA Provinsi, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				4 01 03 2.04 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	20			1	20			1	20	Utama: Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekda Pendukung: Dinas LH, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Pangan, Dinas PUPR, BKSDA Provinsi, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
8. Pengelolaan dan pengendalian hutan dan ruang terbuka hijau sebagai perlindungan daerah tangkapan air	Terkendalnya daerah tangkapan air dalam pencegahan risiko bencana	Koordinasi Pelaksanaan reboisasi kawasan hutan, lahan dan DAS yang kritis	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan reboisasi kawasan hutan, lahan dan DAS yang kritis	3 27 03 2.01 0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendalnya dan termanfaatnya Kawasan Pertanian	Ha	50	250	50	250	50	250	50	250	50	250	Utama: Dinas Pertanian Pendukung: Dinas LH, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, BKSDA Provinsi, Dinas LH Provinsi	Kecamatan an Bakaran gan Kecamatan an Binuang Kecamatan an Bungur Kecamatan an Candi Laras Selatan Kecamatan an Candi Laras Utara Kecamatan an Hatungun Kecamatan an Lokpaika t Kecamatan an Piani Kecamatan an Salam Babaris Kecamatan an Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
																		Selatan Kecamat an Tapin Tengah Kecamat an Tapin Utara

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
				2 11 03 2.03 0007 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiata n	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Pertanian, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, BKSDA Provinsi, Dinas LH Provinsi	Kecamat an Bakaran gan Kecamat an Binuang Kecamat an Bungur Kecamat an Candi Laras Selatan Kecamat an Candi Laras Utara Kecamat an Hatungu n Kecamat an Lokpaika t Kecamat an Piani Kecamat an Salam Babaris Kecamat an Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
																		Selatan Kecamat an Tapin Tengah Kecamat an Tapin Utara
				2 11 03 2.03 0010 Pelaksanaan Restorasi	Kegiatan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Ha			50	250			50	250			Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Pertanian, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, BKSDA Provinsi, Dinas LH Provinsi	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
				2 11 03 2.03 0009 Pelaksanaan rehabilitasi	Kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Ha	50	250			50	250			50	250	Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Pertanian, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, BKSDA Provinsi, Dinas LH Provinsi	Kabupat en Tapin
				1 03 02 2.01 0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restoras i Sungai	KM			1	100 0							Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Pertanian, Dinas LH, BPBD, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, BKSDA Provinsi, Dinas LH Provinsi	Kabupat en Tapin
			Peningkatan ruang terbuka hijau di wilayah padat permukiman	Adanya pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana	2 11 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Ha	100 0	250 0	100 0	250 0	100 0	250 0	100 0	250 0	100 0	250 0	Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Dinas LH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS Provinsi

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
		Pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan kawasan ruang terbuka hijau untuk pencegahan dampak bencana	Terlaksananya pengawasan dan penindakan secara hukum terhadap perlindungan ruang terbuka hijau dalam pencegahan dan mitigasi bencana	1 03 12 2.04 0006 Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Terlaksananya Audit Tata Ruang	Kasus	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas LH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, Dinas Pertanian, Dinas LH, Dinas Perkim, Dinas Pertanian	Kabupat en Tapin
				1 03 12 2.04 0007 Penaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Terlaksananya tahapan kegiatan Penaan Sanksi Administratif	Kasus	10	20			10	20			10	20	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas LH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, Dinas Pertanian, Dinas LH, Dinas Perkim, Dinas Pertanian	Kabupat en Tapin
				1 03 12 3.06 0001 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokume n	1	50			1	50			1	50	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas LH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, Dinas Pertanian, Dinas LH, Dinas Perkim, BPBD	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				2 11 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Ha	10	50			10	50			10	50	Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas LH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pertanian	Kabupat en Tapin
				3 27 03 2.01 0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendalinya dan termanfaatnya Kawasan Pertanian	Ha	10	50			10	50			10	50	Utama: Dinas Pertanian Pendukung: Dinas LH, Dinas LH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perkim	Kabupat en Tapin
		Koordinasi pengawasan dan penegakan hukum terkait pelindungan kawasan hutan untuk pencegahan dampak bencana	Terlaksananya pengawasan dan penindakan secara terpadu terhadap perlindungan hutan dalam pencegahan dan mitigasi bencana	3 27 03 2.01 0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendalinya dan termanfaatnya Kawasan Pertanian	Ha	10	50			10	50			10	50	Utama: Dinas Pertanian Pendukung: Dinas LH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, BKSDA Provinsi, Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
			kebakaran hutan, longsor, banjir bandang dan banjir	3 27 05 2.01 0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	10	50			10	50			10	50	Utama: Dinas Pertanian Pendukung: Dinas LH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, BKSDA Provinsi, Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD	Kabupat en Tapin
9. Pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan	Berkurangnya dampak kebakaran hutan dan lahan	Koordinasi kegiatan sosialisasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar (UU No.32 Tahun 2009)	Terlaksananya sosialisasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar	3 27 03 2.01 0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendalinya dan termanfaatnya Kawasan Pertanian	Ha	10	50			10	50			10	50	Utama: Dinas Pertanian Pendukung: Dinas LH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, BKSDA Provinsi, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas LH	Kabupat en Tapin
				3 27 05 2.01 0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	10	50			10	50			10	50	Utama: Dinas Pertanian Pendukung: Dinas LH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, BKSDA Provinsi, BPBD, Dinas PUPR, Dinas	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
																	Perkim, Dinas LH	
10. Pemeliharaa n pohon pelindung disepanjang jalan dan fasilitas umum	Berkurangnya potensi tumbang dan patahnya pohon pelindung pada saat angin kencang (cuaca ekstrim)	Pemangkasan pohon pelindung yang sudah rentan	Terlaksananya pemangkasan pohon pelindung dalam pencegahan dampak bencana cuaca ekstrim	2 11 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Ha	10	50			10	50			10	50	Utama: Dinas LH Pendukung: BPBD, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perkim,	Kabupat en Tapin
		Peremajaan kembali pohon pelindung	Terlaksananya peremajaan pohon pelindung dalam pencegahan dampak bencana cuaca ekstrim	2 11 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Ha	10	50			10	50			10	50	Utama: Dinas LH Pendukung: BPBD, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perkim,	Kabupat en Tapin
		Sosialisasi peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian	Terbentuknya pemahaman masyarakat terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan	7 01 03 2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarg a			100	100			100	100			Utama: Kecamatan Pendukung: Dinas LH, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
		pohon pelindung	terhadap dampak bencana cuaca ekstrim	2 11 08 2 01 0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga			5	100			5	100			Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan	Kabupaten Tapin
				2 11 08 2.01 0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang			100	150					100	150	Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan	Kabupaten Tapin
Isu Strategis 3: Peningkatan Infrastruktur Drainase dan Irigasi untuk Menghadapi Curah Hujan Ekstrem																		
Program 3: Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase																		
11. Pengelolaan dan pembangunan sistem drainase berbasis	Adanya sistem drainase terintegrasi langsung ke sungai yang dapat	Penyusunan master plan sistem drainase lingkungan perkotaan yang terintegrasi dan yang	Tersusunnya dokumen rencana induk sistem drainase perkotaan berbasis pengurangan	1 03 06 2.01 0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Dokumen			1	100							Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, BPBD, BAPPEDA	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
pengurangan risiko bencana	menurunkan frekuensi dan luasan banjir/genangan	terhubung langsung ke sungai	risiko bencana yang terintegrasi langsung ke sungai	1 03 06 2.01 0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen			1	100							Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, BPBD, BAPPEDA	Kabupaten Tapin
		Pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi sistem drainase perkotaan	Terbangunnya/ meningkatnya/ terehabilitasinya sistem drainase perkotaan dalam menurunkan frekuensi dampak bencana	1 03 06 2.01 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Meter	1000	2500			1000	2500			1000	2500	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 03 06 2.01 0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Meter			200	1000			200	1000	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa			
				1 03 06 2.01 0022 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Unit	50	200	50	200	50	200	50	200	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa			
				1 03 06 2.01 0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Meter	1000	10000	1000	10000	1000	10000	1000	10000	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD,			

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
																	Kecamatan, Desa	
				1 03 06 2.01 0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Meter			500	500 0			500	500 0			Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	
				1 03 06 2.01 0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Meter	500	500 0	500	500 0	500	500 0	500	500 0	500	500 0	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	
		Penyusunan <i>Outline Plan</i> pada kawasan genangan	Terpetakan dan teridentifikasi kawasan genangan	1 03 06 2.01 0027 Penyusunan <i>Outline Plan</i> pada kawasan genangan	Tersusunnya <i>Outline Plan</i> pada Kawasan Genangan	Kawasa n Genang an			1	100							Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, BPBD, BAPPEDA	Kabupat en Tapin
		Pengawasan dan pemeliharaan sistem drainase	Berjalannya pembangunan dan pemeliharaan drainase sesuai dengan	1 03 06 2.01 0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainas e Perkota an	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
			rencana induk dan teknis sistem drainase perkotaan yang berbasis pengurangan risiko bencana	1 03 06 2.01 0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Meter	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas LH, BPBD, Kecamatan,Desa	Kabupat en Tapin
		Monitoring dan evaluasi <i>master plan</i> sistem drainase lingkungan perkotaan	Adanya rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap rencana induk (master plan) sistem drainase perkotaan yang berbasis pengurangan risiko bencana	1 03 06 2.01 0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Dokume n			1	100					1	100	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				1 03 06 2.01 0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokume n			1	100					1	100	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
		Pembersihan dan pengerukan drainase	Terpeliharanya drainase perkotaan secara berkala dan berkelanjutan	1 03 06 2.01 0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainas e Perkota an	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				1 03 06 2.01 0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Meter	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
		Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sistem drainase lingkungan	Terbentuknya masyarakat peduli lingkungan yang dapat pembinaan teknis pengelolaan sistem drainase lingkungan	1 03 06 2.01 0018 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Orang	20	100		20	100		20	100			Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				2 11 08 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	20	100		20	100		20	100			Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Perkim, Dinas PUPR, BPBD,Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Laporan	1	10		1	10		1	10			Utama: Kecamatan Pendukung: Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan,Desa	Kabupat en Tapin
				7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Desa		Pokmas	1	10		1	10		1	10			Utama: Desa Pendukung: Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan,Desa	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
Program 4: Perencanaan Terpadu Penanggulangan Bencana																		
12. Pemutakhiran Perencanaan Penanggulangan Bencana	Tersusunnya KRB dan RPB periode lanjut untuk penanggulangan bencana di daerah	Review dan pemutakhiran Kajian Risiko Bencana priode perencanaan	Terlaksananya pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana sesuai dengan perkembangan data terkini	1 05 03 2.01 0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Dokumen								1	500		Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas LH, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Damkar, Dinas Pariwisata, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
		Review dan pemutakhiran Rencana Penanggulangan Bencana priode perencanaan	Terlaksananya pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana sesuai dengan perkembangan data terkini	1 05 03 2.02 0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Dokumen									1	500	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas LH, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Damkar, Dinas Pariwisata,	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
																	Kecamatan, Desa	
Program 5: Pengelolaan Persampahan																		
13. Peningkatan pengelolaan sampah rumah tangga yang ramah lingkungan	Adanya sistem pengelolaan sampah yang terpantau dari pembuangan rumah tangga sampai pada TPA yang berwawasan	Pengembangan sistem dan mekanisme pemantauan dan pengawasan pembuangan sampah rumah tangga sampai pada TPA	Adanya sistem dan mekanisme pemantauan dan pengawasan pembuangan sampah rumah tangga sampai pada TPA	2 11 11 2.01 0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Dokumen			1	50							Utama: Dinas LH Pendukung: Satpol PP, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
	lingkungan dan risiko bencana	Peningkatan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS dan sarana prasarana dalam pelayanan sampah di daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dalam pelayanan sampah di daerah	2 11 11 2.01 0005 Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk dan Mengacu pada Jakstrada	Dokume n			1	10	1	10					Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Perkim, Dinas PUPR, BPBD,Kecamata n, Desa	Kabupat en Tapin
				2 11 11 2.01 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan,dan Pemrosesan Akhir	Unit			50	100 0					50	100 0	Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Perkim, Dinas PUPR, BPBD,Kecamata n, Desa	Kabupat en Tapin
				2 11 11 2 01 0008 Penyusunan Rencana/Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokume n			1	20								Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Perkim, Dinas PUPR, BPBD,Kecamata n, Desa

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				2 11 11 2 01 0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan Penaganan Sampah	Jumlah Fasilitas penganganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Perkim, Dinas PUPR, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				1 03 07 2.01 0007 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS3R/TP S di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS3 R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Unit	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				1 03 07 2.01 0009 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TP S di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS3 R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Unit	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
		Sosialisasi dan pengawasan masyarakat dalam rangka sadar lingkungan	Tersosialisasiny a dan terlaksananya pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah dalam menumbuhkan sadar dan	2 11 11 2.01 0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Dokume n	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	Utama: Dinas LH Pendukung: Satpol PP, Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
			peduli lingkungan serta risiko bencana	7 01 03 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	Utama: Kecamatan Pendukung: Dinas LH, Satpol PP, Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Desa	Kabupat en Tapin
				7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Pokmas	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	Utama: Desa Pendukung: Dinas LH, Satpol PP, Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
		Penegakan hukum peraturan daerah terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan (Perda tentang	Terlaksananya penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan pola hidup masyarakat	2 11 11 2.01 0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Dokume n	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	Utama: Dinas LH Pendukung: Satpol PP, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
		petunjuk pelaksana pengelolaan sampah)	yang bersih dan sehat	2 11 10 2 01 0004 Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	3	25	3	25	3	25	3	25	3	25	Utama: Dinas LH Pendukung: Satpol PP, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				2 11 10 2 01 0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	5	50	5	50	5	50	5	50	5	50	Utama: Dinas LH Pendukung: Satpol PP, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 05 02 2.02 0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	Utama: Satpol PP Pendukung: Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 05 02 2.02 0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	Utama: Satpol PP Pendukung: Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD,	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
		Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga	Adanya kelompok-kelompok peduli sampah dan lingkungan pada tingkat masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan	2 11 11 2.01 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Kelompok	10	120	10	120	10	120	10	120	10	120	Utama: Dinas LH Pendukung: Satpol PP, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 03 04 2.01 0011 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang	500	150	500	150	500	150	500	150	500	150	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Satpol PP, Dinas LH, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				7 01 03 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	Utama: Kecamatan Pendukung: Dinas PUPR, Satpol PP, Dinas LH, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Pokmas	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	Utama: Desa Pendukung: Dinas PUPR, Satpol PP, Dinas LH, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Kecamatan	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
		Peningkatan LPS (Lembaga Pengelola Sampah)	Bertambahnya lembaga pengelolaan sampah di tingkat Desa untuk penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan	2 11 11 2.01 0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF,pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton			500	800	500	800	500	800	500	800	Utama: Dinas LH Pendukung: Satpol PP, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				7 01 03 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	Utama: Kecamatan Pendukung: Dinas PUPR, Satpol PP, Dinas LH, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Pokmas	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	Utama: Desa Pendukung: Dinas PUPR, Satpol PP, Dinas LH, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Kecamatan	Kabupat en Tapin
Isu Strategis 4: Pengembangan Infrastruktur Mitigasi Bencana																		

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
Program 6: Peningkatan Sistem Kesiapsiagaan Daerah Terhadap Bencana																		
16. Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanganan bencana daerah	Tersusunnya rencana kesiapsiagaan dan penanganan bencana daerah yang tangguh	43 Penyusunan rencana kontingensi bencana prioritas daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	1 05 03 2.02 0009 Penyusunan Rencana Kontinjensi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	Dokumen	1	250			1	250			1	250	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perkim, Dinas LH, Dinas Damkar, Satpol PP, TNI, POLRI, Kantor SAR, ORARI, RAPI, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
		Review dan pembaruan rencana kontingensi bencana prioritas daerah	Terlaksananya pemutakhiran Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	1 05 03 2.02 0009 Penyusunan Rencana Kontinjensi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	Dokumen	1	250			1	250			1	250	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perkim, Dinas LH, Dinas Damkar, Satpol PP, TNI, POLRI, Kantor SAR,	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
																	ORARI, RAPI, Kecamatan, Desa	
		Review dan pembaruan rencana penanggulangan ke daruratan bencana daerah	Terlaksananya pemutakhiran Dokumen Rencana Penanggulanga n Kedaruratan Bencana (RPKB)	1 05 03 2.02 0011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Dokume n					1	250			1	250	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perkim, Dinas LH, Dinas Damkar, Satpol PP, TNI, POLRI, Kantor SAR, ORARI, RAPI, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		Institusi Pelaksana	Lokus
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Gladi kesiapsiagaan untuk bencana berdasarkan RPKB dan Renkon	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	1 05 03 2.02 0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	Orang	200	500			200	500			200	500	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perkim, Dinas LH, Dinas Damkar, Satpol PP, TNI, POLRI, Kantor SAR, ORARI, RAPI, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
		Pembangunan sistem dan sarana prasarana peringatan dini untuk bencana prioritas daerah	Tersedianya layanan sistem peringatan dini untuk bencana prioritas di daerah	1 05 03 2.02 0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Laporan			1	450			1	450			Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perkim, Dinas LH, Dinas Damkar, Satpol PP, TNI, POLRI, Kantor SAR,	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
																	ORARI, RAPI, Kecamatan, Desa	
Penyusunan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Tersedianya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Pembangunan sistem informasi kebencanaan daerah yang terpadu dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan DIBI	Tersedianya sistem informasi kebencanaan daerah yang terintegrasi dengan SIPD dan DIBI	1 05 03 2.04 0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen			1	100							Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata, Dinas Perkim, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				2 16 02 2.01 0006 Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Dokumen			1	100							Utama: Dinas Kominfo Pendukung: BPBD, Dinas Pariwisata, Dinas Perkim, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
				2 16 03 2.02 0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Unit			1	100							Utama: Dinas Kominfo Pendukung: BPBD, Dinas Pariwisata, Dinas Perkim, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				2 16 02 2.01 0009 Manajemen Komunikasi Krisis	Terlaksananya Manajemen Komunikasi Krisis	Dokume n			1	100							Utama: Dinas Kominfo Pendukung: BPBD, Dinas Pariwisata, Dinas Perkim, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
		53 Peningkatan sarana prasarana dan pengembang an sistem pendataan dan informasi PUSDALOPS PB	Tersedianya sistem dan sarana prasarana Pusdalops untuk pendataan dan penyebaran informasi kebencanaan yang terintegrasi antar nasional, provinsi serta OPD	1 05 03 2.02 0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Laporan			1	100							Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata, Dinas Perkim, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program 7: Peningkatan Pendidikan Aman Bencana																		
Peningkatan kapasitas dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana (SMAB) / Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Terbangunnya a sekolah yang aman bencana di seluruh satuan pendidikan daerah	Penerapan satuan pendidikan aman bencana (SPAB) diseluruh tingkat sekolah di daerah secara komprehensif	Terlaksananya penerapan SPAB di seluruh tingkat pendidikan di daerah	1 05 03 2.01 0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Orang	1000	200	1000	200	1000	200	1000	200	1000	200	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PMI, Dinas Sosial, Satpol PP	Kabupat en Tapin
				1 01 03 3.01 0005 Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	Dokumen	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	Utama: Dinas Pendidikan Pendukung: BPBD, Dinas Kesehatan, PMI, Dinas Sosial, Satpol PP	Kabupat en Tapin
Program 8: Pembangunan Masyarakat Tangguh Bencana																		
Peningkatan Desa tangguh bencana	Terbangunnya a Desa tangguh bencana di daerah	Peningkatan kapasitas Desa/desa rawan bencana dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana	Terbentuknya Desa tangguh bencana terutama Desa yang berada pada wilayah berisiko tinggi bencana	1 05 03 2.01 0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis	Orang	1000	200	1000	200	1000	200	1000	200	1000	200	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Seluruh Desa yang berada di zona risiko tinggi bencana

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
					ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya													
				1 05 03 2.02 0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	10	100			10	100			10	100	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Seluruh Desa yang berada di zona risiko tinggi bencana
				1 05 03 2.02 0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	2	400			2	400			2	400	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Seluruh Desa yang berada di zona risiko tinggi bencana

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
				1 06 06 2.02 0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung			5	150			5	150			Utama: Dinas Sosial Pendukung: BPBD, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Seluruh Desa yang berada di zona risiko tinggi bencana
				3 26 02 2.03 0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	2	400			2	400			2	400	Utama: Dinas Pariwisata Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Seluruh Desa yang berada di zona risiko tinggi bencana
		Simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat dengan menggunakan indikator desa tangguh bencana secara berkala	Terlaksananya latihan uji sistem penanggulangan bencana di tingkat masyarakat secara komprehensif	1 05 03 2.02 0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	100	400			100	400			100	400	Utama: BPBD Pendukung: Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 05 03 2.02 0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Kawasan			1	400			1	400			Utama: BPBD Pendukung: Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF													
							2025		2026		2027		2028		2029					
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus		
Program 9: Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat																				
Pencegahan dan pengendalian penyakit	Terlaksananya a surveilans epidemiologi dan penganggula ngan wabah	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokume n	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin		
				1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokume n	1	100	1	100	1	100	1	100	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin				
				1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokume n	1	100	1	100	1	100	1	100	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin				
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 02 02 2.02 0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokume n	1	100	1	100	1	100	1	100	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan,	Kabupat en Tapin		

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
																	Kecamatan, Desa	
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Waba h Penyakit	Terlasananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Waba h Penyakit	1 05 03 2.03 0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Dokume n	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Perternakan, RSUD, Dinas Kesehatan, Puskemas, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa	
		Respon cepat kejadian luar biasa kejadian luar biasa (KLB) dan/atau wabah zoonosis	Terlaksananya respon cepat terhadap kejadian luar biasa dan/atau wabah <i>zoonosis</i>	1 02 02 2.02 0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokume n	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				3 27 04 2.01 0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan <i>Zoonosis</i> pada Hewan	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan <i>zoonosis</i> pada Hewan	Dokume n	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	Utama: Dinas Peternakan Pendukung: BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
		Pelaksanaan imunisasi pada kelompok rentan/berisiko tinggi terdampak penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (Bayi,Balita, Ibu Hamil, Anak-anak)	Terlaksananya imunisasi pada kelompok rentan/berisiko tinggi terdampak penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (Bayi, Balita, Ibu Hamil, Anak-anak)	1 02 02 3.02 0057 Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sesuai standar	Orang	100	250	100	250	100	250					Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
		Peningkatan kapasitas petugas dan sarana prasarana kesehatan dalam penanganan krisis kesehatan dan penganan darurat bencana	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana Kesehatan dalam penganan darurat bencana	1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokume n	1	100			1	100			1	100	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, RSUD, Dinas Sosial, Divi POLDA, Puskesmas, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang			50	250			50	250			Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, RSUD, Dinas Sosial, Divi POLDA, Puskesmas, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
				1 02 03 3.03 0002 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Orang	50	250			50	250			50	250	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, RSUD, Dinas Sosial, Divi POLDA, Puskesmas, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	10	500	10	500	10	500	10	500	10	500	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, RSUD, Dinas Sosial, Divi POLDA, Puskesmas, Kecamatan, Desa	
				1 02 02 2.02 0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dokume n			1	20	1	20	1	20	1	20	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, RSUD, Dinas Sosial, Divi POLDA, Puskesmas, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
							1	20										

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya 10 indikator PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	Kampanye PHBS	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dalam pencegahan bencana epidemi dan wabah penyakit	1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen			1	50	1	50	1	50	1	50	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: Dinas Kominfo, BPBD, Dinas LH, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
		Penilaian Desa Ber-PHBS	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam pencegahan bencana epidemi dan wabah penyakit	1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas LH, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
Isu Strategis 5: Penguatan Regulasi dan Koordinasi Lintas Sektor untuk Penanggulangan Bencana yang Efektif																		
Program 10: Peningkatan Sistem Dasar Pemulihan Pasca Bencana																		
Penguatan sistem pemulihan pasca bencana	Adanya sistem pemulihan pasca bencana berbasis data dan pengkajian kebutuhan	Penguatan kebijakan dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Adanya kebijakan dan mekanisme pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana	1 05 03 2.04 0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)Kab/Kota	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Dokumen					1	250					Utama: BPBD Pendukung: Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Pariwisata,	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
	pasca bencana.																Dinas Perkim, Kecamatan,Desa	
				1 05 03 2.04 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Kegiata n					2	50					Utama: BPBD Pendukung: Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perkim, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
		Pembangunan dan perbaikan rumah penduduk korban dampek bencana	Terlaksananya pembangunan dan perbaikan rumah bagi korban bencana	1 04 02 2.01 0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokume n	1	100									Utama: Dinas Perkim Pendukung: BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Pangan,Dinas Pariwisata, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				2 04 02 2.03 0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	Unit Rumah	15	1500	15	1500	15	1500	15	1500	15	1500	Utama: Dinas Perkim Pendukung: BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Pariwisata,Keca matan, Desa	Kabupat en Tapin
				1 04 02 2.03 0002 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	Unit Rumah	15	3000	15	3000	15	3000	15	3000	15	3000	Utama: Dinas Perkim Pendukung: BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Pangan,	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
																	Dinas Pariwisata, Kecamatan, Desa	
		Penyusunan Rencana Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	Adanya rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana	1 05 03 2.04 0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)Kab/Kota	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Dokumen					1	250					Utama: BPBD Pendukung: Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 05 03 2.04 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan	Kegiatan											Utama: BPBD Pendukung: Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

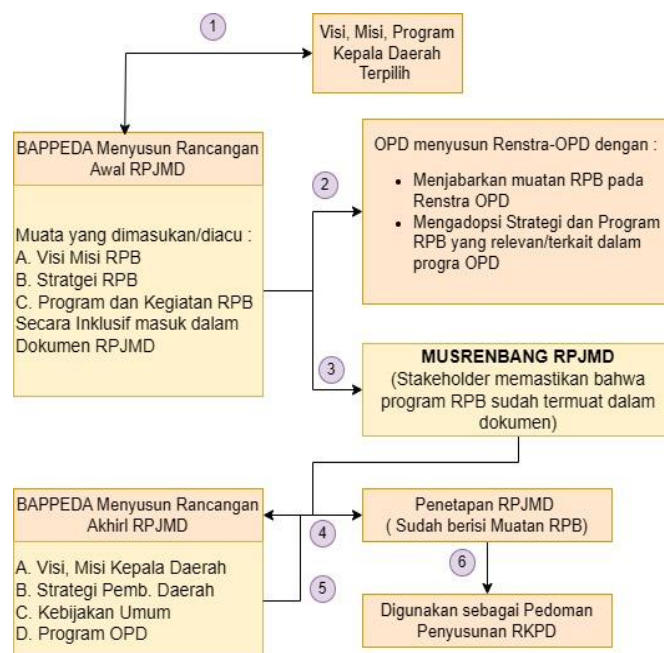
RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF											
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Institusi Pelaksana	Lokus
					pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota													

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2024

BAB PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI



Kerja sama atau kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media dalam penanggulangan bencana adalah upaya bersama yang dilakukan dalam pengelolaan bencana sebelum, saat, dan setelah kejadian. Bagian ini menjelaskan strategi integrasi berbagai pihak serta pemaduan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) dengan perencanaan lain, kerangka kerja pengendalian, dan kerangka evaluasi program serta rencana aksi penanggulangan bencana.



Gambar 6. 1 Proses Pemaduan RPB sebelum/sedang Penyusunan RPJMD

6.1 PEMADUAN PARA PIHAK NON PEMERINTAH

Kolaborasi pentahelix sangat penting untuk keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Tapin. Di samping peran pemerintah, perlu dijelaskan bagaimana pihak-pihak non-pemerintah di wilayah tersebut dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam setiap tahap penanggulangan bencana. Pihak-pihak ini mencakup organisasi dari dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media.

Sinergi serta integrasi antarpihak bertujuan untuk mengajak dan melibatkan baik pemerintah maupun non-pemerintah agar dapat berkontribusi dalam pelaksanaan aksi-aksi yang tertuang dalam dokumen RPB, serta memastikan keterlibatan para pihak dalam memperkuat ketangguhan dengan mengadopsi atau mendukung tujuan dan sasaran RPB. Berikut adalah rincian pemaduan para pihak Non Pemerintah:

Tabel 6. 1 Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Unsur	Instansi/ Lembaga	Mandat	Tugas	Kepentingan
Keagamaan	MUI Tapin	Edukasi dan dukungan spiritual	Pembinaan mental, dukungan moral	Pemulihan mental masyarakat
Organisasi	PMI Tapin	Dukungan kesehatan dan bantuan	Pertolongan pertama, posko kesehatan	Keselamatan korban
Organisasi	BAZNAS Tapin	Pengelolaan dana bantuan	Bantuan keuangan darurat	Bantuan keuangan masyarakat
Organisasi	ORARI Tapin	Komunikasi darurat	Fasilitasi komunikasi, dukungan pemulihan	Kelancaran komunikasi
Organisasi	RAPI Tapin	Penggunaan radio darurat	Jalur komunikasi darurat	Koordinasi tanggap bencana
Perguruan Tinggi	Politeknik Syekh Salman Al-Farisi	Pendidikan dan pelatihan	Relawan mahasiswa, penelitian	Peningkatan kesiapsiagaan

6.2 PEMADUAN KE PERENCANAAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) harus menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RPB perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah yang sudah ada.

Pemaduan ini bertujuan untuk mengoptimalkan dukungan, pola kerjasama, dan sinkronisasi anggaran agar tidak terjadi tumpang tindih dan untuk memperbaiki kesenjangan, khususnya dalam RPJMD Kabupaten Tapin. Agar RPB dapat terintegrasi dengan baik dalam perencanaan pembangunan dan/atau rencana penanggulangan bencana di tingkat yang lebih tinggi, serta perencanaan lainnya, program-program penanggulangan bencana diharapkan dapat mendukung dan berkontribusi pada pencapaian kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan lainnya. Berikut adalah pemaduan program dan sasaran RPB dalam perencanaan lainnya.

Tabel 6. 2 Pemaduan Program dan Sasaran RPB

Identifikasi Dokumen		Substansi Dokumen	Strategi
Nasional	1. RIPB Tahun 2020-2044	1. Isu Strategis dan Spesifik Penanggulangan Bencana di level Nasional	1. Penguatan regulasi dan tata kelola.
	2. Renas PB (BNPB)		2. Fokus capaian RIPB, serta hasil identifikasi masalah kebencanaanrioritas
	3. RPJMN 2020-2044		3. Prioritas membangun sistem kesehatan, bencana, dan perlindungan sosial
Instansi Vertikal	1. Rencana Pengelolaan Hutan (RPH)	1. Program perlindungan hutan	
Provinsi	1. RPJMD (Bappeda)	1. Program, Kegiatan serta Pendanaan PB	1. Isu Strategis RPB Provinsi
	2. RPB (BPBD)	2. Zonasi Bencana, Zonasi Perlindungan, Jalur Evakuasi, Pengendalian dan Pemanfaatan Kota berbasis Mitigasi Bencana	2. FGD Khusus, Menugaskan Tim Teknis untuk mengharmonisasi, Menunjuk konsultan
	3. RTRW (PUPR)		
Kab/Kota	1. RPJMD (Bappeda)	1. Program, Kegiatan serta Pendanaan PB	1. Isu Strategis RPB Daerah
	2. RPB (BPBD)	2. Zonasi Bencana, Zonasi Perlindungan, Jalur Evakuasi, Pengendalian dan Pemanfaatan Kota berbasis Mitigasi Bencana	
	3. RTRW (PUPR)		
Lembaga Usaha	1. Rencana Kerja Umum (RKU)	1. Program penegakan hukum	1. Program CSR
Organisasi	1. Renstra Organisasi	1. Rencana Program	1. Rencana Proyek

6.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Seperti yang telah dipertegas di sebelumnya, kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah kegiatan kolektif yang dilakukan bersama oleh multipihak (pentahelix) mulai dari proses penyusunan hingga pelaksanaan dokumen RPB. Selain itu, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran RPB.

Untuk memantau dan mensupervisi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi RPB agar mencapai tujuan dan sasarannya, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam rencana penanggulangan bencana ini adalah suatu proses pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan/aksi, serta pengukuran dan penilaian hasil dan pencapaian target, serta mengidentifikasi pembelajaran.

Tata cara pengendalian dan evaluasi dapat merujuk pada peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Tabel di bawah ini merupakan kerangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Tapin.

1. Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memantau dan mensupervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan parapihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan/renaksi dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya renaksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Dengan fokus pada aspek realisasi program dan renaksi, rancangan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti di bawah ini:

Tabel 6. 3 Format Rencana Pemantauan Per-Semester pelaksanaan dari PRB

Waktu Pemantauan	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
Tahunan	1. Indikator Kinerja Pemberdayaan masyarakat dan Desa. 2. Indikator Kinerja Tidak Terkait Pelayanan Dasar.	Catatan hasil workshop File softcopy dokumen	Worskhop Pengecekan Ketersediaan Dokumen	Dilakukan oleh Sekretariat Bersama Daerah
	3. Indikator kinerja ketenteran. ketertiban umum. dan pelindungn masyarakat			
	4. Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran			
Tengah Periode	Review RPB Tahunan	Catatan hasil FGD	FGD	Dilakukan oleh Sekretariat Bersama Daerah
Akhir Periode	Capaian target kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Catatan hasil FGD	FGD	Dilakukan oleh Sekretariat Bersama Daerah dan Bappelitbang

Tabel 6. 4 Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan

No	Materi Pemantauan	Kriteria/Indikator Keluaran	Target 5 Tahunan	Capaian Tahun Ke					Catatan
				1	2	3	4	5	

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memantau dan mensupervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan pemantauan dan supervisi merupakan proses untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

2. Evaluasi

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sah, relevan dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil. Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB.

Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu;

- Analisa kesenjangan (gap) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai,
- Analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan
- Pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan.

Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Daerah membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/mechanisme lain

yang sudah ada di daerah.

Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi Semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan (output). Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pemaduan parapihak, pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (outcome). Hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana aksi/kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Daerah Bersama.

Evaluasi Tengah Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuaian RPB dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau fokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian tujuan RPB dan mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang 5 tahun. Kesimpulan dan rekomendasi digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB periode berikutnya. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Pada kegiatan evaluasi yang telah direncanakan pada kerangka rencana evaluasi, utamanya pada aspek realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, dapat menggunakan tabel alat bantu evaluasi di bawah ini: Rencana evaluasi dapat ditetapkan per tahun dan dapat menggunakan format tabel evaluasi sebagai alat bantu seperti berikut ini:

Tabel 6. 5 Format Kerangka Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana

Waktu Evaluasi	Kriteria/ Indikator Evaluasi	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
Tahunan	1. Indeks Desa Membangun	Catatan hasil workshop File softcopy dokumen	Worskhop Pengecekan Ketersesiaan Dokumen	Dilakukan oleh Sekretariat Bersama Daerah
	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			
	3. Indeks Risiko Bencana			
	4. Indeks ketahanan& keselamatan kebakaran			
	5. Wilayah manajemen kebakaran (WMK) / jumlah luas kabupaten x 100%			
Tengah Periode	Jumlah pemutakhiran RPB sejak tahun 2023-2025	Catatan hasil FGD	• FGD	Dilakukan oleh Sekretariat Bersama Daerah dan Bappelitbang
Akhir Periode	1. Capaian Indeks Desa Membangun tahun 2026	Catatan hasil FGD	• FGD	Dilakukan oleh Sekretariat Bersama Daerah dan Bappelitbang
	2. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			

Waktu Evaluasi	Kriteria/ Indikator Evaluasi	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
	tahun 2026 3. Capaian Indeks Risiko Bencana tahun 2026 4. Capaian Indeks ketahanan & keselamatan kebakaran tahun 2026 5. Capaian Wilayah manajemen kebakaran (WMK) /jumlah luas kabupaten x 100% tahun 2026			

Berikut hasil evaluasi disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana berikut :

Tabel 6. 6 Format Penyajian Hasil Evaluasi tahunan

No	Kriteria Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran
1	Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,8205	Indeks Desa Membangun				
2	Indikator Kinerja Tidak Terkait Pelayanan Dasar	71,19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No	Kriteria Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran
3	Indikator Kinerja Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	127,38	Indeks Risiko Bencana	127,38			
4	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	62%	Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) / Jumlah Luas Kabupaten x 100%				

Tabel 6. 7 Format Penyajian Hasil Evaluasi Tengah Periode

No	Kriteria Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran
1	Review RPB Tahunan	1 Dokumen RPB/Tahun	Jumlah Pemutakhiran RPB Sejak tahun 2023-2025				

Tabel 6. 8 Format Penyajian Hasil Evaluasi Tahunan

No	Kriteria Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,8342	Capaian Indeks Desa Membangun Tahun 2026				

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No	Kriteria Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran
2	Tidak Terkait Pelayanan Dasar	71,32	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2026				
3	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	118,05	Capaian Indeks Risiko Bencana Tahun 2026				
		97	Capaian Indeks Ketahanan & Keselamatan Kebakaran Tahun 2026				
4	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	65%	Capaian Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) / Jumlah Luas Kabupaten x 100% Tahun 2026				

Tabel 6. 9 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Waktu	Materi Pemantauan /Evaluasi	Kriteria/Indikator Pemantauan /Evaluasi	Sumber Bukti	Metode	Pelaksana Pemantauan/ Evaluasi
Per Semester	Pencapaian Kelurahan	Prosentase Pencapaian	Laporan Kelurahan	Survey atau Dokumentasi	Sekretariat bersama Daerah
Per Tahun	• Pemaduan Parapihak		Notulen dan Rekapitulasi Rapat	Focus group discussion(FGD)	
	• Pemaduan Perencanaan Lainnya		Dokumen Perencanaan	Desktop work (kajian pustaka)	

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Waktu	Materi Pemantauan /Evaluasi	Kriteria/Indikator Pemantauan /Evaluasi	Sumber Bukti	Metode	Pelaksana Pemantauan/ Evaluasi
	• Pencapaian hasil		Laporan Tahunan	Survey dan Evaluasi	
Tengah Periode	• Review RPB	• Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi	Dokumen Review	Focus group discussion(FGD)	Sekretariat bersama Daerah bersama Bappeda
	• Pencapaian sasaran	• Rencana tindak lanjut	Rekapitulasi Capaian	Evaluasi Kinerja	
Akhir Periode	• Pencapaian sasaran	• Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi	Rekapitulasi Capaian	Survey dan Dokumentasi	Sekretariat bersama Daerah bersama Bappeda
	• Pencapaian Tujuan	• Rencana tindak lanjut	Laporan Akhir Periode	Evaluasi Terpadu	
		• Pembelajaran	Analisis Penyebab	Kajian Mendalam dan Wawancara	

BAB PENUTUP



Penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik, perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan upaya bersama atau melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerja sama dalam seluruh siklus tahapan pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana, baik di provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. RPB merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan. RPB menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. RPB sebagai bentuk pelayanan minimal yang berhak diterima oleh Masyarakat.

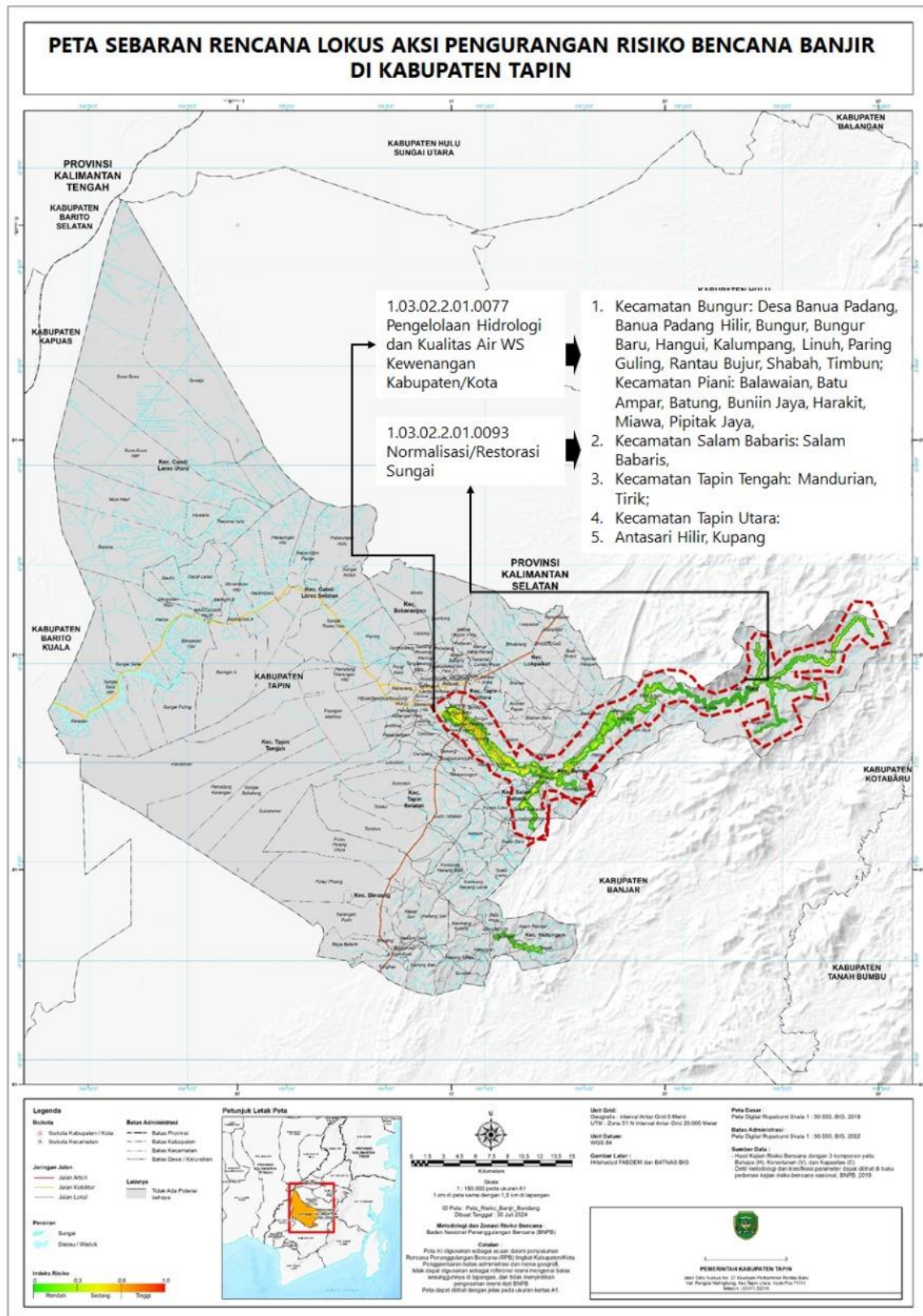
Penyusunan RPB Kabupaten Tapin, melibatkan lintas sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana, yang selanjutnya diterbitkan dalam bentuk peraturan gubernur yang akan mengikat stakeholders kebencanaan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Tapin. RPB Kabupaten Tapin dapat menjadi pedoman penyelenggaraan bencana di Kabupaten Tapin yang disinkronisasi dengan RPD Kabupaten Tapin dan menjadi acuan bagi kabupaten dalam Menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Tapin.

Pemerintah Kabupaten Tapin diharapkan dapat menyempurnakan dokumen RPB yang telah disusun berdasarkan pedoman yang berlaku dan RPD Kabupaten Tapin serta dokumen perencanaan lainnya demi terselenggaranya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh sesuai dengan amanat perundang-undangan.

LAMPIRAN

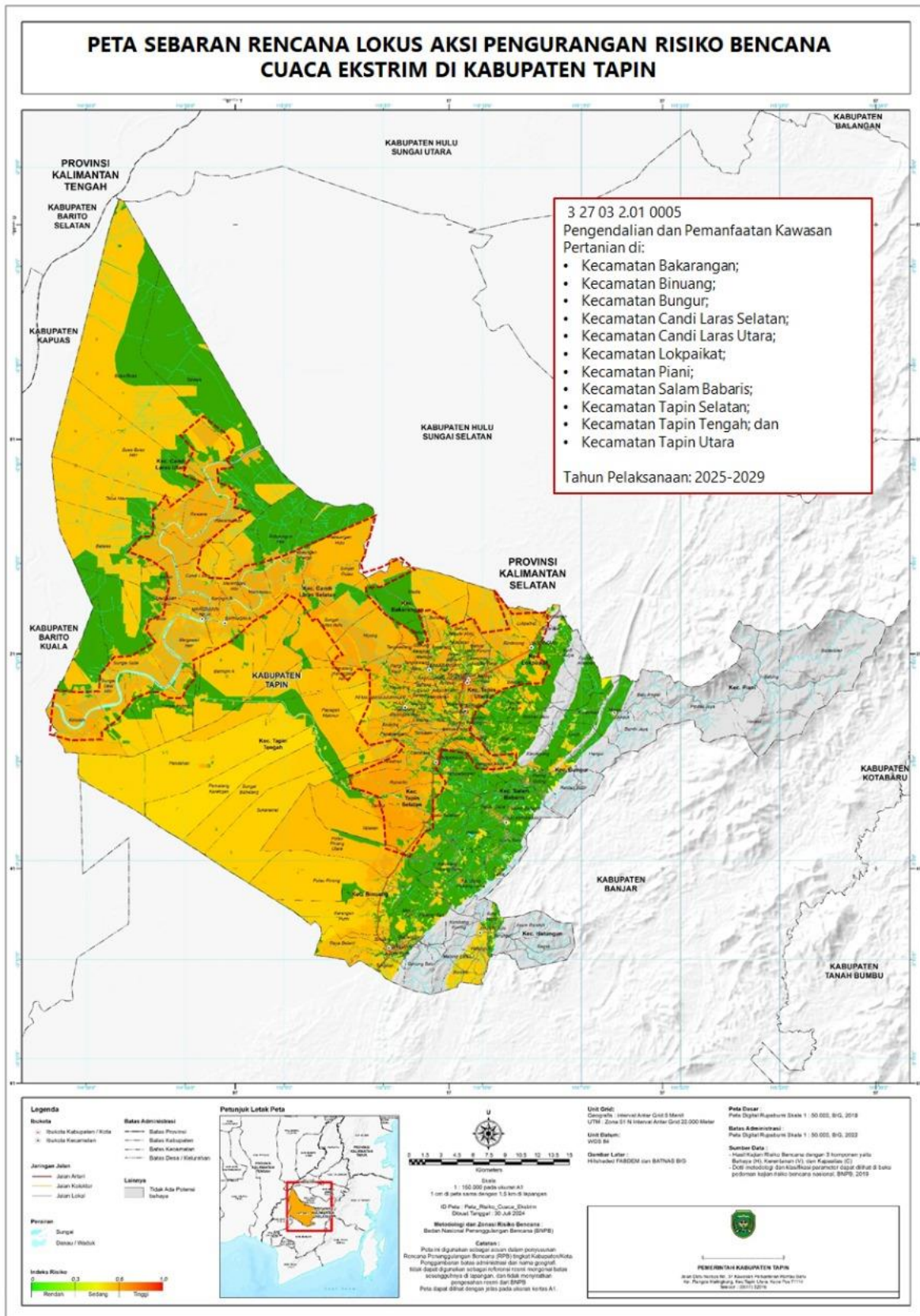
Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Lampiran 1. Peta Lokus Rencana Aksi RPB

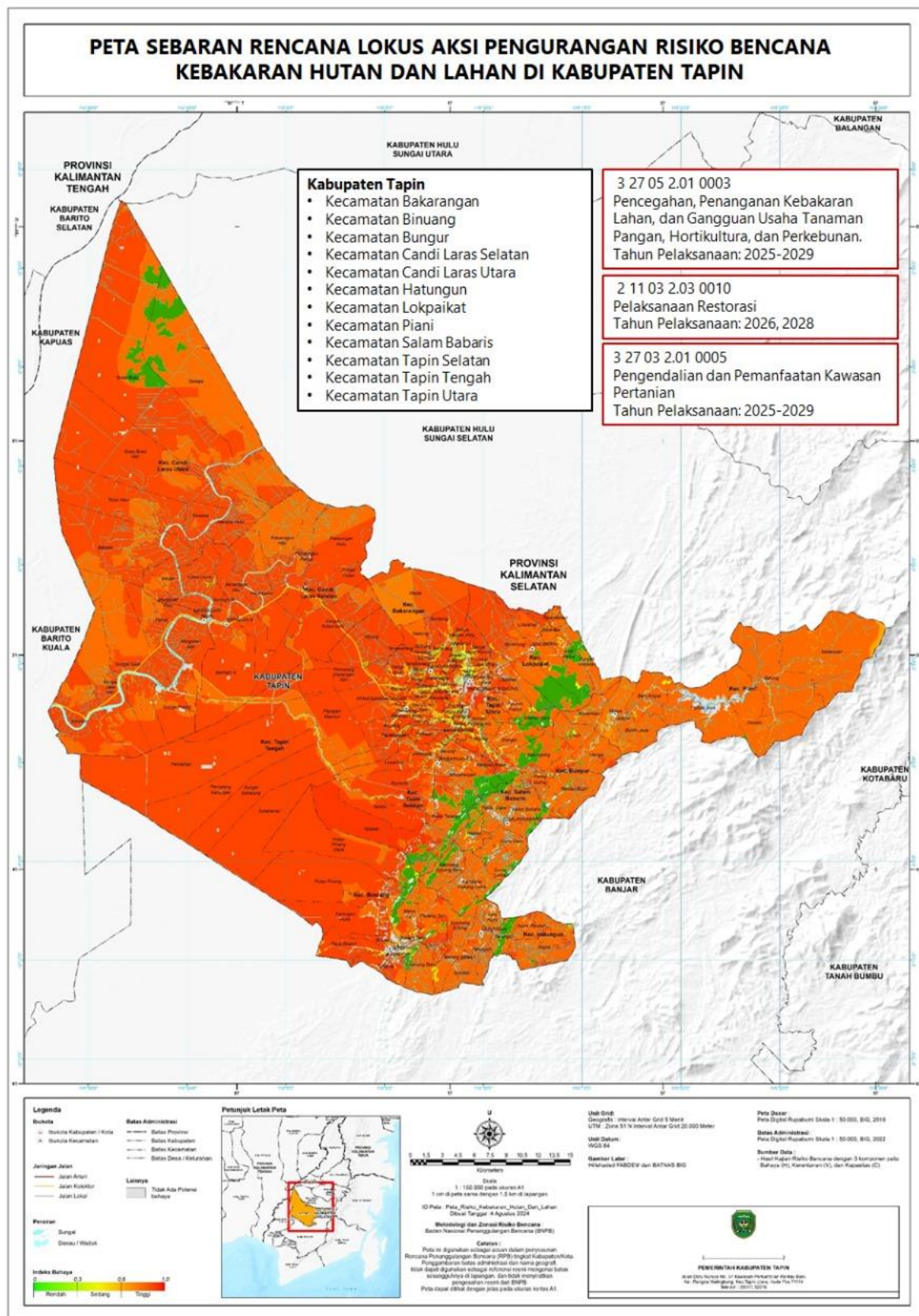




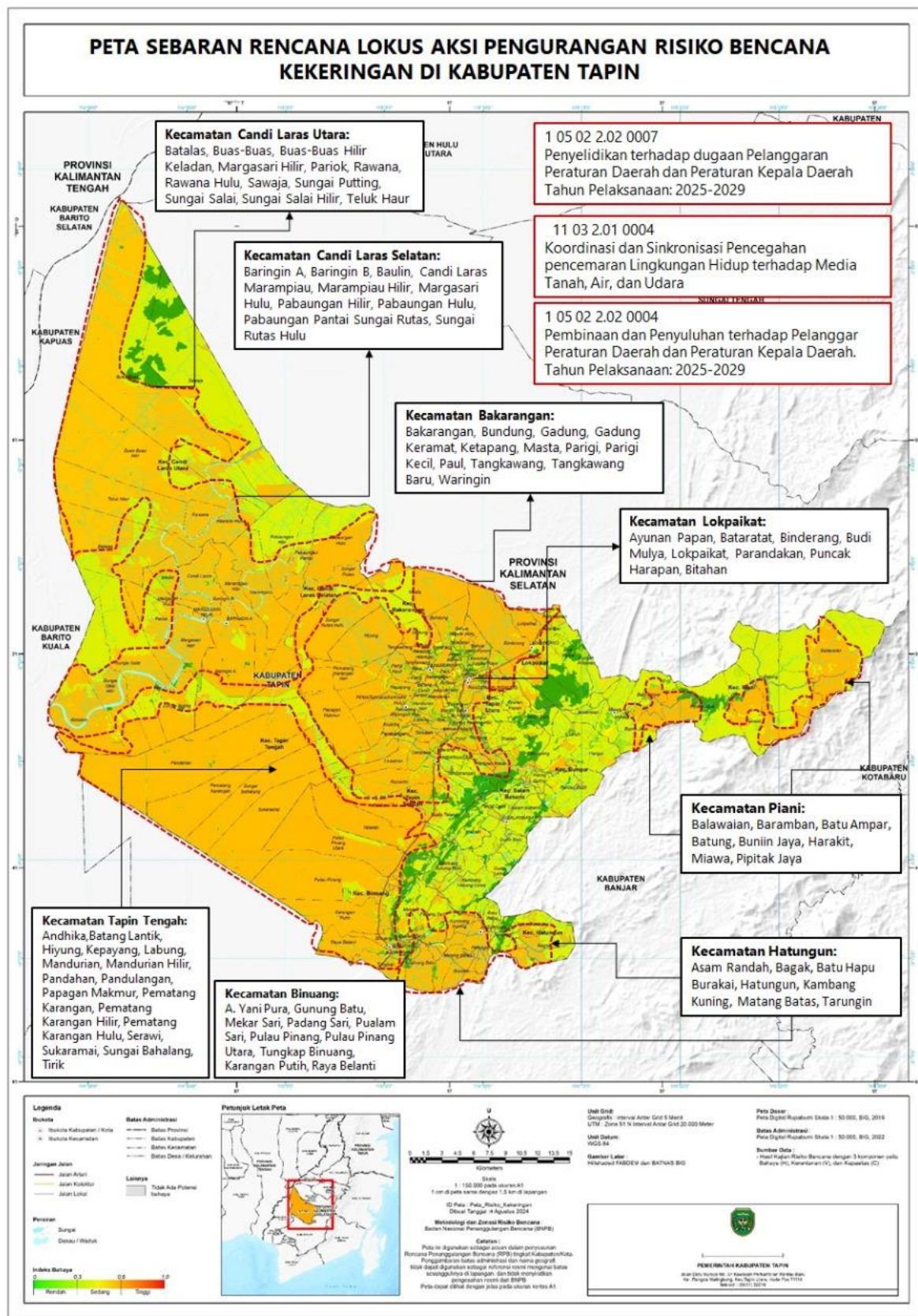
Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029



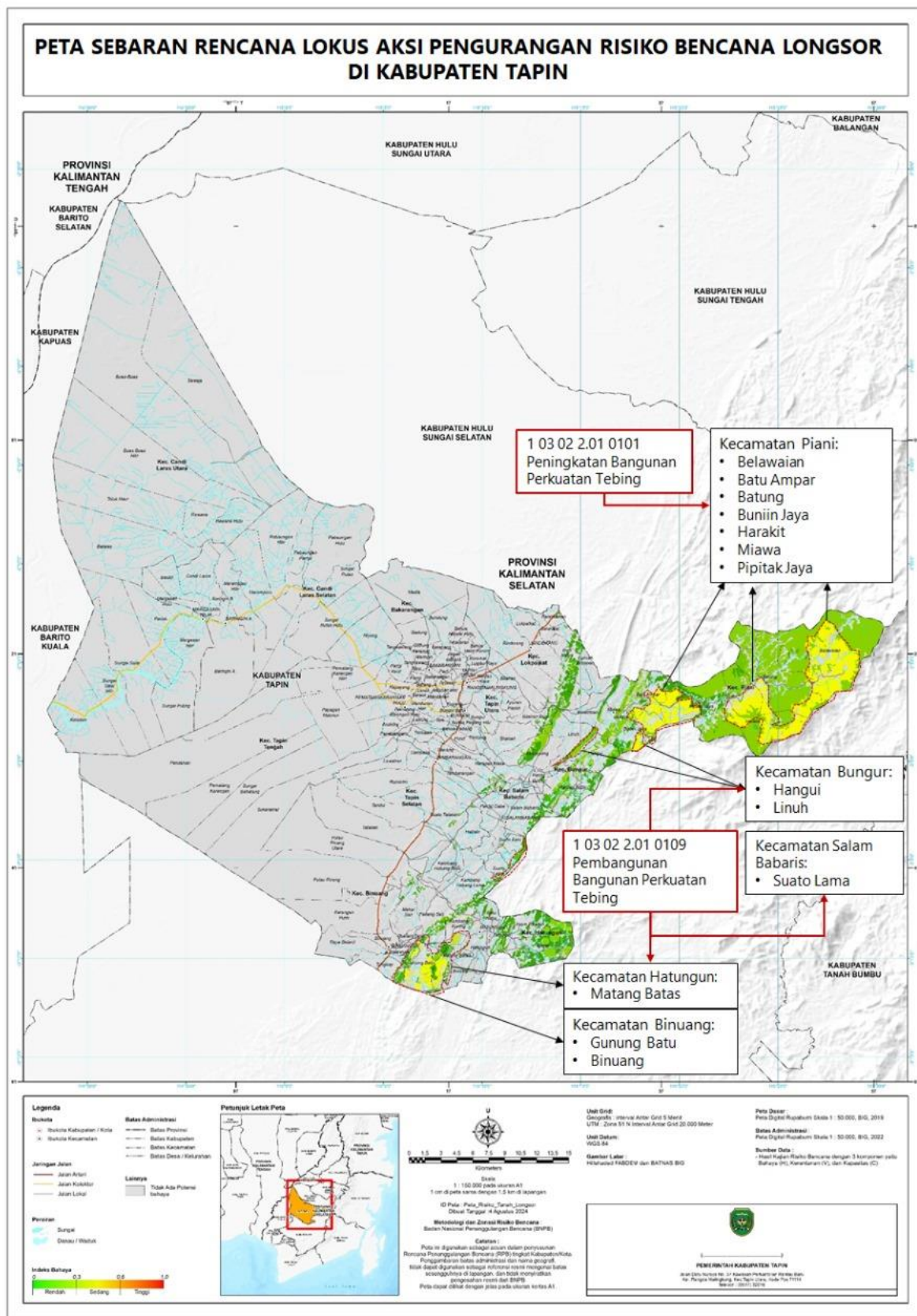
Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029



Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029



Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029



Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Lampiran 2. Matrik Program Dan Rencana Aksi

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus	
							2025		2026		2027		2028		2029				
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Isu Strategis 1: Pengelolaan Tata Guna Lahan untuk Mengurangi Risiko Banjir dan Kekeringan																			
Program 1: Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berbasis mitigasi bencana																			
1. Penguatan penerapan dan pengawasan tata ruang berbasis kajian risiko bencana	Penertiban dan penegakan hukum bagi pelanggaran tata ruang dan lingkungan	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang	1 03 12 2.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang	Dokumen	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Satpol PP, Dinas Perkim, BPBD,Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin	
				1 03 12 2.04 0006 Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Terlaksananya Audit Tata Ruang	Kasus	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Satpol PP, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin	
				1 03 12 2.04 0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Kasus	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Satpol PP, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin	
				1 03 12 3.06 0001 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Satpol PP, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin	

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				1 03 09 2.01 0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan	Dokumen	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Satpol PP, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 05 02 2.02 0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Utama: Satpol PP Pendukung: Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 05 02 2.02 0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Utama: Satpol PP Pendukung: Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
		Pembuatan sistem dan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pelanggaran tata ruang dan lingkungan	Adanya sistem dan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terpadu yang melibatkan semua unsur di pemerintahan dan masyarakat	1 03 09 2.01 0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			1	100							Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BAPPEDA, BPBD, Satpol PP, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 03 12 2.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang	Dokumen			1	100							Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH,	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
																	BAPPEDA,BPBD, Satpol PP, Kecamatan, Desa	
		Pemberian PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) sesuai dengan rencana tata ruang yang mempertimbangkan risiko bencana	Adanya syarat-syarat pemberian PBG yang mempertimbangkan kajian risiko bencana dan kajian dampak lingkungan	1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
		1 03 08 2.01 0022 Pengawasan dan penindakan bangunan yang tidak	Teridentifikasi bangunan gedung yang tidak memiliki PBG dan tidak sesuai dengan RRTR	1 03 08 2.01 0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Orang	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		sesuai PBG dan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang)		1 03 09 2.01 0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 05 02 2.02 0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	Utama: Satpol PP Pendukung: Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 05 02 2.02 0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	Utama: Satpol PP Pendukung: Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
2. Penerapan dan peningkatan fungsi informasi penataan ruang daerah untuk pengurangan risiko bencana	Adanya sistem informasi penataan ruang yang dapat dimanfaatkan dalam pengurangan risiko bencana	Pembangunan media informasi penataan ruang yang dapat diakses publik untuk pengurangan risiko bencana	Tersedianya media informasi penataan ruang yang bisa di akses oleh masyarakat untuk pemanfaatan pengurangan risiko bencana	1 03 12 2.01 0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Publikasi			1	150	1	150					Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				2 16 02 2.01 0006 Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Dokumen			1	150	1	150					Utama: Dinas Kominfo Pendukung: Bappeda, Dinas Perkim,	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
																	Kecamatan, Desa	
3 Penataan dan pengendalian permukiman di sempadan dan bantaran sungai rawan bencana	Adanya penataan kawasan sungai dalam pengendalian risiko banjir dan banjir bandang	Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Terlaksananya peningkatan dan pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan dan pengurangan risiko bencana	1 03 12 2.01 0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Tersampaikannya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Orang			100	100							Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Perkim, BAPPEDA, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 03 12 2.02 0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	Dokumen			1	100							Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Perkim, BAPPEDA, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
		Penataan bangunan di wilayah rawan bencana yang tidak sesuai RRTR/RTRW serta tidak memiliki PBG	Terlaksananya penataan bangunan yang berada pada wilayah rawan bencana	1 03 09 2.01 0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Satpol PP, Dinas Kominfo, Dinas LH, Dinas Perkim, BAPPEDA, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				1 05 02 2.02 0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	Utama: Satpol PP Pendukung: Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				1 05 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	Utama: Satpol PP Pendukung: Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
		Koordinasi lintas sektor dalam penataan dan pengawasan permukiman di sempadan dan bantaran sungai	Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam penataan dan pengendalian permukiman yang rawan terdampak risiko bencana	1 03 09 2.01 0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokume n	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Satpol PP, Dinas Kominfo, Dinas LH, Dinas Perkim, BAPPEDA, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				1 03 12 2.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang	Dokume n	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Satpol PP, Dinas Kominfo, Dinas LH, Dinas Perkim, BAPPEDA, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Isu Strategis 2: Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana																		
Program 2 : Peningkatan Pengelolaan Pencegahan dan Mitigasi Risiko Bencana																		
4.Penerapan Sumur Resapan dan Biopori	Terbangunnya a sumur resapan dan/atau biopori dalam mengurangi frekuensi dan dampak bencana banjir	Peningkatan pembangunan sumur resapan dan/atau biopori pada wilayah permukiman dan perkantoran berisiko banjir tinggi	Terlaksananya pembangunan sumur resapan dan/atau biopori pada wilayah pemukiman dan perkantoran	1 03 02 2.01 0077 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen			1	100			1	100			Utama: Dinas PUPR Pendukung: BWS Provinsi, BKSDA Provinsi, Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Sungai Tapin Sungai Tapin Kecamatan Bungur: Desa Banua Padang, Banua Padang Hilir, Bungur, Bungur Baru, Hangui, Kalumpang, Linuh, Paring Guling, Rantau Bujur, Shabah, Timbun; Kecamatan Piani: Balawaia n, Batu

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
																	Ampar, Batung, Buniin Jaya, Harakit, Miawa, Pipitak Jaya, Kecamat an Salam Babaris: Salam Babaris, Kecamat an Tapin Tengah: Manduri an, Tirik; Kecamat an Tapin Utara: Antasari Hilir, Kupang	

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
5.Normalisasi/ Restorasi sungai	Pengembalian fungsi alami sungai dan peningkatan kapasitas sungai dalam mengurangi frekuensi dan luasan bencana banjir	Normalisasi/Restorasi sungai pada wilayah rawan banjir	Terlaksananya normalisasi/restorasi sungai dalam rangka mengurangi dampak banjir	1 03 02 2.01 0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	KM	5	5500	5	5500	5	5500	5	5500	5	5500	Utama: Dinas PUPR Pendukung: BWS, Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Sungai Tapin Kecamatan Bungur: Desa Banua Padang, Banua Padang Hilir, Bungur, Bungur Baru, Hangui, Kalumpang, Linuh, Paring Guling, Rantau Bujur, Shabah, Timbun; Kecamatan Piani: Balawaian, Batu Ampar, Batung, Buniin Jaya, Harakit, Miawa, Pipitak Jaya,

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
																	Kecamat an Salam Babaris: Salam Babaris, Kecamat an Tapin Tengah: Manduri an, Tirik; Kecamat an Tapin Utara: Antasari Hilir, Kupang	
		Pelaksanaan pengerukan/pe mber sihan sungai	Terlaksananya pembersihan dan pengerukan sungai di daerah rawan banjir	1 03 02 2.01 0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restora si Sungai	KM			5	550 0			5	550 0			Utama: Dinas PUPR Pendukung: BWS, Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Sungai Muning

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
6. Penguatan lereng pada kawasan rawan longsor	Berkurangnya frekuensi longsor di wilayah berisiko tinggi	Pembangunan talud/ tembok penahan tebing/ terasering pada daerah lereng berisiko longsor pada permukiman masyarakat dan jalur transportasi	Terbangunnya bangunan penahan tebing yang berisiko tinggi longsor	1 03 02 2.01 0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	KM	1	1000			1	1000			1	1000	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD,Kecamatan, Desa	Kecamatan Piani: Belawaian, Batu Ampar, Batung, Buniin Jaya, Harakit, Miawa, Pipitak Jaya Kecamatan an Bungur: Hangui, Linuh.
				1 03 02 2.01 0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	KM			1	500			1	500			Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	
				1 03 02 2.01 0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing	KM			1	500			1	500			Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	
			Pembangunan turap dan drainase pada jalan baru yang berisiko tinggi longsor	Terlaksananya pembangunan turap dan drainase pada jalan baru yang berisiko tinggi longsor	1 03 02 2.01 0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	KM	1	1000			1	1000			1	1000	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
																		Binuang: Gunung Batu, Binuang
				1 03 06 2.01 0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Meter			1	500			1	500			Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
7. Pengawasan dan penegakkan hukum bagi aktivitas penebangan pohon di hulu sungai yang berpotensi terjadi banjir bandang	Terlaksananya a pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas masyarakat di hulu sungai terhadap risiko banjir bandang	Koordinasi dan pengawasan lintas lembaga terhadap aktivitas masyarakat di hulu sungai yang tidak mempertimban gkan dampak risiko bencana	Terlaksananya koordinasi lintas lembaga urusan perlindungan hutan dalam pencegahan dan mitigasi bencana longsor dan banjir bandang pada daerah aliran sungai	2 11 03 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, dan Udara	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Kegiata n	2	20	2	20	2	20	2	20	2	20	Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Pertanian, Dinas PUPR, BKSDA Provinsi, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				2 11 02 2.01 0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokume n	1	50							1	50	Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Pertanian, Dinas PUPR, BKSDA Provinsi, Dinas Perkim, BPBD,	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
																	Kecamatan, Desa	
				4 01 03 2.04 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	20			1	20			1	20	Utama: Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekda Pendukung: Dinas LH, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Pangan, Dinas PUPR, BKSDA Provinsi, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
8. Pengelolaan dan pengendalian hutan dan ruang terbuka hijau sebagai perlindungan daerah tangkapan air	Terkendalinya daerah tangkapan air dalam pencegahan risiko bencana	Koordinasi Pelaksanaan reboisasi kawasan hutan, lahan dan DAS yang kritis	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan reboisasi kawasan hutan, lahan dan DAS yang kritis	3 27 03 2.01 0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendalinya dan termanfaatnya Kawasan Pertanian	Ha	50	250	50	250	50	250	50	250	50	250	Utama: Dinas Pertanian Pendukung: Dinas LH, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, BKSDA Provinsi, Dinas LH Provinsi	Kecamatan an Bakaran gan Kecamatan Binuang Kecamatan an Bungur Kecamatan Candi Laras Selatan Kecamatan Candi Laras Utara Kecamatan an Hatungun Kecamatan an Lokpaikat Kecamatan Piani Kecamatan an Salam Babaris Kecamatan an Tapin Kecamatan

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
																	an Tapin Tengah Kecamat an Tapin Utara	

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				2 11 03 2.03 0007 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiata n	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Pertanian, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, BKSDA Provinsi, Dinas LH Provinsi	Kecamat an Bakaran gan Kecamat an Binuang Kecamat an Bungur Kecamat an Candi Laras Selatan Kecamat an Candi Laras Utara Kecamat an Hatungu n Kecamat an Lokpaika t Kecamat an Piani Kecamat an Salam Babaris Kecamat an Tapin Selatan Kecamat

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
																	an Tapin Tengah Kecamatan Tapin Utara	
				2 11 03 2.03 0010 Pelaksanaan Restorasi	Kegiatan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Ha			50	250			50	250			Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Pertanian, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, BKSDA Provinsi, Dinas LH Provinsi	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				2 11 03 2.03 0009 Pelaksanaan rehabilitasi	Kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Ha	50	250			50	250			50	250	Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Pertanian, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, BKSDA Provinsi, Dinas LH Provinsi	Kabupat en Tapin
				1 03 02 2.01 0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	KM			1	100 0							Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Pertanian, Dinas LH, BPBD, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, BKSDA Provinsi, Dinas LH Provinsi	Kabupat en Tapin
		Peningkatan ruang terbuka hijau di wilayah padat permukiman	Adanya pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana	2 11 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Ha	100 0	250 0	100 0	250 0	100 0	250 0	100 0	250 0	100 0	250 0	Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Dinas LH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS Provinsi	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan kawasan ruang terbuka hijau untuk pencegahan dampak bencana	Terlaksananya pengawasan dan penindakan secara hukum terhadap perlindungan ruang terbuka hijau dalam pencegahan dan mitigasi bencana	1 03 12 2.04 0006 Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Terlaksananya Audit Tata Ruang	Kasus	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas LH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, Dinas Pertanian, Dinas LH, Dinas Perkim, Dinas Pertanian	Kabupat en Tapin
				1 03 12 2.04 0007 Penaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Terlaksananya tahapan kegiatan Penaan Sanksi Administratif	Kasus	10	20			10	20			10	20	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas LH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, Dinas Pertanian, Dinas LH, Dinas Perkim, Dinas Pertanian	Kabupat en Tapin
				1 03 12 3.06 0001 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokume n	1	50			1	50			1	50	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas LH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, Dinas Pertanian, Dinas LH, Dinas Perkim, BPBD	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				2 11 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Ha	10	50			10	50			10	50	Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas LH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pertanian	Kabupat en Tapin
				3 27 03 2.01 0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendalinya dan termanfaatnya Kawasan Pertanian	Ha	10	50			10	50			10	50	Utama: Dinas Pertanian Pendukung: Dinas LH, Dinas LH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perkim	Kabupat en Tapin
		Koordinasi pengawasan dan penegakan hukum terkait pelindungan kawasan hutan untuk pencegahan dampak bencana	Terlaksananya pengawasan dan penindakan secara terpadu terhadap perlindungan hutan dalam pencegahan dan mitigasi bencana	3 27 03 2.01 0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendalinya dan termanfaatnya Kawasan Pertanian	Ha	10	50			10	50			10	50	Utama: Dinas Pertanian Pendukung: Dinas LH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, BKSDA Provinsi, Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			kebakaran hutan, longsor, banjir bandang dan banjir	3 27 05 2.01 0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	10	50			10	50			10	50	Utama: Dinas Pertanian Pendukung: Dinas LH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, BKSDA Provinsi, Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD	Kabupat en Tapin
9. Pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan	Berkurangnya dampak kebakaran hutan dan lahan	Koordinasi kegiatan sosialisasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar (UU No.32 Tahun 2009)	Terlaksananya sosialisasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar	3 27 03 2.01 0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendalinya dan termanfaatnya Kawasan Pertanian	Ha	10	50			10	50			10	50	Utama: Dinas Pertanian Pendukung: Dinas LH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, BKSDA Provinsi, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas LH	Kabupat en Tapin
				3 27 05 2.01 0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	10	50			10	50			10	50	Utama: Dinas Pertanian Pendukung: Dinas LH Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, BWS, BKSDA Provinsi, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas LH	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
10. Pemeliharaan pohon pelindung disepanjang jalan dan fasilitas umum	Berkurangnya potensi tumbang dan patahnya pohon pelindung pada saat angin kencang (cuaca ekstrim)	Pemangkasan pohon pelindung yang sudah rentan	Terlaksananya pemangkasan pohon pelindung dalam pencegahan dampak bencana cuaca ekstrim	2 11 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Ha	10	50			10	50			10	50	Utama: Dinas LH Pendukung: BPBD, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perkim,	Kabupat en Tapin
		Peremajaan kembali pohon pelindung	Terlaksananya peremajaan pohon pelindung dalam pencegahan dampak bencana cuaca ekstrim	2 11 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Ha	10	50			10	50			10	50	Utama: Dinas LH Pendukung: BPBD, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perkim,	Kabupat en Tapin
		Sosialisasi peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan kelestarian	Terbentuknya pemahaman masyarakat terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan	7 01 03 2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarg a			100	100			100	100			Utama: Kecamatan Pendukung: Dinas LH, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		pohon pelindung	terhadap dampak bencana cuaca ekstrim	2 11 08 2 01 0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/k elompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunit as/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembag a			5	100			5	100			Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan	Kabupat en Tapin
				2 11 08 2.01 0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang			100	150					100	150	Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan	Kabupat en Tapin
Isu Strategis 3: Peningkatan Infrastruktur Drainase dan Irigasi untuk Menghadapi Curah Hujan Ekstrem																		
Program 3: Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase																		
11. Pengelolaan dan pembangun an sistem drainase berbasis	Adanya sistem drainase terintegrasi langsung ke sungai yang dapat	Penyusunan master plan sistem drainase lingkungan perkotaan yang terintegrasi	Tersusunnya dokumen rencana induk sistem drainase perkotaan berbasis pengurangan	1 03 06 2.01 0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Dokume n			1	100							Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, BPBD, BAPPEDA	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
pengurangan risiko bencana	menurunkan frekuensi dan luasan banjir/genangan	dan yang terhubung langsung ke sungai	risiko bencana yang terintegrasi langsung ke sungai	1 03 06 2.01 0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen			1	100							Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, BPBD, BAPPEDA	Kabupaten Tapin
		Pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi sistem drainase perkotaan	Terbangunnya/ meningkatnya/ terehabilitasinya sistem drainase perkotaan dalam menurunkan frekuensi dampak bencana	1 03 06 2.01 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Meter	1000	2500			1000	2500			1000	2500	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 03 06 2.01 0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Meter			200	1000			200	1000			Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	
				1 03 06 2.01 0022 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Unit	50	200	50	200	50	200	50	200	50	200	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	
				1 03 06 2.01 0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Meter	1000	10000	1000	10000	1000	10000	1000	10000	1000	10000	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				1 03 06 2.01 0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Meter			500	500 0			500	500 0			Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	
				1 03 06 2.01 0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Meter	500	500 0	500	500 0	500	500 0	500	500 0	500	500 0	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	
		Penyusunan <i>Outline Plan</i> pada kawasan genangan	Terpetakan dan teridentifikasi kawasan genangan	1 03 06 2.01 0027 <i>Penyusunan Outline Plan</i> pada kawasan genangan	Tersusunnya <i>Outline Plan</i> pada Kawasan Genangan	Kawasa n Genang an			1	100							Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, BPBD, BAPPEDA	Kabupat en Tapin
		Pengawasan dan pemeliharaan sistem drainase	Berjalannya pembangunan dan pemeliharaan drainase sesuai dengan rencana induk dan teknis sistem drainase perkotaan yang berbasis pengurangan risiko bencana	1 03 06 2.01 0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainas e Perkota an	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				1 03 06 2.01 0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Meter	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas LH, BPBD, Kecamatan,Desa	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus		
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
		Monitoring dan evaluasi <i>master plan</i> sistem drainase lingkungan perkotaan	Adanya rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap rencana induk (master plan) sistem drainase perkotaan yang berbasis pengurangan risiko bencana	1 03 06 2.01 0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Dokumen			1	100					1	100	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin		
				1 03 06 2.01 0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen			1	100					1	100	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin		
		Pembersihan dan pengerukan drainase	Terpeliharanya drainase perkotaan secara berkala dan berkelanjutan	1 03 06 2.01 0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin		
				1 03 06 2.01 0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Meter	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa			
		Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan	Terbentuknya masyarakat peduli lingkungan yang dapat pembinaan teknis	1 03 06 2.01 0018 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Orang	20	100		20	100		20	100					Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		sistem drainase lingkungan	pengelolaan sistem drainase lingkungan	2 11 08 2 01 0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	20	100		20	100		20	100			Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Perkim, Dinas PUPR, BPBD,Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Laporan	1	10		1	10		1	10			Utama: Kecamatan Pendukung: Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan,Desa	Kabupaten Tapin
				7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Desa		Pokmas	1	10		1	10		1	10			Utama: Desa Pendukung: Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan,Desa	Kabupaten Tapin
Program 4: Perencanaan Terpadu Penanggulangan Bencana																		

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus	
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029				
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
12. Pemutakhiran Perencanaan Penanggulangan Bencana	Tersusunnya KRB dan RPB periode lanjut untuk penanggulangan bencana di daerah	Review dan pemutakhiran Kajian Risiko Bencana periode perencanaan	Terlaksananya pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana sesuai dengan perkembangan data terkini	1 05 03 2.01 0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Dokumen								1	500			Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas LH, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Damkar, Dinas Pariwisata, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
		Review dan pemutakhiran Rencana Penanggulangan Bencana periode perencanaan	Terlaksananya pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana sesuai dengan perkembangan data terkini	1 05 03 2.02 0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Dokumen									1	500	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas LH, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Damkar, Dinas Pariwisata, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin	

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program 5: Pengelolaan Persampahan																		
13. Peningkatan pengelolaan sampah rumah tangga yang ramah lingkungan	Adanya sistem pengelolaan sampah yang terpantau dari pembuangan rumah tangga sampai pada TPA yang berwawasan lingkungan dan risiko bencana	Pengembangan sistem dan mekanisme pemantauan dan pengawasan pembuangan sampah rumah tangga sampai pada TPA	Adanya sistem dan mekanisme pemantauan dan pengawasan pembuangan sampah rumah tangga sampai pada TPA	2 11 11 2.01 0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Dokumen			1	50							Utama: Dinas LH Pendukung: Satpol PP, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, BAPPEDA, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
		Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dan sarana prasarana dalam pelayanan sampah di daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dalam pelayanan sampah di daerah	2 11 11 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen			1	10	1	10					Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Perkim, Dinas PUPR, BPBD,Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				2 11 11 2.01 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan,dan Pemrosesan Akhir	Unit			50	100 0					50	100 0	Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Perkim, Dinas PUPR, BPBD,Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				2 11 11 2 01 0008 Penyusunan Rencana/Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokume n			1	20							Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Perkim, Dinas PUPR, BPBD,Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				2 11 11 2 01 0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan Penaganan Sampah	Jumlah Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	Utama: Dinas LH Pendukung: Dinas Perkim, Dinas PUPR, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				1 03 07 2.01 0007 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS3 R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Unit	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				1 03 07 2.01 0009 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS3 R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Unit	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Dinas Perkim, Dinas LH, BPBD,	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		
				Target	Rp (Juta)	Target				Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
																	Kecamatan, Desa	
		Sosialisasi dan pengawasan masyarakat dalam rangka sadar lingkungan	Tersosialisasinya dan terlaksananya pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah dalam menumbuhkan sadar dan peduli lingkungan serta risiko bencana	2 11 11 2.01 0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Dokumen	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	Utama: Dinas LH Pendukung: Satpol PP, Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				7 01 03 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	Utama: Kecamatan Pendukung: Dinas LH, Satpol PP, Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Desa	Kabupaten Tapin
				7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Pokmas	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	Utama: Desa Pendukung: Dinas LH, Satpol PP, Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Penegakan hukum peraturan daerah terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan (Perda tentang petunjuk pelaksana pengelolaan sampah)	Terlaksananya penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan pola hidup masyarakat yang bersih dan sehat	2 11 11 2.01 0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Dokumen	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	Utama: Dinas LH Pendukung: Satpol PP, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				2 11 10 2 01 0004 Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	3	25	3	25	3	25	3	25	3	25	Utama: Dinas LH Pendukung: Satpol PP, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				2 11 10 2 01 0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	5	50	5	50	5	50	5	50	5	50	Utama: Dinas LH Pendukung: Satpol PP, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 05 02 2.02 0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	Utama: Satpol PP Pendukung: Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				1 05 02 2.02 0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	Utama: Satpol PP Pendukung: Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD,	Kabupat en Tapin
		Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga	Adanya kelompok-kelompok peduli sampah dan lingkungan pada tingkat masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan	2 11 11 2.01 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Kelomp ok	10	120	10	120	10	120	10	120	10	120	Utama: Dinas LH Pendukung: Satpol PP, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				1 03 04 2.01 0011 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang	500	150	500	150	500	150	500	150	500	150	Utama: Dinas PUPR Pendukung: Satpol PP, Dinas LH, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				7 01 03 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	Utama: Kecamatan Pendukung: Dinas PUPR, Satpol PP, Dinas LH, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Pokmas	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	Utama: Desa Pendukung: Dinas PUPR, Satpol PP, Dinas LH, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Kecamatan	Kabupat en Tapin
		Peningkatan LPS (Lembaga Pengelola Sampah)	Bertambahnya lembaga pengelolaan sampah di tingkat Desa untuk penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan	2 11 11 2.01 0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF,pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton			500	800	500	800	500	800	500	800	Utama: Dinas LH Pendukung: Satpol PP, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				7 01 03 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	Utama: Kecamatan Pendukung: Dinas PUPR, Satpol PP, Dinas LH, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Pokmas	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	Utama: Desa Pendukung: Dinas PUPR, Satpol PP, Dinas LH, Dinas Perkim, BPBD, Kecamatan, Kecamatan	Kabupat en Tapin
Isu Strategis 4: Pengembangan Infrastruktur Mitigasi Bencana																		
Program 6: Peningkatan Sistem Kesiapsiagaan Daerah Terhadap Bencana																		
16. Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanganan bencana daerah	Tersusunnya rencana kesiapsiagaan dan penanganan bencana daerah yang tangguh	43 Penyusunan rencana kontingensi bencana prioritas daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	1 05 03 2.02 0009 Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	Dokumen	1	250			1	250			1	250	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perkim, Dinas LH, Dinas Damkar, Satpol PP, TNI, POLRI, Kantor SAR, ORARI, RAPI, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		
				Target	Rp (Juta)	Target				Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Review dan pembaruan rencana kontingensi bencana prioritas daerah	Terlaksananya pemutakhiran Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	1 05 03 2.02 0009 Penyusunan Rencana Kontinjensi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	Dokumen	1	250			1	250			1	250	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perkim, Dinas LH, Dinas Damkar, Satpol PP, TNI, POLRI, Kantor SAR, ORARI, RAPI, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
		Review dan pembaruan rencana penanggulangan kedaruratan bencana daerah	Terlaksananya pemutakhiran Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	1 05 03 2.02 0011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Dokumen					1	250			1	250	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perkim, Dinas LH, Dinas Damkar, Satpol PP, TNI, POLRI, Kantor SAR, ORARI, RAPI,	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
																	Kecamatan, Desa	
		Gladi kesiapsiagaan untuk bencana berdasarkan RPKB dan Renkon	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	1 05 03 2.02 0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	Orang	200	500			200	500			200	500	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perkim, Dinas LH, Dinas Damkar, Satpol PP, TNI, POLRI, Kantor SAR, ORARI, RAPI, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Pembangunan sistem dan sarana prasarana peringatan dini untuk bencana prioritas daerah	Tersedianya layanan sistem peringatan dini untuk bencana prioritas di daerah	1 05 03 2.02 0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Laporan			1	450			1	450			Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA, Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perkim, Dinas LH, Dinas Damkar, Satpol PP, TNI, POLRI, Kantor SAR, ORARI, RAPI, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
Penyusunan, pengelolaan dan pemanfaataan sistem informasi kebencanaan	Tersedianya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan	Pembangunan sistem informasi kebencanaan daerah yang terpadu dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan	Tersedianya sistem informasi kebencanaan daerah yang terintegrasi dengan SIPD dan DIBI	1 05 03 2.04 0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen			1	100							Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata, Dinas Perkim, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
	Pemerintahan Daerah (SIPD)	Pemerintahan Daerah (SIPD) dan DIBI		2 16 02 2.01 0006 Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Dokumen			1	100							Utama: Dinas Kominfo Pendukung: BPBD, Dinas Pariwisata, Dinas Perkim, Dinas Sosial.	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus		
							2025		2026		2027		2028		2029					
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
																	Kecamatan, Desa			
				2 16 03 2.02 0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Unit			1	100									Utama: Dinas Kominfo Pendukung: BPBD, Dinas Pariwisata, Dinas Perkim, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				2 16 02 2.01 0009 Manajemen Komunikasi Krisis	Terlaksananya Manajemen Komunikasi Krisis	Dokume n			1	100									Utama: Dinas Kominfo Pendukung: BPBD, Dinas Pariwisata, Dinas Perkim, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
		53 Peningkatan sarana prasarana dan pengembanga n sistem pendataan dan informasi PUSDALOPS PB	Tersedianya sistem dan sarana prasarana Pusdalops untuk pendataan dan penyebaran informasi kebencanaan yang terintegrasi	1 05 03 2.02 0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Laporan			1	100								Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata, Dinas Perkim, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin	

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			antar nasional, provinsi serta OPD															
Program 7: Peningkatan Pendidikan Aman Bencana																		
Peningkatan kapasitas dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana (SMAB) / Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Terbangunnya a sekolah yang aman bencana di seluruh satuan pendidikan daerah	Penerapan satuan pendidikan aman bencana (SPAB) diseluruh tingkat sekolah di daerah secara komprehensif	Terlaksananya penerapan SPAB di seluruh tingkat pendidikan di daerah	1 05 03 2.01 0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Orang	1000	200	1000	200	1000	200	1000	200	1000	200	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PMI, Dinas Sosial, Satpol PP	Kabupat en Tapin
				1 01 03 3.01 0005 Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	Dokume n	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	Utama: Dinas Pendidikan Pendukung: BPBD, Dinas Kesehatan, PMI, Dinas Sosial, Satpol PP	Kabupat en Tapin
Program 8: Pembangunan Masyarakat Tangguh Bencana																		

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Peningkatan Desa tangguh bencana	Terbangunnya Desa tangguh bencana di daerah	Peningkatan kapasitas Desa/desa rawan bencana dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana	Terbentuknya Desa tangguh bencana terutama Desa yang berada pada wilayah berisiko tinggi bencana	1 05 03 2.01 0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Orang	100 0	200	100 0	200	100 0	200	100 0	200	100 0	200	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Seluruh Desa yang berada di zona risiko tinggi bencana
				1 05 03 2.02 0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	10	100			10	100			10	100	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Seluruh Desa yang berada di zona risiko tinggi bencana
				1 05 03 2.02 0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	2	400			2	400			2	400	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Seluruh Desa yang berada di zona risiko tinggi bencana

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				1 06 06 2.02 0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampun g			5	150			5	150			Utama: Dinas Sosial Pendukung: BPBD, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Seluruh Desa yang berada di zona risiko tinggi bencana
				3 26 02 2.03 0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	2	400			2	400			2	400	Utama: Dinas Pariwisata Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Seluruh Desa yang berada di zona risiko tinggi bencana
		Simulasi dan uji sistem penanggulang an bencana/peng urang an risiko bencana di tingkat masyarakat dengan menggunakan indikator desa tangguh bencana secara berkala	Terlaksananya latihan uji sistem penanggulang an bencana di tingkat masyarakat secara komprehensif	1 05 03 2.02 0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarg a	100	400			100	400			100	400	Utama: BPBD Pendukung: Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				1 05 03 2.02 0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Kawasa n			1	400			1	400			Utama: BPBD Pendukung: Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
Program 9: Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat																		

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Pencegahan dan pengendalian penyakit	Terlaksananya surveilans epidemiologi dan penganggulan wabah	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 02 02 2.02 0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1 05 03 2.03 0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Dokumen	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Perternakan, RSUD, Dinas Kesehatan, Puskemas, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa	
		Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) dan/atau wabah zoonosis	Terlaksananya respon cepat terhadap kejadian luar biasa dan/atau wabah <i>zoonosis</i>	1 02 02 2.02 0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				3 27 04 2.01 0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan <i>Zoonosis</i> pada Hewan	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan <i>zoonosis</i> pada Hewan	Dokumen	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	Utama: Dinas Peternakan Pendukung: BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Pelaksanaan imunisasi pada kelompok rentan/berisiko tinggi terdampak penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (Bayi,Balita, Ibu Hamil, Anak-anak)	Terlaksananya imunisasi pada kelompok rentan/berisiko tinggi terdampak penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (Bayi, Balita, Ibu Hamil, Anak-anak)	1 02 02 3.02 0057 Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sesuai standar	Orang	100	250	100	250	100	250					Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
		Peningkatan kapasitas petugas dan sarana prasarana kesehatan dalam penanganan krisis kesehatan dan panganan darurat bencana	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana Kesehatan dalam panganan darurat bencana	1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokume n	1	100			1	100			1	100	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, RSUD, Dinas Sosial, Divi POLDA, Puskesmas, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang			50	250			50	250			Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, RSUD, Dinas Sosial, Divi POLDA, Puskesmas, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				1 02 03 3.03 0002 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Orang	50	250			50	250			50	250	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, RSUD, Dinas Sosial, Divi POLDA, Puskesmas, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
				1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	10	500	10	500	10	500	10	500	10	500	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, RSUD, Dinas Sosial, Divi POLDA, Puskesmas, Kecamatan, Desa	
				1 02 02 2.02 0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dokume n			1	20	1	20	1	20	1	20	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, RSUD, Dinas Sosial, Divi POLDA, Puskesmas, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin
							1	20										

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya a 10 indikator PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	Kampanye PHBS	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dalam pencegahan bencana epidemi dan wabah penyakit	1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen			1	50	1	50	1	50	1	50	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: Dinas Kominfo, BPBD, Dinas LH, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
		Penilaian Desa Ber-PHBS	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam pencegahan bencana epidemi dan wabah penyakit	1 02 05 2.02 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinas LH, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
Isu Strategis 5: Penguatan Regulasi dan Koordinasi Lintas Sektor untuk Penanggulangan Bencana yang Efektif																		
Program 10: Peningkatan Sistem Dasar Pemulihan Pasca Bencana																		
Penguatan sistem pemulihan pasca bencana	Adanya sistem pemulihan pasca bencana berbasis data dan pengkajian kebutuhan	Penguatan kebijakan dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Adanya kebijakan dan mekanisme pemulihan masyarakat pascabencana	1 05 03 2.04 0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)Kab/Kota	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Dokumen					1	250					Utama: BPBD Pendukung: Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Pariwisata,	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
	pasca bencana.				Kab/Kota yang sah dan legal												Dinas Perkim, Kecamatan,Desa	
				1 05 03 2.04 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Kegiatan					2	50					Utama: BPBD Pendukung: Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perkim, Kecamatan, Desa	Kabupat en Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Pembangunan dan perbaikan rumah penduduk korban dampak bencana	Terlaksananya pembangunan dan perbaikan rumah bagi korban bencana	1 04 02 2.01 0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100							1	100	Utama: Dinas Perkim Pendukung: BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Pangan,Dinas Pariwisata, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				2 04 02 2.03 0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	Unit Rumah	15	1500	15	1500	15	1500	15	1500	15	1500	Utama: Dinas Perkim Pendukung: BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Pariwisata,Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 04 02 2.03 0002 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	Unit Rumah	15	3000	15	3000	15	3000	15	3000	15	3000	Utama: Dinas Perkim Pendukung: BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Pariwisata.	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
																	Kecamatan, Desa	
		Penyusunan Rencana Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	Adanya rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana	1 05 03 2.04 0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)Kab/Kota	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Dokumen					1	250					Utama: BPBD Pendukung: Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin
				1 05 03 2.04 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas	Kegiatan											Utama: BPBD Pendukung: Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

RENCANA AKSI PB		NOMENKLATUR PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023		Nomenklatur Kab/Kota			TARGET, TAHUN PELAKSANAAN, DAN PAGU INDIKATIF										Institusi Pelaksana	Lokus
							2025		2026		2027		2028		2029			
Isu Strategis/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kode/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
					perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota													

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Lampiran 3. Matriks Program dan Rencana Aksi per OPD

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Indikator	Institusi Pelaksana	Lokus
Isu Strategis 1: Pengelolaan Tata Guna Lahan untuk Mengurangi Risiko Banjir dan Kekeringan							
Program 1: Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berbasis mitigasi bencana							
1.	Penguatan penerapan dan pengawasan tata ruang berbasis kajian risiko bencana	Tertatanya pola ruang daerah sesuai dengan RTRW	1.	Penertiban dan penegakan hukum bagi pelanggar tata ruang dan lingkungan	Jumlah kasus pelanggaran tata ruang wilayah dan lingkungan perkotaan yang tidak sesuai dengan RTRW dan RRTR	Dinas PUPR	Kabupaten Tapin
			2.	Pembuatan sistem dan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pelanggar tata ruang dan lingkungan	Adanya sistem dan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terpadu yang melibatkan semua unsur di pemerintahan dan masyarakat	Dinas PUPR	Kabupaten Tapin
			3.	Pemberian PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) sesuai dengan rencana tata ruang yang mempertimbangkan risiko bencana	Adanya syarat-syarat pemberian PBG yang mempertimbangkan kajian risiko bencana dan kajian dampak lingkungan	Dinas PUPR	Kabupaten Tapin
			4.	Pengawasan dan penindakan bangunan yang tidak sesuai PBG dan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang)	Teridentifikasinya bangunan gedung yang tidak memiliki PBG dan tidak sesuai dengan RRTR	Dinas PUPR	Kabupaten Tapin
2.	Penerapan dan peningkatan fungsi informasi penataan ruang daerah untuk pengurangan risiko bencana	Adanya sistem informasi penataan ruang yang dapat dimanfaatkan dalam pengurangan risiko bencana	1.	Penyusunan materi informasi penataan ruang yang dapat diakses publik untuk pengurangan risiko bencana	Tersedianya media informasi penataan ruang yang bisa di akses oleh masyarakat untuk pemanfaatan pengurangan risiko bencana	Dinas PUPR	Kabupaten Tapin
			2.	Pembangunan media informasi penataan ruang yang dapat diakses publik untuk pengurangan risiko bencana		Dinas Kominfo	Kabupaten Tapin
3.	Penataan dan pengendalian	Adanya penataan kawasan sungai	1.	Sosialisasi kebijakan dan	Terlaksananya peningkatan dan	Dinas PUPR	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Indikator	Institusi Pelaksana	Lokus
	permukiman di sempadan dan bantaran sungai rawan bencana	dalam pengendalian risiko banjir dan banjir bandang		peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan dan pengurangan risiko bencana		
			2.	Penataan bangunan di wilayah rawan bencana yang tidak sesuai RRTR/RTRW serta tidak memiliki PBG	Terlaksananya penataan bangunan yang berada pada wilayah rawan bencana	Dinas PUPR	Kabupaten Tapin
			3.	Koordinasi lintas sektor dalam penataan dan pengawasan permukiman di sempadan dan bantaran sungai	Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam penataan dan pengendalian permukiman yang rawan terdampak risiko bencana	Dinas PUPR	Kabupaten Tapin
Isu Strategis 2: Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana							
Program 5: Peningkatan Pengelolaan Pencegahan dan Mitigasi Risiko Bencana							
1.	Penerapan Sumur Resapan dan Biopori	Terbangunnya sumur resapan dan/atau biopori dalam mengurangi frekuensi dan dampak bencana banjir	1.	Peningkatan pembangunan sumur resapan dan/atau biopori pada wilayah permukiman dan perkantoran berisiko tinggi banjir	Terlaksananya pembangunan sumur resapan dan/atau biopori pada wilayah pemukiman dan perkantoran	Dinas PUPR	Kabupaten Tapin
2.	Normalisasi/Restorasi sungai	Pengembalian fungsi alami sungai dan peningkatan kapasitas sungai dalam mengurangi frekuensi dan luasan bencana banjir	1.	Normalisasi sungai pada wilayah rawan banjir	Terlaksananya normalisasi/restorasi sungai dalam rangka mengurangi dampak banjir	Dinas PUPR	Anak Sungai Timbalun, Anak Sungai Lareh, Anak Sungai Kasang, Anak Sungai Sarasah (bungus), Anak Sungai Maransi (bungus)

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Indikator	Institusi Pelaksana	Lokus
			2.	Pelaksanaan pengerukan/pembersihan sungai	Terlaksananya pembersihan dan pengerukan sungai di daerah rawan banjir	Dinas PUPR	Anak Sungai Timbalun, Anak Sungai Lareh, Anak Sungai Kasang, Anak Sungai Sarasah (bungus), Anak Sungai Maransi (bungus)
	Penguatan lereng pada kawasan rawan longsor	Berkurangnya frekuensi longsor di wilayah berisiko tinggi	1.	Pembangunan talud/ tembok penahan tebing/ terasering pada daerah lereng berisiko longsor pada permukiman masyarakat dan jalur transportasi	Terbangunnya bangunan penahan tebing yang berisiko tinggi longsor	Dinas PUPR	Sungai Batang Belimbing, Sungai Koto Lua Limau Manih, Anak Sungai Lareh, Anak Sungai Maransi, Sungai Sarasah, Anak Sungai Batang Arau, Gunung Pangilun, Bungus Barat,
			2.	Pembangunan turap dan drainase pada jalan baru yang berisiko tinggi longsor	Terlaksananya pembangunan turap dan drainase pada jalan baru yang berisiko tinggi longsor	Dinas PUPR	Kampung Jua Nan XX, Air Manis, Teluk Kabung Selatan, Lambung Bukik
3.	Pengawasan dan penegakkan hukum bagi aktivitas penebangan pohon di hulu sungai yang berpotensi terjadi banjir bandang	Terlaksananya pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas masyarakat di hulu sungai terhadap risiko banjir bandang	1.	Koordinasi dan pengawasan lintas lembaga terhadap aktivitas masyarakat di hulu sungai yang tidak mempertimbangkan dampak risiko bencana	Terlaksananya koordinasi lintas lembaga urusan perlindungan hutan dalam pencegahan dan mitigasi bencana longsor dan banjir bandang pada daerah aliran sungai	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Indikator	Institusi Pelaksana	Lokus
4.	Pengelolaan dan pengendalian hutan dan ruang terbuka hijau sebagai perlindungan daerah tangkapan air	Terkendalinya daerah tangkapan air dalam pencegahan risiko bencana	1.	Koordinasi Pelaksanaan reboisasi kawasan hutan, lahan dan DAS yang kritis	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan reboisasi kawasan hutan, lahan dan DAS yang kritis	Dinas Pertanian	Kabupaten Tapin
			2.	Peningkatan ruang terbuka hijau di wilayah padat permukiman	Adanya pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Tapin
			3.	Pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan kawasan ruang terbuka hijau untuk pencegahan dampak bencana	Terlaksananya pengawasan dan penindakan secara hukum terhadap perlindungan ruang terbuka hijau dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Dinas PUPR	Kabupaten Tapin
			4.	Koordinasi pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan kawasan hutan untuk pencegahan dampak bencana	Terlaksananya pengawasan dan penindakan secara terpadu terhadap perlindungan hutan dalam pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran hutan, longsor, banjir bandang dan banjir	Dinas Pertanian	Kabupaten Tapin
5.	Pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan	Berkurangnya dampak kebakaran hutan dan lahan	1.	Koordinasi kegiatan Sosialisasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar (UU No.32 Tahun 2009)	Terlaksananya sosialisasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar	Dinas Pertanian	Kabupaten Tapin
6.	Pemeliharaan pohon pelindung disepanjang jalan dan fasilitas umum	Berkurangnya potensi tumbang dan patahnya pohon pelindung pada saat angin kencang (cuaca ekstrim)	2.	Pemangkasan pohon pelindung yang sudah rentan	Terlaksananya pemangkasan pohon pelindung dalam pencegahan dampak bencana cuaca ekstrim	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Tapin
			3.	Peremajaan kembali pohon pelindung	Terlaksananya peremajaan pohon pelindung dalam pencegahan dampak	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Indikator	Institusi Pelaksana	Lokus
					bencana cuaca ekstrim		
			4.	Sosialisasi peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian pohon pelindung	Terbentuknya pemahaman masyarakat terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap dampak bencana cuaca ekstrim	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Tapin
Isu Strategis 3: Peningkatan Infrastruktur Drainase dan Irigasi untuk Menghadapi Curah Hujan Ekstrem							
Program 1: Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase							
1.	Pengelolaan dan pembangunan sistem drainase berbasis pengurangan risiko bencana	Adanya sistem drainase terintegrasi langsung ke sungai yang dapat menurunkan frekuensi dan luasan banjir/genangan	1.	Penyusunan master plan sistem drainase lingkungan perkotaan yang terintegrasi dan yang terhubung langsung ke sungai	Tersusunnya dokumen rencana induk sistem drainase perkotaan berbasis pengurangan risiko bencana yang terintegrasi langsung ke sungai	Dinas PUPR	Kabupaten Tapin
			2.	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sistem drainase perkotaan	Terbangunnya/ meningkatnya/ terehabilitasinya sistem drainase perkotaan dalam menurunkan frekuensi dampak bencana	Dinas PUPR	Kabupaten Tapin
			3.	Penyusunan <i>Outline Plan</i> pada kawasan genangan	Terpetakan dan teridentifikasi kawasan genangan	Dinas PUPR	Kabupaten Tapin
			4.	Pengawasan dan pemeliharaan sistem drainase	Berjalannya pembangunan dan pemeliharaan drainase sesuai dengan rencana induk dan teknis sistem drainase perkotaan yang berbasis pengurangan risiko bencana	Dinas PUPR	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Indikator	Institusi Pelaksana	Lokus
			5.	Monitoring dan evaluasi <i>master plan</i> sistem drainase lingkungan perkotaan	Adanya rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap rencana induk (master plan) sistem drainase perkotaan yang berbasis pengurangan risiko bencana	Dinas PUPR	Kabupaten Tapin
			6.	Pembersihan dan pengerukan drainase	Terpeliharanya drainase perkotaan secara berkala dan berkelanjutan	Dinas PUPR	Kabupaten Tapin
			7.	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sistem drainase lingkungan	Terbentuknya masyarakat peduli lingkungan yang dapat pembinaan teknis pengelolaan sistem drainase lingkungan	Dinas PUPR	Kabupaten Tapin
Program 2: Perencanaan Terpadu Penanggulangan Bencana							
2.	Pemutakhiran Perencanaan Penanggulangan Bencana	Tersusunnya KRB dan RPB periode lanjut untuk penanggulangan bencana di daerah	1.	Review dan pemutakhiran Kajian Risiko Bencana priode perencanaan	Terlaksananya pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana sesuai dengan perkembangan data terkini	BPBD	Kabupaten Tapin
			2.	Review dan pemutakhiran Rencana Penanggulangan Bencana priode perencanaan	Terlaksananya pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana sesuai dengan perkembangan data terkini	BPBD	Kabupaten Tapin
Program 3: Pengelolaan Persampahan							
1.	Peningkatan pengelolaan sampah rumah tangga yang ramah lingkungan	Adanya sistem pengelolaan sampah yang terpantau dari pembuangan rumah tangga sampai pada TPA yang berwawasan lingkungan dan risiko bencana	1.	Pengembangan sistem dan mekanisme pemantauan dan pengawasan pembuangan sampah rumah tangga sampai pada TPA	Adanya sistem dan mekanisme pemantauan dan pengawasan pembuangan sampah rumah tangga sampai pada TPA	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Indikator	Institusi Pelaksana	Lokus
			2.	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dan sarana prasarana dalam pelayanan sampah di daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dalam pelayanan sampah di daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Tapin
			3.	Sosialisasi dan pengawasan masyarakat dalam rangka sadar lingkungan	Tersosialisasinya dan terlaksananya pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah dalam menumbuhkan sadar dan peduli lingkungan serta risiko bencana	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Tapin
			4.	Penegakan hukum peraturan daerah terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan (Perda tentang petunjuk pelaksana pengelolaan sampah)	Terlaksananya penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan pola hidup masyarakat yang bersih dan sehat	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Tapin
			5.	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga	Adanya kelompok- kelompok peduli sampah dan lingkungan pada tingkat masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Tapin
			6.	Peningkatan LPS (Lembaga Pengelola Sampah)	Bertambahnya lembaga pengelolaan sampah di tingkat Desa untuk penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Tapin
Isu Strategis 4: Pengembangan Infrastruktur Mitigasi Bencana							
Program 1: Peningkatan Sistem Kesiapsiagaan Daerah Terhadap Bencana							

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Indikator	Institusi Pelaksana	Lokus
1.	Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanganan bencana daerah	Tersusunnya rencana kesiapsiagaan dan penanganan bencana daerah yang tangguh	1.	Penyusunan rencana kontingensi bencana prioritas daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	BPBD	Kabupaten Tapin
			2.	Review dan pembaruan rencana kontingensi bencana prioritas daerah	Terlaksananya pemutakhiran Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	BPBD	Kabupaten Tapin
			3.	Review dan pembaruan rencana penanggulangan kedaruratan bencana daerah	Terlaksananya pemutakhiran Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	BPBD	Kabupaten Tapin
			4.	Gladi kesiapsiagaan untuk bencana berdasarkan RPKB dan Renkon	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	BPBD	Kabupaten Tapin
			5.	Pembangunan sistem dan sarana prasarana peringatan dini untuk bencana prioritas daerah	Tersedianya layanan sistem peringatan dini untuk bencana prioritas di daerah	BPBD	Kabupaten Tapin
2.	Penyusunan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Tersedianya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Pemerintahan Daerah (SIPD)	1.	Penyusunan materi sistem informasi kebencanaan daerah yang terpadu dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Pemerintahan Daerah (SIPD) dan DIBI	Tersedianya sistem informasi kebencanaan daerah yang terintegrasi dengan SIPD dan DIBI	BPBD	Kabupaten Tapin
			2.	Pembangunan sistem informasi kebencanaan daerah yang terpadu dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Pemerintahan Daerah (SIPD) dan DIBI		Dinas Kominfo	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Indikator	Institusi Pelaksana	Lokus
			3.	Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan sistem pendataan dan informasi PUSDALOPS PB	Tersedianya sistem dan sarana prasarana PUSDalops untuk pendataan dan penyebaran informasi kebencanaan yang terintegrasi antar nasional, provinsi serta OPD	BPBD	Kabupaten Tapin
3.	Peningkatan kapasitas dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana (SMAB)/Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Terbangunnya sekolah yang aman bencana di seluruh satuan pendidikan daerah	1.	Sosialisasi Penerapan satuan pendidikan aman bencana (SPAB) diseluruh tingkat sekolah di daerah secara komprehensif	Terlaksananya penerapan SPAB di seluruh tingkat pendidikan di daerah	BPBD	338 SD, 103 SMP
			2.	Penerapan satuan pendidikan aman bencana (SPAB) diseluruh tingkat sekolah di daerah secara komprehensif		Dinas Pendidikan	339 SD, 103 SMP
4.	Peningkatan Desa tangguh bencana	Terbangunnya Desa tangguh bencana di daerah	1.	Peningkatan kapasitas Desa/desa rawan bencana dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana	Terbentuknya Desa tangguh bencana terutama Desa yang berada pada wilayah berisiko tinggi bencana	BPBD	Seluruh Desa yang berada di zona risiko tinggi bencana
			2.	Simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat dengan menggunakan indikator desa tangguh bencana secara berkala	Terlaksananya latihan uji sistem penanggulangan bencana di tingkat masyarakat secara komprehensif	BPBD	Kabupaten Tapin
5.	Pencegahan dan pengendalian penyakit	Terlaksananya surveilans epidemiologi dan penganggulangan wabah	1.	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Indikator	Institusi Pelaksana	Lokus
			2.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tapin
			3.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	BPBD	
			4.	Respon cepat kejadian luar biasa kejadian luar biasa (KLB) dan/atau wabah zoonosis	Terlaksananya respon cepat terhadap kejadian luar biasa dan/atau wabah zoonosis	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tapin
			5.	Pelaksanaan imunisasi pada kelompok rentan/berisiko tinggi terdampak penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (Bayi, Balita, Ibu Hamil, Anak-anak)	Terlaksananya imunisasi pada kelompok rentan/berisiko tinggi terdampak penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (Bayi, Balita, Ibu Hamil, Anak-anak)	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tapin
			6.	Peningkatan kapasitas petugas dan sarana prasarana kesehatan dalam penanganan krisis kesehatan dan penanganan darurat bencana	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana Kesehatan dalam penanganan darurat bencana	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tapin
6.	Pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya 10 indikator PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	1.	Kampanye PHBS	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dalam pencegahan bencana epidemi dan wabah penyakit	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tapin

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	No.	Sub Kegiatan	Indikator	Institusi Pelaksana	Lokus
			2.	Penilaian Desa Ber-PHBS	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam pencegahan bencana epidemi dan wabah penyakit	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tapin
Isu Strategis 5: Penguatan Regulasi dan Koordinasi Lintas Sektor untuk Penanggulangan Bencana yang Efektif							
Program 10: Peningkatan Sistem Dasar Pemulihan Pasca Bencana							
7.	Penguatan sistem pemulihan pasca bencana	Adanya sistem pemulihan pasca bencana berbasis data dan pengkajian kebutuhan pasca bencana.	1.	Penguatan kebijakan dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Adanya kebijakan dan mekanisme pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana	BPBD	Kabupaten Tapin
			2.	66 Pembangunan dan perbaikan rumah penduduk korban dampak bencana	Terlaksananya pembangunan dan perbaikan rumah bagi korban bencana	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Tapin
			3.	67 Penyusunan Rencana Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	Adanya rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana	BPBD	Kabupaten Tapin